

**KONSTRUKSI REALITAS IZIN TAMBANG
DI LINGKUP UNIVERSITAS DALAM PEMBERITAAN
MEDIA ONLINE**

**(Analisis *Framing* pada Website
Kompas.com, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh
MUHAMMAD ZAKY
22321070**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KONSTRUKSI REALITAS IZIN TAMBANG
DI LINGKUP UNIVERSITAS DALAM PEMBERITAAN
MEDIA ONLINE**

(Analisis *Framing* pada Website
Kompas.com, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*)

Oleh:

MUHAMMAD ZAKY
22321070

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Tanggal: Selasa, 2 Juni 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing Skripsi



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si, Ph.D

NIDN. 0506038201

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KONSTRUKSI REALITAS IZIN TAMBANG DI
LINGKUP UNIVERSITAS DALAM PEMBERITAAN MEDIA
**ONLINE (Analisis *Framing* pada Website *Kompas.com*,
Tempo.co, dan *CNN Indonesia*)**

Disusun oleh:
MUHAMMAD ZAKY
22321070

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Pada : Kamis
Hari
Tanggal : (2 Juli 2026)

Dosen Penguji :

Ketua : Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D
NIDN. 0506038201

Anggota : Prof. Dr. rer. Soc. Masduki, S.Ag., M.Si., MA.
NIDN. 0517078101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Dr. Zaki Habibi, M.Comms

NIDN. 0517078101

HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK DAN PENGGUNAAN AI

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zaky

Nomor Mahasiswa : 22321070

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Selama proses penyusunan skripsi ini, saya tidak melakukan pelanggaran akademik dalam bentuk apa pun, termasuk pada plagiarisme, penggunaan jasa penulisan karya ilmiah oleh pihak lain, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip dan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia.
2. Oleh karena itu, skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri sebagai penulis, dan bukan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain.
3. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memanfaatkan teknologi Generative Artificial Intelligence secara bertanggung jawab dan terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. ChatGPT, digunakan untuk memperbaiki kalimat dan membantu brainstorming tentang isi tulisan
 - b. Perplexity AI, digunakan untuk mencari sumber yang kredibel
4. Apabila di kemudian hari, setelah saya dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, melainkan merupakan hasil plagiarisme atau karya milik pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 15 April 2026

Yan



Muhammad Zaky 22321070

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary"

(Mr. Qiting – *Dead Poets Society*)

"Dan di hariku yang paling gelap, semoga aku akan mengingat. Bahwa ini sementara, dan akan segera pergi dengan cepat"

(Timur – *The Adams*)

PERSEMBAHAN

Pertama dan utama, karya ini ku persembahkan kepada diri sendiri. Atas segala daya upaya yang selalu dijalani di tengah hiruk-pikuk dunia. Selamat datang di ujung dunia.

Lalu, sebagai penopang yang sangat kokoh.

Karya ini dipersembahkan dengan segala ketulusan untuk orang tua.

Suaidi dan Siti Asmah Khairiyah, doa-doa kalian menjadi pijakan kokoh di dunia yang umurnya sudah tidak lama lagi. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Konstruksi Realitas Pemberitaan Izin Tambang di Lingkup Universitas dalam Pemberitaan Media Online (Analisis *Framing* pada Website *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*). Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Tentu, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Kepada Mama dan Abah yang menjadikan langkah saya bisa sampai ke titik ini. Tentu dengan segala dukungan berupa materi maupun non materi. Tentu, doa-doa kalian menjadikan pijakan yang sangat kokoh untuk penulis sehingga bisa berjalan tanpa takut dengan lantai yang ringkih. Atas segala perjuangan-perjuangan yang telah kalian usahakan, atas segala sedih dan gelisah yang kalian rasakan, atas segala pedih yang kalian tutupi, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan permintaan maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.
2. Kepada Aa Nia dan Aa Sasha, kakak-kakak saya tersayang. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama ini. Semoga hidup kalian selalu dilimpahi kecukupan dan kebahagiaan. Tunggu aku sukses nanti.
3. Kepada Elma dan Jiane, keponakan tersayang. Terima kasih telah menjadi semangat baru dalam diri penulis. Semoga hidup kalian lebih baik, tumbuh lebih baik.
4. Kepada seluruh anggota keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan harapan baiknya.
5. Kepada seluruh anggota grup “Hilmi Gaptek” yang menjadikan saya tetap waras di segala gejolak hidup ini.
6. Kepada Irfan, Rakha, Daffa, dan Marion. Terima kasih atas pengalaman menyenangkan di Jogja selama ini. Walaupun sedikit banyak

kebodohan terjadi diantara kita, biarlah itu menjadi kisah lama yang akan kita kenang. Semoga selamat dan sukses.

7. Kepada Syaira Syahda Mukti. Terlepas dari apapun label diantara kita, terima kasih atas perjalanan dan dukungan yang selama ini kamu berikan kepada penulis. Semoga hidupmu selalu aman sentosa.
8. Kepada Hindia, Perunggu, Sal Priadi, dan semua penyanyi yang ada di playlist “se lara s”, penulis menyampaikan kekaguman yang paling magis kepada karya-karya kalian. Atas lagu-lagu yang luar biasa, dapat menjadi pelipur lara dan motivasi bagi penulis.
9. Kepada dosen pembimbing, Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, kritik, dan masukan atas skripsi penulis. Tentunya karya ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dari Anda. Saya mendoakan dengan segala kepenuhan hati, semoga Bapak selalu sehat wal afiat dan dilindungi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih mempunyai banyak kekurangan di dalamnya. Dengan ini, penulis menerima dengan lapang dada atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Besar harapan penulis untuk karya ini setidaknya memberikan kontribusi kecil untuk pengembangan ilmu komunikasi, terutama dalam kajian studi analisis *Framing*

Yogyakarta, 09 April 2025

Penulis



Muhammad Zaky

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PUSTAKA	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xiv
BAB I	15
PENDAHULUAN.....	15
A. LATAR BELAKANG	2
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. TINJAUAN PUSTAKA	6
1. Penelitian Terdahulu.....	5
2. Kerangka Teori.....	10
A. Konstruksi Realitas Media.....	10
B. Peran Media sebagai Pengawasan Isu Lingkungan Hidup.....	13
C. Analisis Framing.....	15
F. METODOLOGI PENELITIAN	19
BAB II.....	27
GAMBARAN UMUM	27
A. Deskripsi Umum.....	27
B. Profil Media	29
BAB III	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Kompas.com	37
B. Tempo.co	53
C. CNN Indonesia.....	71
D. Kategorisasi Tema	81

E. Perbedaan Framing <i>Kompas.com</i> , <i>Tempo.co</i> , dan <i>CNN Indonesia</i>	90
BAB IV	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Keterbatasan Penelitian	94
C. Saran/Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis <i>Framing</i> Model Zhongdang Pan & M.Kosicki.....	23
Tabel 1. 2 Jumlah Berita dan Jumlah Sampel.....	24
Tabel 1. 3 Contoh Penerapan Analisis <i>Framing</i> Model Pan dan Kosicki.....	24
Tabel 2. 1 Rubrikasi <i>Kompas.com</i>	30
Tabel 3. 1 Kesimpulan <i>Framing</i> Tiga Media	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo <i>Kompas.com</i>	29
Gambar 2. 2 Logo Tempo.....	32
Gambar 2. 3 Logo <i>CNN Indonesia</i>	34

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Daftar Singkatan	Arti/Kepanjangan
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar
PETI	Pertambangan Tanpa Izin
WIUP	Wilayah Izin Usaha Tambang
RUU	Rencana Undang-Undang
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
IUP	Izin Usaha Tambang
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CNN	Cable News Network
KCM	Kompas Cyber Media
PSN	Proyek Strategis Nasional
RT	Rukun Tetangga
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
GAMKI	Gerakan Angkatan Muda Kritis Indonesia
MIND ID	Mining Industry Indonesia (Holding BUMN Industri Indonesia)
FTTM	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
ITB	Institut Teknologi Bandung
UGM	Universitas Gadjah Mada
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
CERAH	Center of Economic and Law Studies for Energy and Resources
Minerba	Mineral dan Batubara
APTISI	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
Baleg	Badan Legislasi
UII	Universitas Islam Indonesia
BBC	British Broadcasting Corporation
KOL	Kompas Online

PT	Perseroan Terbatas
WWW	World Wide Web
UHF	Ultra High Frequency
OS	Operatiing System
EV	Electric Vehicle
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
STEM	Science, Technolofy
PNL	Politeknik Negeri Lhoseumawe
Prodi	Program Studi
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTN-BH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
Mendikti	Menteri Pendidikan Tinggi
Saintek	Sains dan Teknologi
PP	Pimpinan Pusat
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
SPK	Setrifikat Pekerja Kampus
UNHAS	Universitas Hasanuddin
BEM SI	Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia
PGI	Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Walhi	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
UKT	Uang Kuliah Tunggal
PWYP	Publish What You Pay
PBNU	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PAN	Partai Amanat Nasional
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
RDPU	Rapat Dengan Pendapat Umum
UNAIR	Universitas Airlangga
SDA	Sumber Daya Alam
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

ABSTRAK

Zaky, M. 22321070 (2026). Konstruksi Realitas Izin Tambang di Lingkup Universitas dalam Pemberitaan Media Online (Analisis Framing pada Website *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*). Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intensitas perdebatan publik terkait rencana pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam konteks revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Wacana ini memunculkan beragam respons dari aktor negara, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek etika, lingkungan, dan independensi pendidikan tinggi. Dalam situasi tersebut, media massa memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi realitas melalui cara mereka membingkai (*Framing*) informasi kepada publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia* membingkai isu pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang menitikberatkan pada empat struktur analisis, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana struktur teks berita disusun, bagaimana alur cerita dibangun, tema apa yang ditonjolkan, serta bagaimana pilihan bahasa digunakan untuk memperkuat makna tertentu. Periode pemberitaan yang dianalisis mencakup rentang waktu 20 Januari 2025 hingga 22 Februari 2025, dengan total 25 judul berita yang terdiri dari 10 berita dari *Kompas.com*, 10 berita dari *Tempo.co*, dan 5 berita dari *CNN Indonesia*. Pemilihan media ini didasarkan pada posisi ketiganya sebagai media arus utama yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan framing di antara ketiga media tersebut. *Kompas.com* cenderung menyajikan berita secara deskriptif, kronologis, dan relatif netral dengan menekankan aspek prosedural serta alur kebijakan, sehingga menghadirkan kesan objektivitas dan keseimbangan informasi. Sementara itu, *Tempo.co* lebih menonjolkan pendekatan kritis dengan memberikan ruang yang lebih besar pada suara oposisi, analisis normatif, serta penekanan pada implikasi kebijakan terhadap demokrasi, lingkungan, dan independensi akademik. Di sisi lain, *CNN Indonesia* cenderung membingkai isu ini dengan menonjolkan aspek kontroversi dan konflik antaraktor, sehingga memperkuat dimensi polemik dalam pemberitaan. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media tidak bersifat netral sepenuhnya, melainkan memiliki kecenderungan perspektif masing-masing dalam mengonstruksi realitas sosial, khususnya dalam isu kebijakan publik yang kompleks seperti pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi.

Kata kunci: framing media, WIUP, Minerba, media online, *Kompas.com*, *Tempo.co*, *CNN Indonesia*

ABSTRACT

Zaky, M. 2231070 (2026). The Construction of Reality of Mining Permit Policies in the University Context in Online Media Coverage (A Framing Analysis of Kompas.com, Tempo.co, and CNN Indonesia Websites). Communication Science Study Program, Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Islam Indonesia.

This study is motivated by the increasing intensity of public debate surrounding the proposed granting of Mining Business Permit Areas (WIUP) to universities within the context of the revision of the Mineral and Coal Law (UU Minerba). This discourse has generated diverse responses from state actors, academics, and civil society, making it a strategic issue that extends beyond economic policy into ethical, environmental, and higher education independence concerns. In this context, mass media play a crucial role in shaping social reality through the way they frame information for the public. Therefore, this study aims to analyze how online media outlets *Kompas.com*, *Tempo.co*, and *CNN Indonesia* frame the issue of granting mining permits to universities. This research employs a qualitative approach using the framing analysis model developed by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which focuses on four structural dimensions: syntactic, script, thematic, and rhetorical structures. Through this approach, the study seeks to examine how news texts are constructed, how narratives are organized, what themes are emphasized, and how language choices are used to reinforce particular meanings. The period of analysis covers news published between January 20, 2025, and February 22, 2025, with a total of 25 news articles consisting of 10 from *Kompas.com*, 10 from *Tempo.co*, and 5 from *CNN Indonesia*. These media outlets were selected due to their status as major mainstream platforms with significant influence in shaping public opinion in Indonesia. The findings reveal distinct framing tendencies among the three media outlets. *Kompas.com* tends to present news in a descriptive, chronological, and relatively neutral manner, emphasizing procedural aspects and policy processes, thereby conveying an impression of objectivity and balance. In contrast, *Tempo.co* adopts a more critical approach by giving greater space to opposing voices, normative analysis, and highlighting the implications of the policy for democracy, the environment, and academic independence. Meanwhile, *CNN Indonesia* tends to frame the issue by emphasizing controversy and conflict among actors, thereby reinforcing the polemical dimension of the coverage. These differences in framing demonstrate that media are not entirely neutral; rather, each outlet carries its own perspective in constructing social reality, particularly in complex public policy issues such as the granting of mining permits to universities.

Keywords: media framing, WIUP, minerba, online media, *Kompas.com*, *Tempo.co*, *CNN Indonesia*

A. LATAR BELAKANG

Tambang adalah salah satu isu dalam pembahasan konflik agraria. Isu ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan segala hal yang menyangkut kekuasaan (Shohibuddin & Endriatmo, 2023). Terjadinya konflik agraria seringkali diakibatkan oleh tidak diadopsinya kebiasaan atau praktik sehari-hari dalam sebuah masyarakat, yang sudah tertanam turun-temurun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan 2.741 lokasi penambangan ilegal. Jawa Timur 649 titik, Sumatera Selatan 562 titik, Jawa Barat 300 titik, Jambi 178 titik, Nusa Tenggara Timur 159 titik, Banten 148 titik, Kalimantan Barat 84 titik, dan Kalimantan Timur 168 titik. Terdapat 2.741 lokasi penambangan ilegal (PETI). Potensi kerugian negara akibat penambangan ilegal diproyeksikan mencapai Rp 3,5 triliun yang berdampak pada 3,7 juta jiwa (BPK RI, 2022).

Persoalan tambang ini sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tentang pengaturan dan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam. Pasal ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam (mencakup bumi, air, kekayaan alam) dikuasai oleh negara dan digunakan untuk manfaat yang sebesar-besarnya ke rakyat (Nugroho, Imamulhadi, Nugroho, & Nurlinda, 2018). Hal ini menegaskan bahwa sektor tambang harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, masih banyak tambang yang merugikan masyarakat terutama dalam aspek ekologis. Salah satu kasusnya adalah tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam segi administratif, penambang emas di Kuantan Singingi tidak memiliki izin dari pemerintah. Dalam segi ekologis, penambangan ini menyebabkan dampak lingkungan yaitu perusakan tanah yang menyebabkan rusaknya tekstur tanah dan bahan organik (Henrianto, Deno Okalia, & Mashadi, 2019).

Pada Kamis, 23 Januari 2025, badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi diusulkan sebagai salah satu pihak yang dapat memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Usulan ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang telah disahkan sebagai inisiatif dari DPR RI. Munculnya rencana ini mendapat berbagai respon yang berbeda-beda dari berbagai universitas di Indonesia.

Secara rinci, UU Minerba tentang WIUP di perguruan tinggi tertulis dalam

draf revisi pasal 51A. Pasal ini berbunyi menjadi tiga poin. Pertama, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Prioritas diberikan kepada pemberian WIUP untuk mineral logam berdasarkan pertimbangan seperti bidang studi, akreditasi perguruan tinggi dengan status minimal B, dan akses pendidikan publik. Ketiga, peraturan pemerintah dapat mencakup langkah-langkah tambahan yang mengatur prioritas pemberian WIUP untuk mineral logam kepada perguruan tinggi.

Persoalan ini serupa dengan PP nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menawarkan Izin Usaha Tambang (IUP) untuk lembaga agama. Peraturan ini juga menimbulkan perdebatan, karena dikhawatirkan memiliki potensi penyalagunaan hak dalam memperluas keuntungan pribadi dan kelompok. Serta timbul akibat kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial (Putri, Tasya, & Prastika, 2024). Kondisi pemberian izin tambang kepada selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berkemungkinan membuka kesempatan untuk kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan sebuah kelompok (Umam, 2021).

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hubungan pemerintah dan perguruan tinggi. Maka, hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan bentuk kemitraan strategis yang saling mendukung. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, serta menetapkan arah kebijakan, sedangkan perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, penelitian, dan penghasil sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Diana & Hakim, 2020).

Oleh karena isu pemberian izin tambang pada perguruan tinggi menjadi pembicaraan hangat. Juga timbul pertanyaan apakah usulan pemberian tambang ini akan menjadi kondisi yang ideal bagi kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Maka, isu ini dibahas oleh banyak media. Pemberitaan oleh media, menjadi salah satu corong utama dalam membentuk realitas di kehidupan. Hal ini dikarenakan, media menjadi sumber informasi yang dianggap kredibel dalam membahas suatu isu. Namun, dalam penulisannya, akan ada perbedaan realitas yang ditampilkan oleh media satu dan media lainnya.

Konstruksi realitas oleh media massa sudah menjadi perhatian Ilmu Komunikasi sejak beberapa waktu lalu (Muktiyo, 2016). Menurut pandangan Peter

D. Moss (1999), media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi kultural ketika berwacana. Proses ini dilakukan melalui cara membingkai sebuah fakta dari sudut pandang tertentu hingga menjadi sebuah produk informasi. Konstruksi kultural tersebut merupakan rangkaian proses pembentukan realitas yang ditangkap, diolah, dan disebarluaskan oleh media melalui pemilihan makna dan penggunaan bahasa secara politis.

Dengan berbagai macam instrumen yang dimiliki media massa, mereka dapat membentuk realitas yang tersaji dalam bentuk sebuah berita (Wibowo, 2019). Konstruksi realitas pada prinsipnya adalah menceritakan, mengonseptualisasikan peristiwa, keadaan, dan benda (Karman, 2012). Menurut Wibowo, dengan demikian media massa dapat memilih peristiwa mana yang layak untuk dipublikasi. Karman memiliki pendapat yang serupa, bahwa dikarenakan terlalu banyak realitas di dunia nyata, maka media harus melewati proses penyaringan tentang realitas mana yang harus ditampilkan. Pun dengan ini, media massa dapat memasukkan agenda yang mereka inginkan. Serta memilih pendapat tokoh yang sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya.

Media massa seringkali menjadi alat komunikasi politik oleh penguasa (Hamad, 2004). Oleh karena itu, berita-berita di media sangat sarat akan kepentingan. Hal ini dikarenakan media massa dapat mempengaruhi pendapat publik. Media juga dapat menyisipkan agenda-agenda untuk berusaha menciptakan realitas di masyarakat. Dengan ini, konstruksi realitas yang diciptakan oleh media dapat menutupi bagaimana realitas yang sebenarnya terjadi langsung dalam sebuah isu atau peristiwa.

Dengan penjelasan tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui realitas apa yang ingin dibangun oleh media Kompas, Tempo, dan CNN. Tiga media tersebut dapat dikatakan sebagai media raksasa di Indonesia dan menjadi media yang tidak asing di masyarakat. Oleh karena itu, tiga media tersebut dapat membangun realitas tertentu di masyarakat.

Kompas.com pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 sebagai Kompas Online dengan domain yang menampilkan replika Harian KOMPAS (*kompasgramedia.com*, *t.thn.*). Pada 1996 alamat domain berganti menjadi , dan pada 1998 berkembang sebagai unit bisnis di bawah PT. Kompas Cyber Media (KCM), hingga akhirnya rebranding menjadi *Kompas.com* pada 2008 hingga kini. Mulai 2017 *Kompas.com* menghadirkan jargon “Jernih Melihat

Dunia” untuk menyampaikan bahwa *Kompas.com* adalah portal berita yang mampu mengajak pembacanya memiliki pandangan lebih jernih dalam mencerna isi berita, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan harapan.

Tempo merupakan media yang dikenal karena keberaniannya dalam jurnalisme investigatif (Ramhadhani, et al., 2025). Didirikan pada 1971, Tempo menyasar kalangan intelektual dan pembaca yang kritis terhadap isu politik dan sosial. Gaya bahasanya tajam dan analitis, dengan kecenderungan kritis terhadap kekuasaan. Tempo sering menyajikan berita secara mendalam, terutama mengenai kasus korupsi atau pelanggaran kekuasaan, sehingga menjadi alternatif penting dari media arus utama.

CNN Indonesia adalah media multiplatform yang hadir sejak 2015 sebagai hasil kerja sama antara Trans Media dan CNN internasional (Fatwa, Heryanto, Rifa, Wahyudi, & Rahman, 2025). Menargetkan generasi muda dan profesional urban, *CNN Indonesia* menyajikan informasi dengan cepat, singkat, dan visual yang kuat. Gaya pemberitaannya langsung ke inti persoalan, fokus pada kecepatan dan aktualitas, serta mengusung pendekatan netral meskipun tetap berada di bawah kepemilikan konglomerasi media.

Diambilnya tiga media tersebut sebagai objek penelitian adalah karena ketiga media ini adalah media-media besar di Indonesia. Terlebih, ketiga media ini juga menjadi pilar informasi di Indonesia. Maka dari itu, meneliti ketiga media ini dapat menjawab apakah media mainstream mempunyai perbedaan dalam segi penulisan.

B. RUMUSAN MASALAH

Ketika isu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk ke dalam ranah perguruan tinggi, banyak media yang memberitakan tentang hal ini. Isu ini menjadi hangat karena dianggap isu pengelolaan tambang tidak relevan dengan perguruan tinggi, terutama yang tidak mempunyai program studi pertambangan. Beberapa media yang memberitakannya antara lain adalah *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian adalah bagaimana *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia* membingkai berita tentang isu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di perguruan tinggi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berfokus untuk menjawab bagaimana *Kompas.com*,

Tempo.co, dan *CNN Indonesia* dalam membingkai pemberitaan terkait wacana pemberian Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) kepada perguruan tinggi. Serta berusaha mencari tahu apakah ketiga media tersebut mempunyai wacana tersembunyi di dalam pemberitaannya. Dua hal tersebut akan dianalisis melalui metode analisis *framing*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan bacaan tambahan bagi penelitian di ilmu komunikasi, terutama jurnalistik. Terutama dalam kajian yang menggunakan analisis *framing* sebagai alat untuk meneliti teks yang ada di dalam sebuah pemberitaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dialamatkan untuk tiga pihak:

- A. Untuk lembaga pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengkritisi peran mereka saat diberikan kewenangan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- B. Untuk media, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber evaluasi dalam memberitakan sebuah isu.
- C. Untuk studi komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan dalam bidang jurnalistik, terutama dalam pembahasan analisis *framing* pada sebuah pemberitaan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama berjudul **Bingkai Media Terhadap Kontroversi Isu Pertambangan di Indonesia pada Film *Sexy Killers*** yang ditulis oleh Adinda Hariyanti (2020) pada Skripsi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Studi Public Relations. Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pada film “*Sexy Killers*” terdapat pembingkai pesan yang menegaskan bahwa batubara bukanlah sumber daya yang ramah lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui penggambaran dampak ekologis yang signifikan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, serta degradasi lahan

akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, film ini juga menyoroti konsekuensi sosial yang dialami masyarakat di sekitar wilayah tambang, termasuk gangguan kesehatan dan hilangnya mata pencaharian. Dengan demikian, pembingkai yang dibangun secara konsisten mengarahkan penonton pada kesimpulan bahwa penggunaan batubara memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif dan menggunakan metode analisis *framing*. Model *framing* yang digunakan adalah perspektif *framing* dari Robert N. Entman. Perbedaan penelitian terdapat pada objek yang diteliti. Penelitian oleh Adinda, menjadikan film dokumenter sebagai subjek penelitian. Namun, penelitian ini menjadikan teks berita media online sebagai subjek penelitian. Persamaan penelitian adalah pada topik yang dibahas, yaitu isu kontroversi dari pertambangan.

Penelitian kedua berjudul **Analisis *Framing* Berita Aksi Koalisi Desak Pencabutan Izin Tambang Batu Bara PT. Inmas pada Media Online di AntaraNews dan BengkuluToday.com Edisi 25 Oktober 2021**. Ditulis oleh Elpa Maindri (2021) dalam Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hasil dari Skripsi ini menunjukkan bahwa dalam media AntaraNews, ditemukan beberapa fakta konkret yang mana di dalam tulisannya terdapat pemikiran bahwa tidak sedikit manusia yang masih memperdulikan kelestarian alam, dampak buruk akibat keserakahan manusia serta suara rakyat yang tidak pernah sampai kepada pemerintah. Sedangkan media BengkuluToday.com, berfokus kepada isu politik. Hal ini ditunjukkan dalam salah satu kalimat pada penulisan awal berita, yaitu “Koalisi Selamatkan Bentang Alam Seblat yang beranggotakan 64 lembaga hari ini 25 Oktober 2021 melakukan aksi dengan tujuan meminta menteri LHK untuk tidak menggubris permintaan PT Inmas Abadi untuk menyusul dokumen andal.” Kalimat “meminta” di sini bisa dikatakan cukup netral. Dan mengisyaratkan bahwa *BengkuluToday.com* bahwa sampai detik ini penggiat lingkungan, masyarakat, serta mahasiswa masih terus berjuang untuk menegakkan keadilan terkait isu lingkungan. Metode penelitian ini adalah analisis *framing* Muray Edelman. Perbedaan penelitian adalah pada media yang dijadikan subjek penelitian, Elpa Maindri mengambil AntaraNews dan BengkuluToday.com. Sedangkan penelitian saya, mengambil Kompas, Tempo, dan CNN. Terdapat juga perbedaan pada relasi yang dibahas, yaitu koalisi dengan perusahaan tambang dan

perguruan tinggi dengan pemerintah. Persamaan penelitian terdapat pada analisis *framing* pemberitaan pertambangan di media.

Penelitian ketiga berjudul **Analisis Pemberitaan Tambang dan Lingkungan di Media Massa: Studi Kasus KabarBaru.co**. Ditulis oleh Adam Haidar (2024) dalam Skripsi Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa data yang disajikan oleh para aktivis lingkungan diperkuat oleh Kabarbaru.co. Selain memberitakan tentang bencana dan konsekuensinya, Kabarbaru.co juga melakukan advokasi melalui tulisan dengan mengajak orang-orang untuk menggunakan hak mereka untuk menggugat pemerintah jika ada penyalahgunaan kebijakan lingkungan. Secara detail, hasil penelitian di salah satu berita berjudul “Kontrak Habis, DPP GAMKI Minta Konsesi Lahan Tambang PT VI Dikembalikan ke Negara” akan lebih mudah jika dijelaskan melalui metode *framing* Robert N. Entman sebagai berikut. *Define Problems*: Perjanjian awal antara Vale dimulai pada tahun 1968. Oleh karena itu, selama lebih dari 55 tahun, Vale telah melakukan kegiatan penambangan nikel di Indonesia. Namun, kepemilikan yang sepenuhnya dimiliki oleh Indonesia hanya mencapai 20%, yang dikuasai oleh Holding BUMN Tambang MIND ID.. *Diagnose Causes*: Pengalihan kepemilikan saham tambahan sebesar 11% oleh MIND ID dalam Vale harus dipertimbangkan ulang oleh kami, DPP GAMKI, dengan tujuan agar wilayah konsesi pertambangan yang dikelola oleh Vale dapat dikembalikan kepada negara. Kami percaya bahwa tindakan ini tidak akan memberikan manfaat yang signifikan baik bagi MIND ID maupun Indonesia secara keseluruhan. *Make Moral Judgement*: Setelah itu, barang tersebut langsung diekspor ke negara tujuan untuk dijadikan bahan baku industri, sehingga memberikan keuntungan besar bagi negara tersebut. *Treatment Recommendation*: Maka dari itu alih-alih diperpanjang, Kami DPP GAMKI mendorong agar Lebih baik jika hak pengelolaan lahan tambang yang dimiliki oleh PT Vale Indonesia diserahkan kembali kepada negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, Adam Haidar menggunakan model Robert N. Entman dan saya menggunakan model Zhongdang Pan. Perbedaan juga terdapat pada pemilihan media, yaitu KabarBaru.co dengan Kompas, Tempo, dan CNN.

Penelitian keempat berjudul **Konstruksi Realitas Media Online Mengenai**

Kekerasan Aparat Kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah karya (Romadlan & Fauziah, 2022) dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Program Studi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka, volume 26 nomor 1. Peristiwa 8 Februari 2022 menjadi alasan penelitian ini. Yang mana pada hari itu, sebanyak lebih dari ratusan aparat bersenjata mengepung dan menyerang Desa Wadas. Di sana, aparat melaksanakan penurunan spanduk terkait penolakan tambang dari masyarakat. Tidak hanya itu, aparat juga melakukan pengejaran dan penangkapan pada sejumlah warga. Kedatangan aparat ini bertujuan untuk pengamanan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Peristiwa ini menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali media online. Dalam penelitian ini mengambil media *Kompas.com* dan *Cnnindonesia.com*. Dalam membungkus narasi, *Kompas.com* cenderung netral, dalam artian tidak membebankan kesalahan pada satu pihak. Berbeda dengan *Cnnindonesia.com*, mereka cenderung keras dalam membungkus narasi peristiwa ini. Dibuktikan dengan headline kata “tangkap” dan “kepung”. Penelitian ini berusaha mengungkap realitas yang berusaha dibangun kedua media tersebut. Menggunakan model Robert N. Entman, *framing* oleh *Kompas.com* sebagai berikut. *Define Problems*: *Kompas.com* mendefinisikan peristiwa kekerasan aparat kepolisian di Wadas sebagai akses pengerahan aparat kepolisian untuk pengamanan pengukuran lahan milik warga Desa Wadas. *Diagnose Cause*: Berkaitan dengan kekuatan-kekauatan masalah, *Kompas.com* cenderung mengidentifikasi warga Desa Wadas sebagai penyebab masalah. *Make Moral Judgement*: Dalam pandangan *Kompas.com*, warga Desa Wadas dipandang sebagai penyebab masalah karena mereka menolak dengan keras pembahasan lahan mereka untuk penambangan andesin dengan memasang spanduk penolakan. *Suggest Remedies and Justify Treatments*: Dialog, menurut *Kompas.com* dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Sedangkan *cnnindonesia.com* adalah sebagai berikut. *Define Problems*: *Cnnindonesia.com* menganggap bahwa kejadian anarkis aparat sebagai tindakan yang refresif. *Diagnose Cause*: Menyebut bahwa kepolisian adalah sumber masalah utama dalam kasus ini. *Make Moral Judgement*: Kepolisian sebagai sumber masalah, disebabkan oleh perlakuan anarkis mereka (pengepungan, pengejaran, penangkapan, dan kekerasan). *Suggest Remedies and Justify Treatments*: menekan pemerintah untuk mengutus jelas kasus ini dan memberi hukuman bagi pelaku anarkis. Kesimpulannya, Penelitian ini menegaskan bahwa kepentingan organisasi

seperti struktur internal, kekuasaan, dan ekonomi memengaruhi *framing* media, sehingga konstruksi realitas berbeda. *Kompas.com* menggambarkan kekerasan aparat bertujuan untuk pengamanan pengukuran tanah, sementara *cnnindonesia.com* menggambarkannya sebagai represi aparat terhadap warga. Perbedaan ini menunjukkan tujuan dan cara masing-masing organisasi media diatur. Dengan memilih masalah dan menggunakan clickbait, *framing* membentuk perspektif audiens. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian adalah berusaha untuk mendefinisikan realitas yang ditampilkan media *kompas* dan CNN. Perbedaannya adalah pada metode penelitian dan topik yang dibahas.

Penelitian kelima berjudul **Analisis Bingkai Berita Tambang Ilegal di Kalimantan Timur oleh Kaltimkece.id**. Ditulis oleh Widia Novi Ramadianti dan Nurliah dalam Jurnal Media Akademik, volume 2 nomor 1 Januari 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaltimkece.id memilih isu dan menonjolkan realitas dalam pemberitaan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana Kaltimkece.id berpartisipasi dalam memberitakan isu tersebut. Berikut hasil analisis dalam berita “Menelusuri Batu Bara yang Terseret Banjir Hingga ke Pemukiman Warga di Muang Dalam, Samarinda”. *Define Problems*: Dalam pemberitaan ini yang menjadi pendefinisian masalah oleh Kaltimkece.id dapat dilihat pada lead berita. Kaltimkece.id menjelaskan bagaimana terjadi kondisi banjir yang tidak biasa yang dialami oleh warga Muang Dalam yaitu ikut terbawanya sisa-sisa batu bara ke permukiman dan perkebunan warga. Hal ini diperkuat dengan ditambahkannya kronologi dan pernyataan bagaimana peristiwa ini terjadi oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) di Muang Dalam. *Diagnose Causes*: Penyebab masalah yang diperkirakan Kaltimkece.id adalah kegiatan pertambangan dan penumpukkan batu bara di belakang permukiman warga Muang Dalam. Kaltimkece.id memasukan keterangan warga yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat ilegal atau dikenal warga sebagai kegiatan yang bersifat koridor. Kaltimkece.id juga menjelaskan hasil temuan yang didasari atas pernyataan dari salah satu warga Muang Dalam mengenai aktivitas pertambangan batu bara ini. Setelah melakukan pencarian fakta dilapangan, Kaltimkece.id menemukan adanya kegiatan pertambangan batu bara yang berlokasi di dekat permukiman warga. *Make Moral Judgement*: Pada tahap pembuatan pilihan moral, Kaltimkece.id memasukkan pernyataan salah

satu warga Muang Dalam yaitu Ketua RT 33 Muang Dalam, mengenai kegiatan pertambangan didekat permukiman warga yang tidak memiliki izin dan tanpa pemberitahuan kepada warga sekitar atau dapat disebut ilegal. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan ditambahkannya keterangan dari Lurah Lempake yang menjelaskan bahwa terdapat empat titik pertambangan batu bara di Muang Dalam. Kaltimkece.id juga menuliskan bahwa pihak Kelurahan Lempake telah membuat laporan secara berulang mengenai kegiatan pertambangan yang diduga ilegal ini, namun kegiatan pertambangan ini tetap dilanjutkan. *Treatment Recommendation:* Dalam pemberitaan ini ditemukan bahwa kegiatan pertambangan yang diduga ilegal tersebut masuk ke dalam konsesi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), berdasarkan hal tersebut Kaltimkece.id memasukkan pernyataan dari Dinamisor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur bahwa seharusnya perusahaan melaporkan adanya kegiatan pertambangan ilegal kepada aparat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* model Robert N. Entman yang kemudian dibelah kembali menggunakan teori konstruksi sosial media massa Burhan Bungin. Perbedaan penelitian adalah pada media yang diambil, serta ada sedikit perbedaan dalam isu yang diangkat. Walaupun sama-sama membahas tentang pertambangan, penelitian Ramadanti dan Nurliah ini berfokus pada tambang ilegal yang diberitakan media. Sedangkan penelitian saya, berfokus tentang bagaimana media membingkai berita terkait izin tambang dari pemerintah kepada perguruan tinggi. Persamaan penelitian adalah menjadikan analisis *framing* sebagai metode.

2. Kerangka Teori

A. Konstruksi Realitas Media

Teori konstruksi sosial adalah teori yang berargumen bahwa relitas sosial, termasuk pengetahuan dan makna, bukan merupakan sesuatu yang tercipta secara alami, namun hasil terbentuk dari konstruksi sosial oleh manusia melalui interaksi dan komunikasi. Teori ini menekankan bahwa makna dan pengertian tentang dunia sosial kita tidak tetap dan universal, melainkan berubah dan bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya.

Konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses yang dilalui manusia untuk terus-menerus memahami realitas bersama. Peter Berger dan Thomas Luckmann mengemukakan gagasan tentang konstruksi realitas. Gagasan

ini berasal dari tradisi Fenomenologi Husserl, yang mengkritik pemikiran positivistik sebagai sesuatu yang tidak dapat diandalkan karena hanya menggunakan fakta-fakta yang dapat diamati untuk menganalisis realitas sosial. tidak menyampaikan kebenaran yang sebenarnya karena hanya bergantung pada fakta-fakta yang dapat diamati untuk melihat realitas sosial (Dharma, 2018).

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (dalam Universitas Bina Darma, 2018), dua penulis utama teori konstruksi sosial, berpendapat bahwa proses dialektika antara individu dan masyarakat membentuk realitas sosial. Individu bukan hanya korban dari realitas sosial, tetapi juga sebagai aktor kreatif yang membuat dan mereplikasi dunia sosialnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tiga tahap utama membentuk realitas sosial: eksternalisasi (proses menciptakan realitas), objektivasi (proses menjadi sesuatu yang tampak objektif), dan internalisasi (proses diterima dan dihayati oleh individu oleh realitas tersebut).

Beberapa asumsi dapat disimpulkan dari teori dasar Konstruksi Sosial. Pertama, kekuatan konstruksi sosial yang diciptakan manusia terhadap dunia di sekitarnya adalah hasil dari kreativitas manusia. Kedua, hubungan antara ide dan lingkungan sosial di mana ia muncul, berkembang, dan dilembagakan. Ketiga, kehidupan masyarakat secara konsisten dibentuk. Keempat, pengetahuan dan kenyataan berbeda. Realitas adalah keberadaan yang tidak bergantung pada keinginan sendiri, dan pengetahuan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar.

Sebelum sebuah realitas terbentuk, terdapat tiga stimulus yang berlangsung (Universitas Bina Darma, 2018). Pertama, *objective reality*, adalah suatu kompleksitas dalam mendefinisikan realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta kebiasaan dan tingkah laku yang telah terpola dengan matang, yang mana semua ini sudah dijiwai secara umum oleh individu sebagai sebuah fakta. Kedua, *symbolic reality*, adalah sebuah ekspresi simbolis yang dijiwai pada *objective reality* seperti produk teks berita di media. Ketiga, *subjective reality*, konstruksi realitas individu yang melalui proses internalisasi. Realitas subjektif individu yang berkumpul, akan memasuki proses eksternalisasi. Dan melalui proses eksternalisasi akan berpotensi menimbulkan suatu konstruksi realitas objektif yang baru.

Dalam kehidupan sehari-hari, realitas kehadiran media berlingkup pada aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, psikologi bahkan kebudayaan. Oleh karena itu, kehadiran media dalam dimensi realitas manusia tidak dapat dipisahkan. Media

massa, dalam perkembangan manusia, menjadi sebuah proses komunikasi yang memiliki dampak yang cukup besar (Kamaruddin, 2016). Hal ini dikarenakan media massa mempunyai peranan vital dalam dinamika kehidupan manusia, terutama dalam ranah informasi. Dalam informasi tersebut, sebuah media seringkali menggunakan agenda setting di dalamnya. Ini digunakan untuk menstimulus masyarakat dengan informasi yang mereka inginkan.

Dalam proses pembuatan sebuah berita, melalui banyak tahap sebelum bisa dipublikasikan. Sebuah berita diambil dari isu atau peristiwa, yang tentu di dalamnya terdapat pengalaman oleh seseorang. Pengalaman ini diambil oleh media dan diceritakan kembali dalam bentuk cerita, inilah yang disebut dengan realitas. Sepatutnya, realitas adalah hal yang harus objektif. Namun, pada prakteknya media seringkali hanya mengambil pengalaman yang sesuai dengan agenda mereka. Hal ini menggugurkan nilai independensi dan netralitas media. Dan dengan hilangnya nilai tersebut, serta berita yang sarat agenda setting terus menerus dipublikasikan, menyebabkan realitas yang tersebar di masyarakat adalah realita palsu.

Menurut Eriyanto (2002), kabar yang diungkapkan oleh media adalah hasil konstruksi realitas yang melibatkan ideologi dari pandangan wartawan serta media. Wartawan dan media massa bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai aktor dalam menciptakan realitas. Media telah melewati lima tahap seleksi, menurut Andrew Hart (dalam Aprianti, 2014). Pertama, media tidak hanya merefleksikan atau meniru realitas. Kedua, di proses konstruksi dan penyampaian sebuah *message* yang kompleks, terjadi seleksi, tekanan, dan perluasan makna. Ketiga, audiens tidak pasif dan tidak dapat diprediksi, mereka aktif dan berubah-ubah. Keempat, bukan hanya produser dan editor yang menentukan pesan. Namun, pemerintah memanfaatkan media yang kaya sebagai pengiklan. Kelima, perbedaan dalam teknologi, bahasa, dan kapasitass memengaruhi keanekaragaman kondisi media.

Menurut Fishman (dalam Eriyanto, 2002), terdapat dua kecenderungan tentang produksi media dapat dinilai. Pertama, pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Selama proses ini, berita akan dipilih. Wartawan di lapangan memilih peristiwa mana yang harus dimuat dalam berita dan mana yang tidak. Setelahnya, berita masuk ke tahap redaktur, di mana informasi dipilih kembali dan melalui proses penyuntingan terkait bagian yang harus ditambahkan dan

dikurangi. Pada saat ini, perspektif yang diberikan tampak seperti benar-benar ada di luar diri wartawan. Wartawan memilih perspektif itu untuk dilaporkan. Kedua, pembentukan berita (*creation of news*). Peristiwa akan terjadi selama proses ini. Dengan memilih apa yang dianggap sebagai berita, wartawan akan membentuk peristiwa. Wartawan saat meliput peristiwa tidak lagi memilih tetapi menciptakan sendiri. Mereka akan melakukan proses wawancara dengan narasumber dan menentukan *angle* berita yang akan diangkat. Berita tidak berasal dari fakta langsung, tetapi dari pengetahuan dan pemikiran orang.

B. Peran Media sebagai Pengawasan Isu Lingkungan Hidup

Media mempunyai 3 peran, yaitu informasi, edukasi, dan pengawasan (Sekar, 2025). Media massa berperan menyampaikan informasi mengenai berbagai peristiwa, kebijakan, maupun isu yang terjadi di masyarakat. Melalui fungsi ini, media membantu masyarakat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Media berfungsi sebagai sarana pendidikan dengan memberikan pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan. Fungsi ini tidak hanya dilakukan melalui konten pendidikan formal, tetapi juga melalui berita, artikel, dokumenter, dan program informatif lainnya. Media menjalankan peran sebagai pengawas sosial (*watchdog*) dengan memantau tindakan pemerintah, lembaga publik, maupun pihak lain yang memiliki kekuasaan. Melalui pemberitaan yang kritis, media mendorong transparansi, akuntabilitas, serta mengungkap penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Rujukan yang dapat digunakan

Isu lingkungan adalah pembahasan yang terus bermunculan setiap harinya di media massa. Hal ini dikarenakan isu lingkungan dapat merambat ke isu-isu yang lain seperti kemanusiaan, sosial, eridan politik (Herutomo & Istiyanto, 2021). Permasalahan lingkungan hidup bisa dipicu oleh dua hal. Pertama, memang langsung dari alam. Kedua, atas campur tangan manusia. Perihal kedua inilah yang menjadi permasalahan penting yang harus dibahas. Robert Cox (dalam Herutomo & Istiyanto, 2021) merumuskan bahwa komunikasi lingkungan berfungsi sebagai media pragmatis dan konstitutif untuk menyalurkan pemahaman antara lingkungan dan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pemahaman masyarakat akan mengikuti tulisan yang ada di media.

Dalam konteks studi komunikasi, pembahasan tentang isu lingkungan

mencakup tiga area (Herutomo & Istiyanto, 2021). Pertama, retorika dan wacana lingkungan. Ini adalah lingkup yang lebar dalam komunikasi, karena mencakup gaya retorika aktivis lingkungan, karya tentang masalah lingkungan, kampanye kehumasan bisnis, dan website. Kedua, media dan jurnalisme lingkungan. Ini adalah lingkup yang fokus studinya adalah tentang bagaimana pemberitaan, iklan, program komersil, serta internet dalam menggambarkan tentang masalah lingkungan. Oleh karena berfokus kepada media, tentunya ini berkaitan dengan agenda setting dan *framing* media. Ketiga, partisipasi publik. Area ini menegaskan bahwa publik berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai isu lingkungan.

Dalam komunikasi lingkungan, ada sepuluh strategi yang bisa digunakan (Wahyudin, 2017). Pertama, menganalisis situasi dan mengidentifikasi masalah. Kedua, menganalisis individu atau kelompok dalam komunikasi. Ketiga, menyampaikan komunikasi secara objektif untuk meningkatkan pengetahuan dan memengaruhi perilaku. Keempat, mengembangkan strategi komunikasi berdasarkan data. Kelima, memberi dorongan dan arahan kepada masyarakat. Keenam, memilih media yang sesuai. Ketujuh, menyiapkan pesan untuk komunikasi. Kedelapan, melakukan produksi media dan uji coba. Kesembilan, menyebarkan informasi melalui media dan melaksanakannya. Kesepuluh, melakukan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi.

Jika sebuah media massa menggunakan strategi di atas dalam membuat pemberitaan tentang isu lingkungan, maka produk berita yang dihasilkan dapat dipercaya. Pertanyaannya adalah, apakah media massa sudah menggunakan strategi itu dalam membuat berita tentang isu lingkungan. Seperti yang kita ketahui, media massa sangat sarat dengan kepentingan segelintir kelompok, terutama pemilik modal dan politisi. Tak jarang sebuah produk media harus menyesuaikan dengan ideologi yang dimiliki oleh pemilik modal. Jika hal ini terjadi, maka jurnalistik berkemungkinan tidak lagi berpihak kepada masyarakat.

Herutomo dan Istiyanto, dalam jurnal yang berjudul Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan, menjelaskan bahwa pemberitaan media massa menjadi aspek penting dalam usaha untuk mengkritik pemerintah dalam isu-isu lingkungan. Pers atau media massa, dalam isu lingkungan, memiliki fungsi sebagai bagian dari *Civil Society*. Media massa juga berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Substansi atas hal ini sangat jelas tertuang di dalam UU No.

40 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan ini, pers menjadi hal vital dalam perannya untuk membagikan informasi kepada khalayak, dalam hal ini adalah isu lingkungan. Isu yang akan dilahap oleh masyarakat, adalah isu yang ada di berita sebuah media. Oleh karena itu, penting sekali bagi media agar berpihak kepada masyarakat.

Media massa memainkan peran penting dalam publikasi dan kampanye isu lingkungan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengedukasi masyarakat tentang masalah lingkungan, membentuk pendapat publik, dan mendorong perubahan perilaku dan budaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup (Sulistiani, Syarifuddin, & Rumangkit, 2023). Media massa, baik secara langsung maupun secara online, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Namun, masalah yang dihadapi adalah masalah lingkungan seringkali tidak menjadi topik utama pemberitaan, yang mengakibatkan sedikit pemberitaan di berbagai media.

Selain itu peran penting lain media massa adalah untuk mendidik masyarakat. Dalam konteks isu lingkungan, kehadiran media massa harus sejalan dengan perannya yaitu mendidik masyarakat supaya mempunyai wawasan yang lebih baik. Untuk menuju pemahaman yang lebih baik, media harus bersikap objektif dan tidak ada kepentingan di belakangnya. Dengan ini, produk berita yang dihasilkan dapat menjadi bahan bacaan berkualitas dan meningkatkan pemahaman (Widirahayu, 2020). Media massa dapat berfungsi sebagai mediator dalam peristiwa bencana atau konflik lingkungan karena mereka dapat menengahi perselisihan dan menyebarkan berbagai ide dan aspirasi masyarakat. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mendorong sinergi antara individu, komunitas sosial, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

C. Analisis *Framing*

Pada awalnya, ide terkait fenomena *framing* ini diprakarsai oleh psikiatris bernama Batenos (1955). Bateson menyatakan bahwa istilah *frame* merujuk kepada sebuah persepsi seseorang dalam membantunya memahami dunia sekeliling yang kompleks (Butsi, 2019). Berlanjut dari ini, Erving Goffman membawa pemikiran Batenos menuju arah yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa konsep tentang *frame* adalah sesuatu yang dipelajari dan digunakan manusia dalam kesehariannya, juga menjadi dasar bagi perilaku manusia itu sendiri. Dalam

konteks masyarakat, *frame* hadir untuk memandu seseorang dalam bersosialisasi dalam masyarakat. *Frame* yang berada di masyarakat bisa memberi sebuah rujukan tentang apa yang harus dirasakan, didengar dan dilihat dalam sebuah kelompok sosial.

Konsep *framing* menjelaskan bahwa dalam pemberitaan media, terdapat bingkai yang menentukan pandangan sekaligus membatasi pandangan (Rayhan & Putri, 2020). Sehingga, *framing* digunakan untuk membingkai secara khusus sebuah konteks atau isu dalam pemberitaan. Hal ini berfungsi agar pembaca berfokus kepada hal yang dibingkai.

Dalam sudut pandang komunikasi, analisis *framing* memiliki kegunaan untuk membedah langkah-langkah atau ideologi sebuah media pada saat mengkonstruksi sebuah fakta (Sinaga, 2016). Analisis *framing*, sederhananya dapat dijelaskan sebagai sebuah pisau analisa dalam upaya untuk mencari tahu kebenaran sebuah realitas. Realitas ini berada dalam lingkup peristiwa, aktor, dan kelompok. Dalam tahap ini, media dianggap sebagai ruang diskusi bagi publik secara luas. Hal ini dikarenakan media menjadi corong utama untuk mendapatkan akses informasi publik.

Frame dalam sebuah berita hadir dan terbagi dalam dua level (Mustika, 2017). Pertama, sebagai sebuah konsep yang berguna sebagai alat untuk memproses sebuah informasi yang datang dari teks berita. Kedua, sebagai sebuah perangkat spesifik dari sebuah narasi yang dibangun untuk menjelaskan atas sebuah isu. *Framing*, dalam praktiknya, digunakan media untuk menyeleksi sebuah isu tertentu, apakah isu itu diberitakan atau diabaikan. Juga digunakan sebagai alat untuk memfokuskan sebuah aspek suatu peristiwa dengan menggunakan strategi wacana yaitu menempatkannya di bagian yang mencolok, seperti di *headline*.

Eriyanto (2002), menjelaskan bahwa terdapat dua esensi utama dalam konsep *framing*. Pertama, tentang bagaimana sebuah peristiwa dimaknai. Hal ini berkaitan tentang bagian mana yang akan diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana sebuah fakta dituangkan dalam tulisan. Hal ini berkaitan erat dengan teks, yaitu pemilihan kata dan pemakaian sebuah gambar untuk memperkuat gagasan. Dua esensi ini adalah kacamata utama yang dapat digunakan ketika membaca atau melihat sebuah informasi publik yang ditayangkan oleh sebuah media. Ini juga dapat menjadi ukuran penilaian kepada media-media, apakah

mereka memberitakan fakta yang seharusnya, ataukah mereka menyisipkan agenda tersembunyi di dalamnya. Pan & Kosicki (1993) mengatakan bahwa *framing* dapat dipelajari sebagai sebuah strategi untuk memproses dan mengkonstruksi wacana itu sendiri. Proses *framing* sangat berhubungan dengan proses dan rutinitas profesional jurnalistik.

Pan dan Kosicki melihat analisis *framing* sebagai wacana publik tentang sebuah isu atau kebijakan yang dikonstruksikan dan dinegosiasiokan. Teks berita, di dalamnya terdapat berbagai susunan simbol dalam sebuah perangkat simbolik, yang menjadikan sebuah berita dapat melekat di memori masyarakat (Sinaga, 2016). Terdapat empat unsur dalam perangkat *framing* Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Pertama, Sintaksis. Kerangka kerja ini menjelaskan bagaimana seorang jurnalis membuat berita, insiden, pertanyaan, opini, kutipan, dan komentar tentang suatu topik menggunakan format narasi berita umum. Dalam bentuk Sintaksis ini, perangkat yang diperiksa difokuskan pada bagan berita. Secara khusus, lead, latar belakang, judul, kutipan, sumber, pernyataan, dan kesimpulan. Singkatnya, kerangka kerja ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seorang jurnalis mengkonstruksi sebuah fakta.

Kedua, Skrip. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana seorang jurnalis dapat menuangkan suatu isu dalam bentuk berita. Dalam struktur Skrip ini, perangkat yang dianalisis adalah kelengkapan sebuah berita. Mencakup 5W+1H (apa, kapan, siapa, dimana, kenapa, dan bagaimana). Singkatnya, pada struktur ini menganalisis apakah seorang wartawan memberikan informasi yang lengkap tentang sebuah peristiwa dalam berita yang ditulis.

Ketiga, Tematik. Struktur ini berkaitan dengan cara seorang jurnalis dalam menyusun fakta atau menuangkan pandangannya tentang suatu peristiwa ke dalam bentuk proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara utuh. Perangkat yang dianalisis adalah detail dari sebuah berita. Yaitu paragraf, proposisi, kalimat dan penghubung antar kalimat.

Keempat, Retoris. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana seorang wartawan menggaris bawahi arti tertentu dalam sebuah berita. Perangkat yang dianalisis adalah pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya untuk mendukung sebuah tulisan, namun juga terdapat penekanan sebuah makna kepada pembaca.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Paradigma

Dalam penelitian ini, penelitian yang akan digunakan adalah konstruktivisme. Alasan mengapa paradigma ini dipakai adalah karena di dalamnya berfokus secara spesifik dalam sebuah *scope* yang spesifik (Butsi, 2019). Paradigma ini berfokus kepada bagaimana bahasa dan simbol direproduksi antara sumber dan narasumber (Adi, Erlandia, & Venus, 2016). Butsi mengungkapkan bahwa pendekatan ini dapat dilihat dari metode penelitian yang menggunakan analisis *framing*. Pernyataan tersebut timbul atas jasa William Gamson yang konsisten mewacanakan analisis *framing*.

Konstruktivisme adalah suatu paham penelitian yang berusaha untuk melihat realita sosial yang dibangun atau dikonstruksi oleh pemaknaan dari sebuah masyarakat. Dalam paradigma ini, realitas dianggap sebuah hal relatif yang bergantung dari pengalaman subjek. Paradigma ini merupakan pandangan yang hampir menjadi antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau pengetahuan (Umanaiolo, 2019).

Paradigma konstruktivis melihat bahwa dalam mengetahui “dunia arti”, mereka harus mengintrepetasikannya sendiri. Paradigma ini juga mengharuskan penyelidikan dalam proses pembentukan arti yang muncul dalam bahasa atau aksi-aksi sosial para aktor (Denzin & Lincoln, 1994). Dengan pandangan konstruktivisme, membantu seseorang untuk memahami sebuah isu yang terjadi di sekitarnya (Solichin, 2017).

Paradigma konstruktivisme berusaha untuk melihat fenomena “realitas” sebagai produk dari penciptaan kognitif manusia (Hanitzsch, 2001). Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini. Karena paradigma konstruktivisme sangat meragukan kemampuan jurnalis untuk “mencerminkan” realitas murni di lapangan sesuai dengan aslinya (Hanitzsch, 2001). Hal ini dikarenakan berita yang disajikan seorang wartawan adalah salah satu versi dari realitas yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan

sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat (Kadewandana, 2008). Pada penelitian kualitatif, objek analisis adalah berupa makna dari gejala sosial dan budaya masyarakat bersangkutan untuk memperoleh kategorisasi tertentu (Bungin, 2006). Dalam mendapatkan data, pendekatan kualitatif akan menggunakan sarana wawancara, pengamatan, atau bisa dengan dokumen, naskah, dan buku (Strauss & Corbin, 2003).

Penelitian kualitatif merupakan metode yang berusaha fokus dan melibatkan interpretasi dan melaksanakan pendekatan alamiah terhadap materi subjek (Nurrisa, Hermina, & Norlaila, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan jumlah data yang luas dan beragam. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa studi kualitatif adalah studi di lingkungan alami yang menginterpretasi masyarakatnya. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri berikut: peneliti berada di posisi yang sama dengan subjek penelitian, mereka berinteraksi satu sama lain selama penelitian, memberikan analisis mendalam tentang peristiwa, fenomena, dan situasi, dan mengutamakan pengalaman peserta (Waruwu, 2023).

Dalam penelitian kualitatif mempunyai banyak jenis pendekatan, yang memungkinkan peneliti bisa memilih pendekatan mana yang sesuai dengan penelitiannya (Yusanto, 2020). Dalam studi kualitatif, analisis data harus dilakukan secara cermat agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis secara efektif, bahkan sampai menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi (Yulianty & Jufri, 2020). Penelitian kualitatif biasanya digunakan saat ada keperluan untuk mengeksplorasi masalah lebih menyeluruh dan mendalam. Hal ini menjadikan penelitian kualitatif sebagai usaha untuk memungkap sesuatu.

3. Metode

Secara etimologis, kata *framing* berasal dari bahasa Inggris yaitu pembingkai. Hal ini dimaksudkan adalah bagaimana sesuatu dibingkai dalam sebuah wadah. Dalam hal ini, media berita adalah salah satu yang paling akrab dengan *framing*. Karena dalam sebuah peristiwa yang akan diberitakan, media akan membingkai peristiwa tersebut (Mustika, 2017). Dalam media massa, *framing* adalah sebuah cara untuk menyampaikan isi berita dengan bercerita atas sebuah peristiwa (Sobur, 2009).

Secara lebih rinci, analisis *framing* melihat proses seleksi isu, pola penonjolan, dan cara penulisan berita yang digunakan media untuk mengarahkan

interpretasi publik sesuai perspektif tertentu. Ini berarti media tidak hanya menyajikan fakta secara apa adanya, tetapi membingkai fakta tersebut dengan cara tertentu sehingga menghasilkan konstruksi realitas yang bisa berbeda antara satu media dengan media lain (Sobur, 2009). Oleh karena itu, analisis *framing* adalah metode yang digunakan wartawan dalam menyeleksi isu dan menuliskannya dalam berita.

framing sederhananya dapat dijelaskan sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan untuk menyeleksi isi dan menulis berita (Lestar, 2017). *framing* juga bisa menjadi tolok ukur apakah media menyajikan fakta secara objektif atau memiliki agenda tersembunyi. Pan & Kosicki menambahkan bahwa *framing* dapat dipahami sebagai strategi dalam membentuk dan mengonstruksi wacana. Proses ini sangat erat kaitannya dengan rutinitas kerja jurnalistik profesional.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini kemudian diperkuat dengan penggunaan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, karena model ini mampu mengurai bagaimana media mengonstruksi realitas melalui struktur wacana berita. *framing* Pan & Kosicki tidak hanya melihat isi pesan secara permukaan, tetapi juga menelaah bagaimana fakta disusun, dipilih, dan ditekankan melalui perangkat sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji bagaimana media membingkai isu tertentu, termasuk dalam menentukan sudut pandang, penonjolan aktor, serta penekanan aspek tertentu dalam pemberitaan.

Lebih lanjut, penggunaan *framing* Pan & Kosicki sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang berorientasi pada makna dan interpretasi. Model ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks berita sebagai produk konstruksi sosial yang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh rutinitas jurnalistik, nilai berita, serta kepentingan tertentu. Oleh karena itu, metode ini dipilih karena mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana realitas sosial dikonstruksi oleh media, sekaligus mengungkap pola-pola pembingkai yang muncul dalam pemberitaan yang diteliti.

4. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan bersumber dari tiga. Yaitu data primer, data sekunder, dan wawancara. Data primer di sini

adalah sasaran utama yang akan dianalisis, yaitu unit berita. Lalu, data sekunder dipergunakan untuk memperkuat data yang akan diambil. Dan setelahnya, akan dilakukan wawancara. Penjelasan tentang ini akan lebih rinci di bawah ini.

1. Data primer: Data yang akan diambil langsung dari sumber berita yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah pemberitaan tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang direncanakan akan diserahkan kepada perguruan tinggi.
2. Data sekunder: Data ini akan diambil dari sumber lain berupa buku-buku, tulisan, atau referensi lain. Data ini berfungsi untuk memperkuat data yang akan dianalisis.
3. Wawancara: Setelah semua data terkumpul secara komprehensif, data ini akan diajukan langsung ke media terkait. Dalam hal ini adalah *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*. Wawancara akan dilakukan untuk mendapat konfirmasi dari media terkait.

Adapun pertanyaan wawancara sebagai berikut. Pertama, apakah benar media ini membingkai pemberitaan WIUP di perguruan tinggi, sesuai data yang didapatkan. Kedua, bagaimana tahapan redaksi yang ada di media ini sehingga sampai menjadi sebuah berita. Ketiga, apakah dalam media ini, mereka mengedepankan prinsip media sebagai pengawasan terhadap isu lingkungan. Karena hasil yang belum didapatkan, maka pertanyaan penelitian hanya akan bersifat umum. Kedepannya, pertanyaan akan disesuaikan dengan hasil yang didapat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data akan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis ini terbagi dalam empat unsur besar. Pertama, Sintaksis (merujuk pada cara wartawan menyusun fakta atau peristiwa dalam berita, yang mencakup elemen-elemen seperti pernyataan, opini, kutipan, dan hasil pengamatan, dalam struktur berita secara keseluruhan). Kedua, Skrip (cara wartawan menyampaikan fakta atau menggunakan strategi bercerita untuk mengemas peristiwa agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi audiens). Ketiga, Tematik (cara wartawan menyusun fakta atau menuangkan pandangannya tentang suatu peristiwa ke dalam bentuk proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks berita secara utuh). Keempat, Retoris (cara wartawan menekankan fakta).

Tabel 1. 1 Analisis *Framing* Model Pan & Kosicki.

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit yang Dianalisis
Sintaksis (merujuk pada cara wartawan menyusun fakta atau peristiwa dalam berita, yang mencakup elemen-elemen seperti pernyataan, opini, kutipan, dan hasil pengamatan, dalam struktur berita secara keseluruhan).	Skema Berita	Headline, lead, latar belakang, informasi, kutipan, sumber, pernyataan dan penutup
Skrip (cara wartawan menyampaikan fakta atau menggunakan strategi bercerita untuk mengemas peristiwa agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi audiens).	Kelengkapan berita 5W+1H	Kelengkapan berita 5W+1H
Tematik (cara wartawan menyusun fakta atau menuangkan pandangannya tentang suatu peristiwa ke dalam bentuk proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks berita secara utuh).	Detail, maksud kalimat dan hubungan antar kalimat, nominalisasi antar kalimat, koherensi	Paragraf, proposisi, kalimat dan penghubung antar kalimat

Retoris (cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon (pilihan kata), grafis, metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik
--	---	----------------------------------

Pemberitaan akan diambil dalam periode 20 Januari 2025 sampai dengan 22 Februari 2025. Hal ini dikarenakan isu terkait izin tambang yang akan diberikan ke universitas, timbul dan marak diberitakan dalam jangka waktu tersebut. Dalam periode ini, pemberitaan tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di lingkup universitas dapat dijelaskan dengan tabel di bawah.

Tabel 1. 2 Jumlah Berita dan Jumlah Sampel

Media	Jumlah Berita (Total)	Jumlah Sampel
<i>Kompas.com</i>	30	10
<i>Tempo.co</i>	23	10
<i>CNN Indonesia</i>	6	5
Total	59	25

Pemberitaan ini akan dianalisis dengan *framing* model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berikut contoh penerapan datanya yang diambil dari Skripsi (Kadewandana, 2008).

Tabel 1. 3 Contoh Penerapan Analisis *Framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Frame Kompas: Terdapat Titik Temu Antara Islam dan Nasionalis (Dikotomi Islam dan Nasionalis Tidak Relevan)	
Elemen	Strategi Penulisan
Sintaksis	Wawancara terhadap tokoh Islam dan nasionalis yang menyatakan bahwa terdapat titik temu antara Islam dan Nasionalis. Kompas menempatkan pendapat dari kedua tokoh tersebut secara berurutan. Dimulai dari pendapat tokoh Islam, kemudian baru tokoh nasionalis.

	Dalam teks, tidak terdapat wawancara terhadap tokoh yang menolak pembentukan Baitul Muslimin Indonesia di tubuh PDI-P.
Skrip	Pendapat tokoh Islam maupun nasionalis ditempatkan saling melengkapi dalam posisi yang setara. Pendapat satu tidak ditempatkan lebih utama dibanding pendapat yang lain. Argumentasi tokoh menunjukkan titik temu antara Islam dan nasionalis.
Tematik	(1) pembelaan terhadap kaum duafa oleh pihak Islam dan pemihakan terhadap kaum marhaen oleh pihak nasionalis merupakan titik temu antara Islam dan nasionalis; (2) dikotomi Islam dan nasionalis sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia; (3) pembentukan Baitul Muslimin Indonesia merupakan konsistensi PDI-P dalam memperjuangkan NKRI dan memperjuangkan kaum marhaen/duafa.
Retoris	Pemberian label strata ekonomi (duafa, marhaen) dan pemberian label otoritas jabatan dari para tokoh Islam dan nasionalis untuk mendukung gagasan

Dalam teks tersebut terlihat bahwa wawancara terhadap tokoh Islam dan tokoh nasionalis disusun secara berurutan dan proporsional, dimulai dari pandangan tokoh Islam kemudian dilanjutkan dengan tokoh nasionalis, sehingga keduanya ditempatkan dalam posisi yang setara dan saling melengkapi. Tidak terdapat narasumber yang secara eksplisit menolak pembentukan Baitul Muslimin Indonesia di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga konstruksi pemberitaan cenderung menguatkan narasi adanya titik temu antara Islam dan nasionalis. Argumentasi yang ditampilkan menekankan bahwa pembelaan terhadap kaum duafa oleh kelompok Islam dan keberpihakan kepada kaum marhaen oleh kelompok nasionalis diposisikan sebagai irisan ideologis yang

mempertemukan keduanya. Selain itu, dikotomi antara Islam dan nasionalis digambarkan sudah tidak relevan dalam konteks Indonesia, serta pembentukan Baitul Muslimin Indonesia dipahami sebagai bentuk konsistensi partai dalam memperjuangkan NKRI dan kepentingan kelompok ekonomi bawah. Penggunaan label strata ekonomi seperti “duafa” dan “marhaen”, serta penegasan otoritas jabatan para tokoh yang diwawancarai, berfungsi memperkuat legitimasi gagasan yang dibangun dalam teks tersebut.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Umum

Pemberitaan terkait pemberian izin tambang kepada universitas mengacu kepada rencana yang kontroversial, yaitu pada Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Pada rencana ini, menyebutkan adanya pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diprioritaskan kepada perguruan tinggi. Pemberian WIUP ini terdapat pada pasal 51A yang berbunyi: “Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas” (BBC News Indonesia, 2025).

Awal mulanya rencana ini bisa muncul ke permukaan adalah karena Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengusulkan agar universitas diberikan hak mengelola tambang. Rencana ini telah disampaikan sejak era pemerintahan presiden Jokowi. Usulan ini dirumuskan dalam sebuah dokumen yang berjudul “Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045” (BBC News Indonesia, 2025).

DPR RI mengadakan rapat paripurna kedua masa persidangan 2025 pada Kamis, 23 Januari 2025. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai usul inisiatif DPR (Wardah, 2025). Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU ini adalah pemberian prioritas izin tambang kepada perguruan tinggi.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui hasil penyusunan RUU Minerba untuk diajukan sebagai usul inisiatif DPR. Dalam rapat Pleno di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyampaikan bahwa salah satu usulan DPR dalam RUU tersebut adalah pemberian prioritas izin usaha tambang kepada perguruan tinggi.

Alasan dibalik setujunya DPR RI terkait hal ini adalah keinginan bahwa semua masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena ini, pemerintah ingin memberikan peluang kepada perguruan tinggi agar bisa berkontribusi dalam mengelola sumber daya alam, khususnya minerba (Muhid,

2025). Pemberian izin ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Ada sejumlah kontroversi yang timbul terkait wacana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi. Pertama, muncul kekhawatiran akan potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di area kampus. Hal ini dikhawatirkan tidak hanya merusak ekosistem sekitar, tetapi juga menciptakan konflik dengan masyarakat. Kedua, terdapat risiko terganggunya independensi dan nilai akademik universitas akibat orientasi berlebihan pada keuntungan finansial. Kondisi ini bisa membuat kampus kehilangan fokus utamanya sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. Ketiga, kritik juga diarahkan pada pola pendanaan perguruan tinggi yang dinilai lebih tepat diperkuat melalui subsidi pemerintah. Dengan cara ini, kebutuhan finansial kampus dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada konsesi bisnis.

Dengan rencana ini, muncul beberapa reaksi dari pihak universitas, ada respon positif dan respon negatif. Salah satu universitas yang merespon positif rencana ini adalah Universitas Padjadjaran. Hal ini diklaim karena perguruan tinggi memiliki bidang ilmu yang spesifik di bidang pertambangan (Siswadi, 2025). Pun di Universitas Padjadjaran, terdapat program studi yang relevan yaitu teknik geologi yang bisa mendukung rencana pemerintah.

Universitas yang merespon negatif dan bahkan menolak adalah Universitas Islam Indonesia. Rektor UII menolak wacana pemberian izin tambang bagi perguruan tinggi karena dinilai bertentangan antara logika kampus dan logika bisnis. Menurutnya, kampus yang seharusnya berprinsip nirlaba berpotensi terganggu jika dicampur dengan orientasi bisnis. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merusak integritas akademik perguruan tinggi di masa mendatang.

Dengan kontroversi ini, banyak portal media yang memberitakannya. Media mempunyai instrumen untuk membingkai sebuah berita, mana yang akan diberitakan dan mana yang tidak. Media juga mempunyai ideologi dan agenda masing-masing. Oleh karena ini, pemberitaan terhadap Izin Usaha Tambang dapat memiliki perspektif yang berbeda-beda di satu media dengan media yang lainnya. Media memiliki peranan yang penting dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, pun media juga mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat sebuah peristiwa. Oleh karena perbedaan ini, maka produk akhir tulisannya dapat mencerminkan bagaimana sebuah media dalam melihat peristiwa (Akbar,

2023).

Dalam penelitian ini, akan berusaha menganalisis *framing* yang dilakukan oleh tiga *website* berita media online. Tiga *website* ini adalah *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *CNN Indonesia*. Tentunya, ketiga media ini mempunyai cara penulisan yang berbeda-beda. Dengan menganalisis tulisan dari media tersebut, maka kita dapat menganalisis *framing* apa yang berusaha diciptakan.

B. Profil Media

1. Profil Media Kompas.com

a. Sejarah Kompas.com

Kompas.com merupakan salah satu pelopor media daring di Indonesia yang resmi hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online (KOL). Pada tahap awal, situs ini yang dapat diakses melalui alamat *kompas.co.id* hanya menampilkan ulang berita-berita dari harian Kompas edisi cetak yang terbit pada hari yang sama. Tujuan utama pembentukan Kompas Online adalah memberikan akses informasi bagi pembaca harian Kompas yang berada di wilayah sulit dijangkau distribusi fisik, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur serta di luar negeri (*Kompas.com*, *t.thn.*). Melalui layanan ini, mereka dapat membaca Kompas tepat pada hari terbit tanpa harus menunggu pengiriman cetak beberapa hari kemudian.

Memasuki awal tahun 1996, alamat situs Kompas Online berubah menjadi *www.Kompas.com* guna meningkatkan kemudahan akses serta memperluas jangkauan pembaca, terutama di luar negeri. Melihat perkembangan pesat dunia digital, Kompas kemudian mengembangkan layanan daring tersebut menjadi unit bisnis tersendiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan nama KCM, yang tidak lagi hanya menampilkan versi digital harian cetak, melainkan juga menghadirkan pembaruan berita secara real-time sepanjang hari (*Kompas.com*, *t.thn.*).



Gambar 2. 1 Logo Kompas.com

Peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia turut mendorong pertumbuhan pesat pengunjung KCM. Menyadari dinamika perkembangan dunia digital, KCM kemudian melakukan pembenahan dan inovasi dalam penyajian berita. Pada 29 Mei 2008, portal ini kembali melakukan rebranding menjadi *Kompas.com*, dengan tujuan menegaskan identitasnya sebagai portal berita yang berpegang pada nilai-nilai jurnalisme bermakna sebagaimana reputasi harian Kompas. Sejak rebranding tersebut, *Kompas.com* terus memperluas kanal berita, meningkatkan produktivitas redaksi, serta berkomitmen menghadirkan informasi aktual, terpercaya, dan relevan di tengah arus informasi digital yang kian deras.

Perjalanan *Kompas.com* dapat tergambar dalam linimasa berikut ini. Pada tahun 1995, *Kompas.com* pertama kali hadir dengan domain *kompas.co.id*. Saat itu, mereka dikenal sebagai Kompas Online yang menampilkan replika harian Kompas. Pada tahun 1996, domain mereka berubah menjadi *Kompas.com*. Pada tahun 1998, berkembang menjadi unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM). Pada tahun 2008, mereka melakukan rebranding menjadi *Kompas.com (reborn)*. Dan pada 2018, mereka tampil dengan warna dan logo baru yang lebih solid. Sekarang, *Kompas.com* mempunyai jargon yaitu Jernih Melihat Dunia.

b. Visi Misi *Kompas.com*

Kompas.com memiliki visi dan misi, yaitu menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan dan menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, dan adil sejahtera.

c. Rubrikasi *Kompas.com*

Mengutip langsung dari website *Kompas.com*, berikut adalah rubrikasi media tersebut.

Tabel 2. 1 Rubrikasi *Kompas.com*

Tema	Rubrikasi
------	-----------

News	Nasional, Global, Megapolitan, Regional, Hype, Pemilu, Konsultasi Hukum, Cek Fakta, Surat Pembaca, Indeks
Nusaraya	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Indeks
Jagar Literasi	Artikel, Foto, Video, Rolls, Donasi, STEM
Cahaya	Aktual, Doa dan Niat, Jadwal Sholat
Tekno	Apps & OS, Gadget, Internet, Hardware, Business, Game, Galeri, Indeks, Tech Innovation, Kilas Internet
Otomotif	News, Mobil, Motor, Sport, Feature, Niaga, Komunitas, Otopedia, Galeri, Indeks, Merapah, EV Leadership, Elektrifikasi, Pameran.
Bola	Timnas Indonesia, Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champions, Internasional. Liga Lain, Klasemen, Sports, Motogp, Badminton, Indeks.
Lifestyle	Wellness, Fashion, Relationship, Parenting, Beauty & Grooming, Buku, Indeks, Sadar Stunting, Kilas Lifestyle
Tren	-
Lestari	Pemerintah, Kesehatan, Ekonomi dan UMKM
Health	Penyakit A-Z, Kilas Kesehatan.
Money	Ekbis, Keuangan, Syariah, Industri, Energi, Karier, Cuan, Belanja, Tanya Pajak, Indeks.
Properti	News, Listing Properti, Arsitektur, Konstruksi, Tips Properti, IKN, Homey, Indeks.

Edukasi	Sekolah, Edu News, Perguruan Tinggi, Pendidikan Khusus, Beasiswa, Literasi, Skola
Travel	Travel News, Travel Ideas, Hotel Story, Travepedia, Food, Ohayo Jepang, Indeks

Selain hal di atas, ada beberapa rubrikasi yang lain seperti Video, Parapuan, Kolom, Sains, JEO, Foto, VIK, Kata Netizen dan Warta.

2. Profil Media *Tempo.co*

a. Sejarah Tempo

Tempo.co merupakan portal berita daring yang menjadi salah satu unit usaha di bawah naungan Tempo Media Group. Media ini berakar dari pendirian Majalah Tempo, yang pertama kali diterbitkan pada 6 Maret 1971 oleh sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme merdeka, independen, dan profesional, serta mendapat dukungan dari Yayasan Jaya Raya. Sejak awal kemunculannya, Tempo dikenal sebagai media yang mengedepankan laporan investigatif dan analisis mendalam terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia (Tempo.id, t.thn.).

Pada tahun 1994, Majalah Tempo sempat mengalami pembredelan oleh pemerintah akibat penerbitan laporan investigatif terkait kasus pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Meskipun dibatasi secara fisik, semangat jurnalisme Tempo tidak berhenti. Situasi tersebut justru menjadi momentum penting bagi Tempo untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.



Gambar 2. 2 Logo Tempo

Sebagai respons terhadap kondisi pembredelan tersebut sekaligus untuk menjangkau pembaca melalui media digital, Tempo meluncurkan portal berita daring pertama di Indonesia pada 6 Maret 1996 dengan alamat www.tempointeraktif.com. Kehadiran portal ini menandai langkah awal transformasi digital Tempo, yang bertujuan untuk tetap menyampaikan berita dan

analisis kepada publik secara cepat dan luas. Dalam perkembangannya, alamat situs tersebut kemudian berubah menjadi *www.Tempo.co*, yang menjadi identitas baru Tempo di ranah digital.

Melalui *Tempo.co*, Tempo Media Group berhasil memperkuat posisinya sebagai pelopor media digital di Indonesia. Portal ini tidak hanya menyajikan berita aktual, tetapi juga mempertahankan karakter khas Tempo dalam menghadirkan jurnalisme berkualitas tinggi, berbasis fakta, dan berimbang. Seiring kemajuan teknologi, *Tempo.co* terus melakukan inovasi melalui pengembangan produk digital terintegrasi, termasuk aplikasi yang menghubungkan seluruh platform Tempo seperti majalah, koran, dan kanal daring.

Hingga saat ini, *Tempo.co* dikenal sebagai salah satu portal berita kredibel di Indonesia yang menyajikan informasi terkini mengenai berbagai topik, mulai dari isu nasional, politik, ekonomi, bisnis, hukum, hingga gaya hidup. Komitmen Tempo terhadap jurnalisme independen dan profesional tetap menjadi fondasi utama dalam setiap perkembangan media ini di era digital.

b. Visi Misi Tempo

Visi Tempo adalah menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Adapun misi yang dimiliki Tempo adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan produk multimedia yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
2. Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan berpegang kepada kode etik.
3. Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
4. Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
5. Menjadi lahan kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui peningkatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.

6. Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.

c. Rubrikasi *Tempo.co*

Rubrikasi *Tempo.co* terbagi menjadi 7 bagian. Rubrikasi yang ada di *Tempo.co* yaitu Politik, Hukum, Ekonomi, Lingkungan, Wawancara, Investigasi dan Cek Fakta.

3. Profil Media *CNN Indonesia*

a. Sejarah *CNN Indonesia*

CNN Indonesia merupakan stasiun televisi dan portal berita yang dimiliki oleh Trans Media melalui kerja sama dengan Turner International. Kanal berita ini pertama kali mengudara pada 17 Agustus 2015, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, sementara peluncuran resminya dilakukan pada 15 Desember 2015 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-14 Trans Media. Berbasis di studio Trans Media dan menggunakan Bahasa Indonesia, *CNN Indonesia* menayangkan berbagai program berita yang mencakup isu-isu nasional dan internasional dengan fokus pada bidang politik, ekonomi, olahraga, teknologi, serta hiburan.



Gambar 2. 3 Logo CNN Indonesia

Sebelumnya, situs berita CNNIndonesia.com telah lebih dulu hadir sejak 20 Oktober 2014 di bawah kepemimpinan Yusuf Arifin sebagai pemimpin redaksi.

Kini, *CNN Indonesia* menayangkan programnya selama 24 jam penuh dan dapat diakses melalui layanan televisi berbayar seperti Transvision dan UseeTV, serta secara daring melalui layanan live streaming di CNNIndonesia.com. Selain itu, siaran *CNN Indonesia* juga dapat ditonton melalui antena digital di kanal 40 dan 42 UHF (Jakarta) serta 35 UHF (Surabaya), maupun secara analog melalui jaringan Trans TV dan Trans 7. Meskipun membawa nama yang sama, *CNN Indonesia* dan CNN International merupakan entitas yang berbeda dan berdiri secara independen, namun keduanya menjalin kerja sama dalam peliputan berita-berita besar. *CNN Indonesia* menjadi bagian dari strategi Content Sales and Partnerships Group milik CNN International Commercial yang bertujuan memperluas jangkauan audiens global melalui kemitraan dengan media lokal. Model kerja sama seperti ini juga diterapkan di beberapa negara lain, seperti Filipina, Turki, dan Chile.

b. Visi Misi *CNN Indonesia*

Visi misi yang diusung *CNN Indonesia* adalah sebagai berikut, “Visi & Misi Panjang bukan berarti membosankan. Pendek tidak berarti dangkal. Panjang pendek bukanlah rumus. Panjang pendek bukanlah kungkungan. Panjang dan pendek hanyalah sebuah format penyampaian. Sebuah pilihan. Dangkal dan membosankan adalah cermin ketidaktrampilan penyampainya. Bukan karena formatnya. Karenanya berita kami bisa panjang dan bisa pendek. Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekadar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias. Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui. Kami hadir untuk mengabarkan.”

c. Rubrikasi *CNN Indonesia*

Melihat langsung dari portal *CNN Indonesia*, rubrikasinya adalah sebagai berikut. Yaitu Nasional, Internasional, Ekonomi, Olahraga, Teknologi, Otomotif,

Hiburan, dan Gaya Hidup.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan memaparkan bagaimana *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia* membingkai berita terkait izin tambang di lingkup universitas.

A. *Kompas.com*

1. Soal Wacana Pemberian Izin Tambang kepada Perguruan Tinggi, Rektor Unimal: Perlu Kajian Komprehensif

Sintaksis: Pada pemberitaan pertama dari *Kompas.com* terkait isu ini berjudul “Soal Wacana Pemberian Izin Tambang kepada Perguruan Tinggi, Rektor Unimal: Perlu Kajian Komprehensif”. Berita ini ditulis dengan menekankan bagaimana pendapat petinggi kampus Unimal. Pemberitaan didominasi oleh kutipan-kutipan dari narasumber yaitu Prof. Herman Fithra. Kutipan yang dimasukkan dalam berita ini mengandung argumen bahwa izin tambang untuk perguruan tinggi harus dikaji secara komprehensif. Narasumber memberikan saran bahwa yang dapat menggandeng mahasiswa dengan program studi tambang dalam berkolaborasi riset, monitoring, serta evaluasi. Berita dibuka dengan argumen pokok yaitu respon rektor Universitas Malikussaleh terhadap wacana pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada perguruan tinggi. Dan ditutup dengan kutipan langsung dari narasumber.

Skrip: Pemberitaan ditulis dengan penekanan terhadap argumen bahwa perguruan tinggi bukan dibentuk untuk kepentingan pragmatis. Serta peran kampus untuk memberikan keseimbangan terhadap aspek ekologis dan sosial. Pernyataan rektor Unmul diambil pada tanggal 23 Januari 2025. Pemberitaan difokuskan kepada respon dari Prof Herman Fithra terhadap isu Wilayah Izin Usaha Tambang kepada perguruan tinggi. Berita ini diambil di Lhoseumawe. Pemberitaan ini dikemas dalam alur berita yang berpola, yaitu dimulai dari isu kebijakan, respon tokoh, penjelasan, alternatif, dan risiko.

Tematik: Dalam kalimat-kalimat yang disusun dalam berita ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa berita ini membangun makna bahwa kampus harus menjaga posisi moral dan intelektualnya, serta berperan sebagai penyeimbang kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Retoris: Pemberitaan ini memiliki beberapa kalimat yang bernada

peringatan, seperti “perlu kajian lebih komprehensif”, “tidak dibentuk sebagai pusat industri”, “jangan perguruan tinggi diseret ke dalam pusaran kepentingan pragmatis bisnis pertambangan”. Bahasa yang digunakan mengandung kewaspadaan dan kritik dengan tetap menggunakan bahasa yang baik. Gambar yang digunakan dalam berita ini tidak selaras dengan isi pemberitaannya. Gambar yang digunakan adalah potret rektor Unmul dalam upacara penutupan Pomda Aceh.

Dalam pemberitaan ini, pendapat difokuskan kepada rektor Unimal dalam pendapatnya bahwa perihal izin tambang kepada universitas harus dikaji lebih secara komprehensif. Dalam penulisannya, berita ini juga menekankan pendapat pihak kampus dalam mengedepankan perannya di aspek ekologis dan sosial. Penulisan berfokus kepada makna bahwa kampus harus menjaga posisi moral dan intelektualnya dalam isu ini. Pun dalam pemberitaan ini, terdapat beberapa kalimat etoris yang terkesan sebagai peringatan seperti “perlu kajian lebih komprehensif”.

2. PNL Lhoseumawe: Kami Punya Prodi Migas, Diberi Kawasan Tambang Sangat Siap

Sintaksis: Pemberitaan kedua berjudul “PNL Lhokseumawe: Kami Punya Prodi Migas, Diberi Kawasan Tambang Sangat Siap”. Di dalam pemberitaan ini mengutip pendapat direktur PNL Rizal Syahyadi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki kesiapan dalam mendukung wacana pemberian Wilayah Izin Usaha Tambang kepada perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan PNL mempunyai sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam bidang tersebut. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pembiayaan wacana ini. Kampus dinilai tidak menyanggupi jika dibebankan pembiayaan sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu kajian yang lebih mendalam terkait isu ini. Intinya, PNL setuju atas prinsip pemberian WIUP terhadap perguruan tinggi.

Skrip: Penulisan berita memiliki pola yang hampir mirip dengan berita sebelumnya, yaitu berkutat di respon tokoh, penjelasan, dan risiko. Pemberitaan ini membahas dan menekankan perlunya kajian mendalam terkait hal pemodalan. Ditulis dengan kutipan dari Direktur PNL, Rizal Syahyadi. Wawancara diambil pada 23 Januari 2024 di Lhoseumawe.

Tematik: Direkrut PNL setuju dengan prinsip dalam WIUP perguruan tinggi, namun diperlukan kajian mendalam terkait masalah permodalan dan pembiayaan. Hal ini dinilai karena bisnis tambang bukanlah hal yang mudah bagi kampus.

Retoris: Pemilihan diksi dalam berita ini digunakan untuk membingkai sikap Politeknik Negeri Lhoseumawe (PNL). Contohnya adalah kutipan frasa “merespon positif”. Secara Retoris, berita ini membingkai PNL sebagai perguruan tinggi yang siap dan terbuka secara profesional, namun tetap rasional dan berhati-hati, dengan penekanan pada kesiapan teknis dan kebutuhan regulasi yang jelas.

Dalam pemberitaan ini, pihak PNL terlihat jelas memiliki kesiapan dalam mendukung wacana pemberian izin tambang terhadap universitas. Hal ini dengan alasan bahwa mereka mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Namun tetap menekankan mekanisme permodalan dan pembiayaan. Pemberitaan berfokus kepada pendapat tokoh yang diwawancara. Diksi dalam berita ini dipilih untuk membingkai respon dari PNL, yaitu “merespon positif” sebagai arti bahwa mereka menerima wacana ini.

3. **Iming-Iming Kelola Tambang untuk Perguruan Tinggi**

Sintaksis: Berita berjudul “Iming-Iming Kelola Tambang untuk Perguruan Tinggi” disusun dengan pola akumulatif yang memuat banyak pernyataan dari aktor berbeda untuk membingkai isu sebagai persoalan nasional yang kompleks. Wartawan mengawali berita dengan asal-usul usulan dari APTISI, lalu mengaitkannya dengan proses legislasi di DPR melalui revisi UU Minerba, sehingga pembaca terlebih dahulu memahami konteks kebijakan. Selanjutnya, struktur berita dipenuhi kutipan langsung dari berbagai pihak, yaitu pimpinan asosiasi perguruan tinggi, anggota DPR, forum rektor, rektor perguruan tinggi, hingga pengamat pendidikan yang ditempatkan secara berimbang antara pendukung dan penolak. Penyusunan kutipan tersebut tidak mengarah pada satu suara dominan, melainkan memperlihatkan keberagaman sudut pandang. Dengan struktur seperti ini, fakta, opini, dan pernyataan narasumber dirangkai untuk menampilkan wacana izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai isu yang masih terbuka untuk diperdebatkan dan belum memiliki kesimpulan final.

Skrip: Alur berita bergerak dari asal-usul usulan, proses legislasi di DPR, hingga beragam respons pro dan kontra, membentuk narasi kronologis yang menunjukkan bahwa wacana ini berkembang bertahap dan menimbulkan kontroversi. Berita ini membahas wacana pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi yang melibatkan APTISI, DPR RI, Forum Rektor Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, politisi, dan pengamat pendidikan, yang kembali mengemuka pada Januari 2025 setelah Badan Legislasi DPR RI menyetujui revisi UU Minerba sebagai usul inisiatif DPR di Jakarta. Wacana ini muncul untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Minerba sekaligus membuka peluang pendanaan tambahan bagi perguruan tinggi. Rencana tersebut akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan pengaturan khusus, seperti persyaratan badan hukum dan unit usaha mandiri bagi perguruan tinggi yang akan mengelola tambang, sehingga memunculkan beragam pandangan pro dan kontra di tingkat nasional.

Tematik: Tema utama berita adalah perdebatan mengenai kelayakan perguruan tinggi mengelola tambang, dengan penekanan pada pertentangan antara peluang peningkatan pendanaan kampus dan kekhawatiran akan penyimpangan fungsi utama perguruan tinggi.

Retoris: Pilihan diksi seperti “membingungkan”, “kesempatan”, “role model”, dan “kekeliruan” digunakan untuk menegaskan perbedaan sikap antar narasumber, sehingga memperkuat kesan adanya konflik pandangan dalam wacana tersebut.

Pemberitaan ini mencakup respon dari beberapa pihak di dalamnya. Berita diawali dengan penjelasan asal-usul bagaimana usulan ini bisa timbul. Hal ini agar pembaca bisa memahami konteks yang akan dibahas. Setelah menjelaskan asal-usul, dipaparkan pendapat dari pihak yang mendukung dan menolak. Inti berita yang dibahas adalah pembahasan terkait kelayakan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Berita ditulis dengan diksi yang mempertegas sikap dari narasumber, seperti “kesempatan” dan “membingungkan”.

4. Wacana Kampus Boleh Kelola Tambang Dinilai Dapat Timbulkan Konflik

Sintaktis: Dalam berita yang berjudul “Wacana Kampus Boleh Kelola

Tambang Dinilai Dapat Timbulkan Konflik”, wartawan menyusun berita dengan menempatkan pendapat pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah sebagai fokus utama sejak paragraf pembuka. Lead berita langsung menegaskan bahwa kebijakan tersebut dinilai rawan menimbulkan konflik, sehingga sejak awal pembaca diarahkan pada sudut pandang kritis. Kutipan Trubus digunakan secara dominan dan berulang untuk memperkuat argumen penolakan, sementara pandangan pihak DPR yang mendukung wacana tersebut baru muncul di bagian akhir berita. Struktur ini menunjukkan bahwa berita lebih menekankan kritik dibandingkan upaya penyeimbangan pandangan.

Skrip: wartawan menyajikan alur pemberitaan dengan pola sebab-akibat. Wacana pemberian izin tambang dijelaskan sebagai pemicu munculnya berbagai persoalan, mulai dari perbedaan jenis dan akreditasi perguruan tinggi, potensi kecemburuan antar kampus, hingga persoalan tata kelola dan pengawasan. Strategi penceritaan yang digunakan cenderung fokus kepada permasalahan, yakni menonjolkan risiko dan tantangan kebijakan daripada menjelaskan secara rinci peluang atau manfaat yang mungkin diperoleh. Alur ini membuat pembaca lebih mudah memahami isu, tetapi sekaligus membentuk persepsi bahwa kebijakan tersebut sarat masalah.

Tematik: Berita ini mengangkat tema utama kehati-hatian dan ketidaksiapan kebijakan. Hubungan antarparagraf saling memperkuat gagasan bahwa pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi berpotensi menimbulkan konflik struktural dan sosial, khususnya terkait ketidakjelasan kriteria kampus yang berhak mengelola tambang. Selain itu, berita juga menekankan bahwa kebijakan serupa yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan belum dievaluasi secara jelas, sehingga wacana baru ini dianggap prematur. Keseluruhan teks membangun kesimpulan bahwa kebijakan tersebut belum tepat untuk diimplementasikan tanpa kajian mendalam dan persiapan matang.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan diksi yang bernada kuat dan negatif, seperti “rawan konflik”, “potensi konflik besar”, dan “berat sekali untuk diimplementasikan”. Kutipan langsung digunakan berulang kali untuk memperkuat kesan bahwa kebijakan ini bermasalah dan berisiko tinggi. Selain itu, penyebutan beragam jenis perguruan tinggi, mulai dari PTN,

PTN-BH, hingga PTS. Ini berfungsi sebagai penegasan atas kompleksitas persoalan yang akan muncul jika kebijakan diterapkan. Secara keseluruhan, unsur retorik dalam berita ini memperkuat *framing* bahwa wacana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi merupakan kebijakan yang belum tepat dan patut dipertanyakan.

Pemberitaan berfokus kepada pendapat pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah. Pendapatnya secara umum adalah sebuah pandangan kritis terhadap isu ini. Dalam pemberitaan ini berfokus kepada kritik bahwa perguruan tinggi belum mempunyai kesiapan dalam mengelola tambang dan kebijakan yang perlu dikaji secara hati-hati. Hal ini dikarenakan setiap perguruan tinggi mempunyai akreditasi dan spesialisasinya masing-masing. Pemberitaan ditulis dengan retorik yang kuat seperti “rawan konflik”.

5. Revisi UU Minerba Diketik Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

Sintaksis: Dalam berita berjudul “Revisi UU Minerba Diketik Jadi RUU Usul Inisiatif DPR”, struktur berita diawali dengan informasi utama mengenai keputusan DPR dalam rapat paripurna yang menetapkan RUU Minerba sebagai usul inisiatif DPR RI. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jawaban serentak “setuju” dari peserta rapat ditempatkan sebagai penegasan legitimasi politik keputusan tersebut. Selanjutnya, berita menyusun fakta dengan menyebutkan keterlibatan delapan fraksi DPR RI yang menyampaikan pandangan tertulis, sehingga menampilkan kesan bahwa proses ini telah melalui mekanisme kelembagaan yang lengkap dan representatif.

Skrip: wartawan menyampaikan peristiwa dengan alur kronologis dan institusional. Berita dimulai dari keputusan rapat paripurna, lalu mundur ke proses sebelumnya di Badan Legislasi (Baleg), dan diakhiri dengan tahapan lanjutan berupa pembahasan bersama pemerintah. Pola penceritaan ini menekankan bahwa revisi UU Minerba merupakan hasil proses bertahap dan berkelanjutan, bukan keputusan mendadak. Strategi bercerita tersebut mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan sebagai bagian dari prosedur resmi negara yang wajar dalam sistem legislasi.

Tematik: Berita membangun tema utama tentang legitimasi dan rasionalisasi revisi UU Minerba. Gagasan mengenai hilirisasi serta pemberian

izin pertambangan kepada organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan UKM disajikan sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi tambang bagi masyarakat. Pernyataan Ketua Baleg Bob Hasan yang menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menanggung dampak negatif tambang, tetapi juga memperoleh peluang pengelolaan, menjadi proposisi kunci yang mengikat keseluruhan teks. Tema kesejahteraan rakyat dan kemakmuran nasional digunakan sebagai landasan normatif untuk membenarkan revisi undang-undang tersebut.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan diksi yang bersifat persetujuan dan legitimasi, seperti “disetujui”, “ditetapkan”, dan “usul inisiatif DPR”. Kutipan langsung dari pimpinan DPR dan Ketua Baleg berfungsi memperkuat otoritas sumber serta membangun kesan bahwa kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat. Tidak adanya suara penolakan atau kritik dalam berita ini juga menjadi strategi Retoris tersendiri, karena memperkuat *framing* bahwa revisi UU Minerba merupakan kebijakan yang diterima secara luas dan relatif tidak problematis. Secara keseluruhan, berita ini membingkai revisi UU Minerba sebagai langkah politik yang sah, terencana, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita “Revisi UU Minerba Diketok Jadi RUU Usul Inisiatif DPR” secara keseluruhan membingkai revisi UU Minerba sebagai kebijakan yang sah, prosedural, dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang ditegaskan oleh pernyataan pimpinan sidang seperti Sufmi Dasco Ahmad, dikonstruksikan sebagai bentuk persetujuan kolektif yang merepresentasikan kehendak kelembagaan. Proses yang melibatkan Badan Legislasi DPR RI dan tahapan lanjutan bersama pemerintah ditampilkan sebagai mekanisme formal yang berjenjang, sehingga kebijakan tampak lahir dari prosedur yang wajar dan terstruktur. Substansi revisi diposisikan sebagai upaya rasional untuk memperluas manfaat ekonomi pertambangan melalui hilirisasi dan pemberian akses kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi, perguruan tinggi, dan pelaku usaha kecil. Dengan menonjolkan diksi persetujuan serta kutipan dari otoritas resmi tanpa menghadirkan suara oposisi, teks membangun kesan bahwa revisi ini merupakan langkah politik yang diterima luas dan

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nasional.

6. Pimpinan DPR Sebut Tambang Bisa Jadi Sumber Uang untuk Kampus

Sintaksis: Dalam berita berjudul “Pimpinan DPR Sebut Tambang Bisa Jadi Sumber Uang untuk Kampus”, struktur berita diawali dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menilai bahwa usulan tersebut bertujuan mencari sumber penghasilan tambahan bagi universitas. Kutipan langsung dari Dasco ditempatkan secara dominan sebagai sumber utama, sehingga sudut pandang pemerintah dan DPR menjadi fokus utama dalam penyusunan fakta. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan penjelasan mengenai mekanisme pengaturan yang akan diatur lebih lanjut, serta dilengkapi dengan konteks bahwa revisi UU Minerba telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Skrip: Wartawan menyusun alur berita dengan pola penjelasan sebab dan tujuan kebijakan. Peristiwa dimulai dari munculnya wacana dalam proses revisi UU Minerba, lalu diarahkan pada alasan utama kebijakan, yakni memberikan sumber dana alternatif bagi perguruan tinggi. Alur cerita kemudian dilengkapi dengan harapan akan manfaat positif bagi kampus dan masyarakat, sebelum diakhiri dengan penjelasan tahapan lanjutan pembahasan RUU bersama pemerintah. Strategi penceritaan ini mendorong pembaca untuk memahami kebijakan sebagai upaya solutif, bukan sebagai persoalan atau kontroversi.

Tematik: Berita ini membangun tema utama tentang manfaat ekonomi dan kesejahteraan sebagai dasar legitimasi pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi. Gagasan mengenai pendanaan universitas, pengaturan mekanisme yang dapat disesuaikan, serta peluang masyarakat untuk tidak hanya menanggung dampak negatif tambang disusun secara konsisten antarparagraf. Pernyataan Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan memperkuat tema tersebut dengan menekankan bahwa kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam. Tema kesejahteraan rakyat dan kemandirian institusi pendidikan menjadi benang merah dalam keseluruhan teks berita.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan diksi yang bernuansa positif dan persuasif, seperti “memberikan manfaat”, “mencari

dana”, dan “peluang bagi masyarakat”. Kutipan langsung dari pejabat tinggi DPR digunakan untuk memperkuat otoritas dan kredibilitas wacana yang disampaikan. Minimnya suara kritis atau pandangan penolakan dalam berita ini juga berfungsi sebagai strategi retorik yang membentuk kesan bahwa kebijakan tersebut rasional dan layak dipertimbangkan. Secara keseluruhan, berita ini membingkai wacana pemberian hak kelola tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang bertujuan mendukung kemandirian finansial kampus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita “Pimpinan DPR Sebut Tambang Bisa Jadi Sumber Uang untuk Kampus” membingkai wacana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi sebagai kebijakan solutif yang berorientasi pada peningkatan pendanaan dan kesejahteraan. Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad ditempatkan dominan sehingga perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi pusat legitimasi narasi. Revisi Undang-Undang Minerba diposisikan sebagai bagian dari proses resmi yang bertujuan membuka sumber dana alternatif bagi kampus, bukan sebagai isu kontroversial. Dengan menonjolkan manfaat ekonomi dan penggunaan diksi bernada positif serta minimnya suara kritik, teks membangun kesan bahwa kebijakan ini rasional, terencana, dan berpihak pada kemandirian institusi pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

7. Tak Paksa Kampus Terima Konsensi Tambang, Baleg: Kalau Menolak, Enggak Apa

Sintaksis: Dalam pemberitaan berjudul “Tak Paksa Kampus Terima Konsensi Tambang, Baleg: Kalau Menolak, Enggak Apa”, struktur berita diawali dengan penegasan Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan bahwa perguruan tinggi tidak diwajibkan menerima izin pengelolaan tambang. Kutipan langsung “kalau menolak, ya enggak apa-apa” ditempatkan di bagian awal sebagai pernyataan kunci, sehingga sejak awal pembaca diarahkan untuk melihat DPR dalam posisi defensif dan menenangkan. Sumber berita terpusat pada Bob Hasan sebagai aktor utama, sementara konteks revisi UU Minerba disajikan sebagai latar kebijakan yang sedang berjalan.

Skrip: Peristiwa disusun dengan alur penjelasan yang menekankan klarifikasi dan pembenaran kebijakan. Wartawan memulai dengan bantahan

terhadap anggapan adanya paksaan, lalu menguraikan tujuan pemberian peluang kepada perguruan tinggi, dan menutup dengan informasi bahwa revisi UU Minerba masih akan dibahas bersama pemerintah. Pola penceritaan ini menampilkan DPR sebagai pihak yang membuka ruang partisipasi, bukan sebagai pengambil keputusan yang otoriter, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami wacana ini sebagai tawaran kesempatan, bukan kewajiban.

Tematik: berita ini membangun tema utama tentang peluang dan partisipasi perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam. Gagasan bahwa kampus dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk penelitian dan analisis kebijakan disusun secara konsisten untuk memberi legitimasi akademik terhadap wacana konsesi tambang. Selain itu, tema kesejahteraan rakyat kembali dimunculkan melalui pernyataan Bob Hasan bahwa kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menerima dampak negatif tambang, tetapi juga memperoleh manfaat langsung. Hubungan antarparagraf membentuk makna bahwa keterlibatan perguruan tinggi diposisikan sebagai kontribusi keilmuan, bukan semata-mata aktivitas bisnis.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan bahasa yang bersifat persuasif dan menenangkan, seperti “memberikan peluang”, “kesempatan”, dan “tidak memaksa”. Kutipan langsung dari Bob Hasan digunakan berulang kali untuk memperkuat citra DPR sebagai pihak yang rasional dan terbuka terhadap pilihan perguruan tinggi. Absennya suara kritis atau pandangan penolakan dalam teks juga menjadi strategi Retoris yang memperkuat *framing* positif terhadap kebijakan ini. Secara keseluruhan, berita ini membingkai wacana konsesi tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan sukarela, bernuansa akademik, dan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta kontribusi keilmuan kampus.

Berita “Tak Paksa Kampus Terima Konsesi Tambang, Bales: Kalau Menolak, Enggak Apa” membingkai kebijakan konsesi tambang bagi perguruan tinggi sebagai tawaran sukarela yang bersifat terbuka, bukan kewajiban yang memaksa. Penegasan dari Bob Hasan selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI ditempatkan di awal untuk membangun kesan defensif sekaligus menenangkan, sehingga DPR diposisikan sebagai aktor yang rasional dan akomodatif. Revisi Undang-Undang Minerba hadir sebagai konteks kebijakan yang masih berproses

dan memberi ruang partisipasi. Wacana ini diarahkan pada legitimasi akademik, yakni bahwa keterlibatan kampus dapat berkontribusi melalui penelitian dan analisis kebijakan, bukan sekadar aktivitas bisnis. Dengan penggunaan diksi persuasif dan ketiadaan suara oposisi, teks memperkuat *framing* bahwa kebijakan tersebut bernuansa peluang, partisipatif, dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

8. Mendikti Sebut Pemerintah Belum Bahas Wacana Izin Tambang untuk Peguruan Tinggi

Sintaksis: Dalam berita yang berjudul “Mendikti Sebut Pemerintah Belum Bahas Wacana Izin Tambang untuk Peguruan Tinggi”, struktur berita diawali dengan pernyataan tegas Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menyatakan bahwa pemerintah belum membahas isu tersebut sama sekali. Kutipan singkat dan langsung ini ditempatkan sebagai pernyataan utama, diikuti dengan informasi bahwa Satryo memilih tidak memberikan komentar lanjutan meskipun terus ditanya wartawan. Penyusunan fakta seperti ini menonjolkan sikap kehati-hatian dan pembatasan diri dari pihak pemerintah dalam merespons wacana yang berkembang di DPR.

Skrip: Alur pemberitaan disusun dengan pola klarifikasi. Wartawan memulai dari sikap Mendikti yang menegaskan belum adanya pembahasan, lalu memberikan konteks bahwa wacana izin tambang bagi perguruan tinggi muncul dalam proses revisi UU Minerba yang digagas DPR. Setelah itu, berita menampilkan kembali pandangan Badan Legislasi DPR melalui pernyataan Bob Hasan yang menekankan tujuan kesejahteraan rakyat. Pola penceritaan ini memperlihatkan adanya perbedaan posisi antara pemerintah dan DPR, di mana DPR terlihat lebih aktif mendorong wacana, sementara pemerintah masih bersikap pasif.

Tematik: Berita ini membangun tema utama tentang ketidakselarasan dan belum sinkronnya pembahasan kebijakan antara DPR dan pemerintah. Sikap Mendikti yang enggan berkomentar lebih jauh memperkuat gagasan bahwa wacana ini masih berada pada tahap awal dan belum menjadi agenda resmi pemerintah. Tema kesejahteraan rakyat yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR muncul sebagai narasi pembanding, sehingga pembaca dapat melihat

bahwa legitimasi kebijakan lebih banyak dibangun dari sisi legislatif, bukan eksekutif. Dengan demikian, keseluruhan teks menegaskan bahwa wacana izin tambang bagi perguruan tinggi masih bersifat politis dan belum teknokratis.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan pernyataan singkat, tegas, dan berulang mengenai “belum ada pembahasan”. Sikap diam Mendikti ketika diberondong pertanyaan juga menjadi elemen retorik yang kuat, karena menghadirkan kesan kehati-hatian sekaligus ketidakpastian. Di sisi lain, kutipan normatif tentang “kemakmuran rakyat” dari DPR kembali digunakan untuk memberi justifikasi moral terhadap wacana tersebut. Secara keseluruhan, berita ini membingkai isu izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang masih sepihak dari DPR dan belum memperoleh respons substantif dari pemerintah.

Berita “Mendikti Sebut Pemerintah Belum Bahas Wacana Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi” membingkai isu tersebut sebagai kebijakan yang belum memperoleh respons substantif dari pihak eksekutif. Pernyataan tegas Satryo Soemantri Brodjonegoro bahwa pemerintah belum membahasnya sama sekali menegaskan sikap hati-hati dan menjaga jarak dari wacana yang berkembang. Di sisi lain, dorongan revisi Undang-Undang Minerba oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap ditampilkan melalui narasi kesejahteraan rakyat yang disampaikan pihak legislatif. Perbedaan intensitas respons ini membangun kesan adanya ketidaksinkronan antara DPR dan pemerintah, di mana inisiatif tampak lebih politis daripada teknokratis. Dengan penekanan pada frasa “belum ada pembahasan” dan minimnya elaborasi dari kementerian, teks menegaskan bahwa wacana izin tambang bagi perguruan tinggi masih berada pada tahap awal dan belum menjadi agenda resmi pemerintah.

9. Muhammadiyah: Tidak Semua Perguruan Tinggi Siap Kelola Tambang

Sintaksis: Dalam pemberitaan berjudul “Muhammadiyah: Tidak Semua Perguruan Tinggi Siap Kelola Tambang”, struktur berita diawali dengan sikap kritis Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap ketentuan dalam RUU Minerba yang memprioritaskan perguruan tinggi berakreditasi minimal B untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan. Kutipan langsung dari perwakilan PP Muhammadiyah, Syahril Suwandi, ditempatkan sebagai sumber

utama dan menjadi fokus dalam penyusunan fakta. Penyebutan pasal secara spesifik memperkuat kesan bahwa kritik yang disampaikan bersifat argumentatif dan berbasis regulasi, bukan sekadar penolakan normatif.

Skrip: Alur pemberitaan disusun dengan pola argumentatif-kritis. Wartawan memulai dengan pemaparan kebijakan yang dipersoalkan, kemudian menguraikan alasan penolakan Muhammadiyah, yakni keterbatasan kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola tambang dan tidak meratanya kepemilikan program studi pertambangan dan geologi. Alur ini dilengkapi dengan penjelasan bahwa pengelolaan tambang merupakan kegiatan kompleks dari hulu ke hilir, sebelum diakhiri dengan konteks bahwa RUU Minerba telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR. Pola penceritaan tersebut menempatkan kritik Muhammadiyah sebagai respons rasional terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

Tematik: Berita ini membangun tema utama tentang ketidaksiapan dan ketimpangan kapasitas perguruan tinggi dalam mengelola usaha pertambangan. Gagasan bahwa akreditasi B tidak secara otomatis mencerminkan kemampuan teknis dan akademik di bidang pertambangan menjadi proposisi sentral yang mengikat antarparagraf. Tema kompleksitas pengelolaan tambang diperkuat dengan penekanan pada integrasi proses hulu dan hilir, sehingga kebijakan dipersepsikan berpotensi menimbulkan persoalan implementasi jika tidak diperjelas. Di sisi lain, pandangan DPR melalui Ketua Baleg Bob Hasan dimunculkan sebagai pembanding yang menekankan tujuan kesejahteraan rakyat.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan istilah teknis seperti “hulu ke hilir”, “terintegrasi”, dan penyebutan akreditasi perguruan tinggi, yang berfungsi menegaskan bobot keilmuan kritik Muhammadiyah. Kutipan langsung digunakan untuk memperkuat kesan keberatan yang berbasis kapasitas dan kompetensi, bukan penolakan ideologis. Pada saat yang sama, diksi normatif mengenai “kemakmuran rakyat” dan “kesejahteraan rakyat” dari pihak DPR berperan sebagai kontra-narasi yang memperlihatkan perbedaan sudut pandang. Secara keseluruhan, berita ini membingkai usulan izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang masih menyisakan persoalan teknis dan kelembagaan, serta membutuhkan penjelasan dan kajian lebih

mendalam sebelum diimplementasikan.

Berita “Muhammadiyah: Tidak Semua Perguruan Tinggi Siap Kelola Tambang” membingkai wacana izin tambang bagi kampus sebagai kebijakan yang problematis dari sisi kapasitas dan kesiapan institusional. Sikap kritis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pernyataan Syahril Suwandi menekankan bahwa akreditasi minimal B tidak otomatis mencerminkan kompetensi teknis di bidang pertambangan, terutama karena tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi terkait. Argumentasi disusun secara regulatif dan teknis, dengan penekanan pada kompleksitas pengelolaan tambang yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kritik tampil rasional dan berbasis keilmuan. Di sisi lain, konteks persetujuan revisi Undang-Undang Minerba oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap dihadirkan sebagai pembanding yang menekankan tujuan kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, teks menegaskan bahwa kebijakan ini masih menyisakan persoalan teknis dan kelembagaan yang memerlukan kajian lebih mendalam sebelum implementasi.

10. ITB: Kami Masih Berpikir Keras untuk Kelola Tambang

Sintaksis: Dalam pemberitaan berjudul “ITB: Kami Masih Berpikir Keras untuk Kelola Tambang”, Struktur berita diawali dengan pernyataan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Kresna Wattimena, yang menegaskan bahwa universitasnya masih harus “berpikir keras” jika diminta mengelola tambang. Kutipan langsung Ridho ditempatkan di bagian awal dan mendominasi isi berita, sehingga sudut pandang akademisi menjadi fokus utama. Penyusunan fakta menekankan pada pengalaman teknis dan keilmuan ITB di bidang pertambangan, yang memberi bobot legitimasi terhadap kehati-hatian yang disampaikan.

Skrip: Alur pemberitaan disusun secara argumentatif dan teknokratis. Wartawan memulai dengan sikap awal ITB yang belum siap secara praktis, lalu menguraikan alasan-alasan teknis seperti lamanya proses pertambangan, besarnya kebutuhan modal awal, serta perbedaan konsekuensi antara lahan greenfield dan lahan bekas tambang. Setelah itu, berita diarahkan pada permintaan kejelasan regulasi terkait jenis wilayah tambang dan mekanisme prioritas bagi perguruan tinggi. Pola penceritaan ini membimbing pembaca

untuk memahami bahwa persoalan utama bukan pada penolakan, melainkan pada aspek kesiapan teknis, ekonomi, dan regulatif.

Tematik: Berita ini membangun tema utama tentang kompleksitas dan risiko pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi. Gagasan bahwa usaha tambang merupakan bisnis jangka panjang dengan proses yang mahal dan memakan waktu menjadi proposisi sentral yang mengikat keseluruhan teks. Tema ini diperkuat dengan penjelasan rinci mengenai tahapan pertambangan dari penyelidikan hingga produksi, serta data mengenai sebaran akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, berita menegaskan bahwa pemberian izin tambang tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan status akreditasi, melainkan memerlukan kriteria yang lebih detail dan kontekstual.

Retoris: Penekanan fakta dilakukan melalui penggunaan istilah teknis seperti “greenfield”, “eksplorasi”, “amdal”, dan “studi kelayakan”, yang memperkuat kesan keilmuan dan profesionalisme pandangan ITB. Penyebutan rentang waktu “5 sampai 10 tahun” serta data kuantitatif jumlah perguruan tinggi berdasarkan akreditasi berfungsi menegaskan beratnya beban finansial dan kelembagaan yang harus ditanggung kampus. Selain itu, pengutipan langsung pasal dalam draf revisi UU Minerba menjadi strategi retorik yang menampilkan kritik secara substantif dan berbasis regulasi. Secara keseluruhan, berita ini membingkai wacana izin kelola tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang memerlukan kejelasan teknis, kesiapan finansial, dan pengaturan lanjutan agar tidak membebani institusi pendidikan tinggi.

Berita “ITB: Kami Masih Berpikir Keras untuk Kelola Tambang” membingkai wacana izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai isu yang sarat kompleksitas teknis dan risiko finansial. Pernyataan Dekan FTTM Institut Teknologi Bandung, Ridho Kresna Wattimena, ditempatkan dominan untuk menegaskan sikap kehati-hatian berbasis kompetensi akademik. Penjelasan mengenai tahapan pertambangan yang panjang, kebutuhan modal besar, serta perbedaan karakter lahan seperti greenfield memperkuat argumen bahwa pengelolaan tambang bukan keputusan sederhana. Berita juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi dalam revisi Undang-Undang Minerba agar tidak menimbulkan beban kelembagaan bagi kampus. Dengan penggunaan istilah teknis dan data kuantitatif, teks menekankan bahwa persoalan utama terletak

pada kesiapan praktis dan kejelasan kebijakan, bukan sekadar sikap menerima atau menolak.

Analisis Framing Kompas.com

Sintaksis: Dari segi Sintaksis (Struktur Penyajian Berita), Kompas cenderung menyusun berita secara kronologis dan sistematis, dimulai dari fakta utama, kemudian diikuti konteks, kutipan narasumber, dan data pendukung. Setiap pernyataan narasumber langsung dikutip untuk memperkuat akurasi berita. Fakta disajikan secara berlapis, misalnya dari keputusan DPR/Baleg, respons pemerintah, tanggapan kampus/masyarakat, potensi dampak. Struktur ini membuat pembaca mudah mengikuti alur peristiwa sekaligus memahami berbagai sudut pandang yang terlibat.

Skrip (Strategi Penyampaian Cerita) Kompas sering membingkai berita dengan menekankan dilema atau konflik antara pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah vs publik, DPR vs kampus, atau ekonomi vs pendidikan. Wartawannya menggunakan narasi yang menyoroti proses legislasi, opsi kebijakan, serta dampak terhadap masyarakat dan institusi. Strategi cerita biasanya menekankan solusi atau respons pihak terkait, sehingga berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga dinamika debat dan pertimbangan kebijakan.

Tematik (Penyusunan Fakta dan Pesan Utama) Berita Kompas menonjolkan tema keseimbangan antara kepentingan publik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Fakta disusun untuk membentuk pesan bahwa kebijakan harus dipertimbangkan matang-matang dan memiliki dampak luas. Tema yang diangkat sering berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah, independensi institusi (misalnya kampus), dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Tempo cenderung menyajikan berita agar pembaca melihat kompleksitas isu, bukan hanya sisi pro atau kontra.

Retoris: Kompas kerap menggunakan kata-kata yang menekankan legitimasi, tanggung jawab, dan dampak kebijakan, misalnya: “respons publik”, “fokus dunia pendidikan”, “independensi akademik”, “pengawasan ketat”, “potensi konflik”. Pilihan kata ini memberi kesan berita objektif tetapi juga menekankan pentingnya pertimbangan etis dan strategis dalam pengambilan keputusan. Retorika sering menyoroti peran institusi sebagai pelindung

kepentingan publik atau sebagai pengambil keputusan yang hati-hati.

B. *Tempo.co*

1. Soal Izin Tambang Untuk Perguruan Tinggi di RUU Minerba, Dasco: Semangatnya untuk Cari Dana Universitas

Sintaksis: Dalam berita *Tempo.co* berjudul “Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi di RUU Minerba, Dasco: Semangatnya untuk Cari Dana Universitas” ini tampak dari cara wartawan menyusun fakta dengan menempatkan pernyataan elite politik di bagian awal sebagai sumber utama. Berita dibuka dengan tanggapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menilai usulan izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai sesuatu yang “tidak bermasalah”, sehingga sejak awal pembaca diarahkan pada sudut pandang legitimasi kebijakan. Struktur berita kemudian diperkuat dengan kutipan langsung dari Dasco dan Ketua Baleg DPR Bob Hasan, yang menjelaskan tujuan kebijakan dari sisi pemerintah dan parlemen. Di bagian akhir, wartawan menghadirkan suara kritis dari pakar hukum tata negara UGM sebagai penyeimbang, sehingga secara struktural berita menampilkan dua kutub pandangan: pro-kebijakan dari aktor negara dan kritik dari akademisi.

Skrip: Wartawan menyusun alur cerita dengan pola kronologis yang mudah diikuti pembaca. Narasi dimulai dari respons pejabat DPR terhadap isu aktual, lalu bergerak ke proses legislasi RUU Minerba, termasuk keputusan Baleg dan sikap fraksi-fraksi di DPR. Setelah itu, alur ditutup dengan kritik dari pakar hukum tata negara. Pola ini menunjukkan strategi bercerita yang membawa pembaca dari wacana kebijakan, legitimasi politik, hingga konsekuensi dan kritik normatif. Dengan alur tersebut, berita tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga mengajak pembaca memahami bagaimana dan mengapa kebijakan itu muncul serta bagaimana respons yang menyertainya.

Tematik: terlihat dari konsistensi tema besar yang dibangun, yaitu pemaknaan izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai solusi pendanaan pendidikan versus sebagai bentuk kegagalan negara. Wartawan menyusun proposisi-proposisi yang saling terkait: pertama, izin tambang diposisikan sebagai upaya mencari dana bagi universitas; kedua, kebijakan ini dilegitimasi dengan alasan pemerataan pengelolaan sumber daya alam; dan

ketiga, tema tersebut dipatahkan oleh pandangan kritis yang menilai negara seharusnya bertanggung jawab langsung atas pembiayaan pendidikan tanpa menyeret kampus ke sektor tambang. Hubungan antarparagraf membentuk wacana utuh yang memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, pendidikan, dan tanggung jawab negara.

Retoris: Terdapat pemilihan diksi dan kutipan yang menekankan makna tertentu. Pernyataan Dasco seperti “tidak bermasalah” dan “memberikan manfaat kepada universitas” berfungsi menormalkan kebijakan dan menekankan aspek pragmatismenya. Sebaliknya, kutipan Herlambang Perdana Wiratraman yang menggunakan ungkapan keras seperti “negara nggak becus mengurus pendidikan” dan penekanan pada dampak negatif tambang terhadap lingkungan memberikan tekanan emosional dan moral yang kuat. Kontras retorika ini membuat pembaca lebih peka terhadap kontroversi kebijakan, sekaligus menegaskan bahwa isu izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut nilai, tanggung jawab negara, dan keberlanjutan lingkungan.

Berita *Tempo.co* berjudul “Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi di RUU Minerba, Dasco: Semangatnya untuk Cari Dana Universitas” membingkai isu ini sebagai arena tarik-menarik antara legitimasi politik dan kritik normatif. Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan Bob Hasan ditempatkan di awal untuk menegaskan bahwa izin tambang diposisikan sebagai solusi pendanaan universitas yang sah dan rasional dalam kerangka revisi Undang-Undang Minerba. Namun, kehadiran kritik dari akademisi Universitas Gadjah Mada menghadirkan perspektif bahwa kebijakan tersebut justru mencerminkan kegagalan negara memenuhi tanggung jawab pembiayaan pendidikan. Struktur narasi yang bergerak dari legitimasi kebijakan menuju kritik tajam memperlihatkan adanya dua kutub wacana: pragmatis-ekonomis dan normatif-konstitusional. Kontras diksi antara ungkapan yang menormalkan kebijakan dan kritik keras mengenai tanggung jawab negara serta dampak lingkungan menegaskan bahwa isu ini tidak semata teknis, melainkan menyangkut nilai, keberlanjutan, dan peran negara dalam pendidikan.

2. Komisi X DPR Minta Usulan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Dikaji

dengan Benar

Sintaksis: Dalam berita *Tempo.co* berjudul “Komisi X DPR Minta Usulan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Dikaji dengan Benar” ini terlihat dari penempatan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani sebagai fokus utama di bagian awal berita. Wartawan menyusun fakta dengan menonjolkan sikap kehati-hatian dari Komisi X, yang menekankan perlunya kajian mendalam agar orientasi bisnis tidak mengalahkan tujuan pendidikan. Kutipan langsung dari Lalu menjadi elemen dominan, lalu diikuti oleh penjelasan konteks kebijakan RUU Minerba melalui pernyataan Ketua Baleg Bob Hasan dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Struktur ini memperlihatkan hierarki sumber yang beragam, mulai dari legislator yang bersikap kritis, penjas kebijakan, hingga elite DPR yang cenderung mendukung, sehingga berita tampak berimbang secara struktural.

Skrip: Wartawan menggunakan alur penyampaian yang bertahap dan sistematis. Narasi diawali dengan respons kehati-hatian Komisi X terhadap usulan izin tambang bagi perguruan tinggi, kemudian bergerak pada rencana tindak lanjut berupa rapat dengan Mendiktisaintek. Setelah itu, berita memperluas konteks dengan menguraikan latar belakang kebijakan RUU Minerba, posisi Baleg DPR, serta alasan pemerintah mendorong perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Alur cerita ditutup dengan sikap Dasco dan peta persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Pola ini membuat pembaca memahami isu dari tingkat wacana awal, proses politik, hingga konsolidasi sikap di parlemen.

Tematik: Unsur tematik tampak dari tema besar yang dibangun, yaitu tarik-menarik antara kepentingan pendidikan dan potensi orientasi bisnis dalam kebijakan izin tambang bagi perguruan tinggi. Wartawan menyusun hubungan antar gagasan secara konsisten: kehati-hatian Komisi X diposisikan sebagai pengingat tujuan utama pendidikan, sementara pemerintah dan Baleg DPR menekankan aspek pemerataan pengelolaan sumber daya alam dan kebutuhan anggaran pendidikan. Tema ini diperkuat dengan pengulangan ide bahwa izin tambang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun tetap dibayangi kekhawatiran bahwa bisnis dapat mendominasi arah kebijakan. Keseluruhan teks membentuk wacana bahwa kebijakan tersebut masih bersifat

problematis dan memerlukan kajian lebih lanjut.

Retoris: Terlihat dari pilihan kata dan penekanan tertentu yang digunakan wartawan melalui kutipan narasumber. Ungkapan Lalu Hadrian Irfani seperti “jangan sampai bisnisnya lebih tinggi dibanding tujuan utama pendidikan” menekankan kekhawatiran normatif dan etis. Sebaliknya, pernyataan Bob Hasan dan Sufmi Dasco Ahmad menggunakan diksi yang bersifat menenangkan dan rasional, seperti “memberikan peluang” dan “tidak bermasalah”, untuk menormalkan kebijakan tersebut. Penempatan data tentang persetujuan seluruh fraksi DPR juga berfungsi sebagai penekanan bahwa usulan ini memiliki legitimasi politik yang kuat, meskipun masih menyisakan catatan kritis. Kombinasi retorik ini membingkai isu sebagai kebijakan yang sah secara politik, tetapi belum sepenuhnya tuntas secara substansi pendidikan.

Berita *Tempo.co* ini membingkai izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang sah secara politik namun masih problematis secara substansi pendidikan. Sikap kehati-hatian Lalu Hadrian Irfani dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditempatkan di awal untuk menegaskan kekhawatiran agar orientasi bisnis tidak melampaui tujuan utama pendidikan. Di sisi lain, penjelasan Bob Hasan dan Sufmi Dasco Ahmad menormalisasi kebijakan dalam kerangka pemerataan sumber daya dan dukungan anggaran pendidikan. Struktur ini menghadirkan keseimbangan antara legitimasi politik dan catatan kritis normatif. Secara keseluruhan, teks membangun makna bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian mendalam agar tidak menggeser orientasi dasar institusi pendidikan.

3. Universitas Padjadjaran Merespons Positif Izin Tambang buat Kampus

Sintaksis: Dalam berita ini tampak dari cara *Tempo.co* menempatkan respons Universitas Padjadjaran sebagai fokus utama sejak judul dan paragraf awal. Berita dibuka dengan penilaian positif Unpad terhadap rencana izin tambang bagi perguruan tinggi, sehingga pembaca sejak awal diarahkan pada sudut pandang institusi kampus yang relatif terbuka dan rasional. Kutipan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Pemasaran Rizky Abdulah menjadi sumber dominan, memperkuat otoritas akademik dalam menilai kebijakan tersebut. Struktur berita kemudian diperluas dengan menghadirkan pernyataan

pejabat internal Unpad lainnya serta pandangan dari ITB, sehingga secara sintaksis berita disusun dengan kombinasi sumber institusional dan akademik untuk membangun kesan kehati-hatian dan pertimbangan ilmiah.

Skrip: Wartawan menyusun alur cerita secara bertahap dari sikap awal yang cenderung positif menuju sikap yang lebih reflektif dan berhati-hati. Narasi dimulai dari pemahaman Unpad terhadap logika kebijakan pemerintah, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kapasitas akademik dan pengalaman kampus di bidang pertambangan. Setelah itu, alur bergeser pada penegasan bahwa Unpad belum mengambil keputusan untuk terlibat langsung, lalu diperluas dengan konteks regulasi RUU Minerba dan preseden pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan. Bagian akhir berita diisi dengan pandangan kritis dan teknis dari ITB, yang menyoroti tantangan pendanaan dan keberlanjutan bisnis tambang. Pola ini membuat pembaca mengikuti alur dari optimisme awal menuju pertimbangan risiko yang lebih kompleks.

Tematik: Tema besar yang dibangun yaitu kesiapan dan kehati-hatian perguruan tinggi dalam merespons kebijakan izin tambang. Wartawan secara konsisten mengaitkan gagasan bahwa kampus memiliki kapasitas keilmuan di bidang pertambangan dengan kewajiban moral untuk tetap mengutamakan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tema ini diperkuat dengan pengulangan ide “belum memutuskan” dan “perlu mempertimbangkan manfaat dan mudarat”, yang menempatkan perguruan tinggi bukan sebagai aktor bisnis semata, melainkan sebagai institusi akademik yang harus menjaga netralitas dan dampak sosial. Dengan demikian, teks berita membangun relasi antar gagasan yang menekankan keseimbangan antara peluang ekonomi dan tanggung jawab pendidikan.

Retoris: Unsur ini tampak dari pemilihan diksi dan penekanan tertentu dalam kutipan narasumber. Ungkapan seperti “dapat dimengerti”, “pemikiran yang matang”, dan “sangat berpengalaman” berfungsi menegaskan legitimasi keilmuan dan rasionalitas sikap Unpad. Namun, penekanan retorik juga muncul melalui kata-kata “berhati-hati”, “manfaat dan mudarat”, serta pertanyaan retorik dari akademisi ITB mengenai kemampuan pendanaan dan fluktuasi harga komoditas. Kontras retorik ini memperkuat bingkai bahwa meskipun secara akademik perguruan tinggi mampu, pengelolaan tambang tetap sarat risiko.

Dengan cara ini, berita menekankan bahwa respons positif kampus tidak identik dengan persetujuan penuh, melainkan sikap terbuka yang disertai kewaspadaan kritis.

Berita *Tempo.co* ini membingkai respons Universitas Padjadjaran sebagai sikap terbuka namun tetap berhati-hati terhadap wacana izin tambang bagi perguruan tinggi. Pernyataan Wakil Rektor Rizky Abdulah ditempatkan dominan untuk menegaskan bahwa secara akademik kebijakan tersebut dapat dipahami dan dinilai secara rasional. Namun, alur pemberitaan bergerak dari nada positif menuju pertimbangan risiko, termasuk aspek pendanaan, keberlanjutan bisnis, serta konteks revisi Undang-Undang Minerba. Kehadiran pandangan teknis dari Institut Teknologi Bandung memperkuat dimensi kehati-hatian dan kompleksitas pengelolaan tambang. Secara keseluruhan, teks menekankan keseimbangan antara kapasitas keilmuan kampus dan tanggung jawab moral pendidikan, sehingga respons positif tidak dimaknai sebagai persetujuan tanpa syarat, melainkan sebagai sikap terbuka yang disertai kewaspadaan kritis.

4. Serikat Pekerja Kampus Tolak Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi

Sintaksis: Unsur sintaktis berita ini terlihat dari penempatan sikap penolakan Serikat Pekerja Kampus (SPK) sebagai fokus utama di awal teks. Judul dan paragraf pembuka langsung menegaskan adanya resistensi terhadap wacana izin tambang bagi perguruan tinggi, dengan kutipan singkat “Kami menolak” dari Ketua SPK Dhia Al Uyun yang berfungsi sebagai penegasan sikap. Setelah itu, wartawan menyusun fakta dengan menghadirkan alasan-alasan normatif dan struktural dari SPK, lalu menyeimbangkannya dengan pernyataan Ketua Baleg DPR Bob Hasan serta pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi. Struktur ini menunjukkan hierarki sumber yang diawali oleh kelompok penolak kebijakan, kemudian diikuti oleh pembuat kebijakan dan pemerintah sebagai pihak yang memberi legitimasi.

Skrip: Pada unsur skrip, alur berita disusun dari pernyataan sikap penolakan menuju argumentasi yang lebih luas dan kontekstual. Narasi dimulai dari sikap resmi SPK, lalu berkembang pada penjelasan alasan penolakan seperti

potensi konflik kepentingan, ancaman terhadap peran kampus dalam isu lingkungan, serta risiko pembatasan kebebasan akademik. Setelah itu, alur berpindah pada kritik terhadap proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa dan tertutup. Bagian akhir berita menghadirkan respons dari DPR dan pemerintah yang menempatkan kebijakan ini sebagai wacana dan peluang peningkatan mutu pendidikan. Pola ini membawa pembaca dari sikap oposisi masyarakat kampus menuju klarifikasi dan pembelaan dari otoritas negara.

Skrip: Unsur tematik tampak dari tema besar yang dibangun, yaitu pertentangan antara nilai-nilai akademik dan logika bisnis dalam kebijakan izin tambang. Wartawan secara konsisten mengaitkan penolakan SPK dengan isu konflik kepentingan, keberlanjutan lingkungan, kebebasan akademik, dan kualitas demokrasi. Tema tersebut dikontraskan dengan narasi pemerintah dan DPR yang menekankan pemerataan hak pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan mutu pendidikan. Hubungan antar gagasan ini membentuk wacana bahwa izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut prinsip dasar pendidikan, tata kelola negara, dan partisipasi publik.

Retoris: Sementara itu, unsur retorik terlihat jelas dari pemilihan diksi dan kutipan yang bernada tegas dan kritis. Ungkapan seperti “kami menolak”, “cacat secara formal”, “mengekan kebebasan akademik”, serta “mencederai demokrasi” memberikan tekanan moral dan politis yang kuat terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, pernyataan Bob Hasan dan Togar M. Simatupang menggunakan bahasa yang lebih moderat seperti “memberikan peluang” dan “harus dikaji lebih dalam”, yang berfungsi meredam ketegangan dan menampilkan sikap pemerintah sebagai rasional dan terbuka. Kontras retorik ini membingkai isu sebagai arena konflik antara suara kritis masyarakat kampus dan narasi resmi negara yang masih membuka ruang diskusi.

Berita ini membingkai wacana izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai arena konflik terbuka antara komunitas kampus dan otoritas negara. Penolakan tegas dari Serikat Pekerja Kampus melalui pernyataan Dhia Al Uyun ditempatkan di awal untuk menegaskan resistensi berbasis nilai akademik, lingkungan, dan demokrasi. Argumentasi yang diangkat menyoroti potensi konflik kepentingan, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta kritik

terhadap proses legislasi yang dinilai terburu-buru. Di sisi lain, narasi dari Bob Hasan dan pejabat kementerian menempatkan kebijakan dalam kerangka peluang dan peningkatan mutu pendidikan. Kontras antara diksi penolakan yang keras dan bahasa pemerintah yang lebih moderat memperkuat *framing* bahwa isu ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan perdebatan mendasar tentang arah pendidikan dan tata kelola negara.

5. Unhas: Kampus Kelola Tambang Jadi Peluang Atasi Masalah Pembiayaan

Sintaksis: Dalam berita ini terlihat dari cara *Tempo.co* menonjolkan sikap positif Universitas Hasanuddin (Unhas) sejak paragraf pembuka. Berita diawali dengan pernyataan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas Adi Maulana yang secara eksplisit menyambut baik rencana izin konsesi tambang bagi kampus. Kutipan langsung Adi yang menekankan peluang pendanaan dan pengurangan beban negara ditempatkan sebagai sumber utama, sehingga memberi bobot legitimasi institusional. Struktur berita kemudian diperluas dengan penjelasan teknis, latar belakang regulasi dari Baleg DPR, serta diakhiri dengan pandangan kritis dari akademisi UGM. Susunan ini memperlihatkan strategi penyajian fakta yang memprioritaskan suara pendukung dari kampus, lalu menyeimbangkannya dengan kritik normatif di bagian akhir.

Skrip: Cara wartawan menyusun alur berita secara gradual dari optimisme menuju kompleksitas persoalan. Narasi dimulai dari respons positif Unhas yang melihat izin tambang sebagai peluang pembiayaan dan pengembangan riset. Alur kemudian berkembang dengan uraian panjang mengenai keterkaitan industri tambang dengan berbagai disiplin ilmu, yang memperkuat argumen bahwa kampus memiliki kapasitas akademik untuk terlibat. Setelah itu, wartawan menggeser cerita pada tantangan-tantangan yang diakui sendiri oleh pihak Unhas, seperti kebutuhan modal besar, manajemen profesional, dan risiko lingkungan. Di bagian akhir, konteks politik RUU Minerba dan kritik dari Herlambang Perdana Wiratraman disajikan sebagai penutup, sehingga pembaca diajak melihat isu ini dari sisi peluang sekaligus kontroversinya.

Tematik: Pembahasan pokok tampak dari tema besar yang dibangun, yakni kampus sebagai aktor potensial dalam pengelolaan tambang demi pembiayaan

pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun tetap berada dalam pusaran dilema akademik dan etika. Wartawan secara konsisten mengaitkan izin tambang dengan isu pendanaan perguruan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan kontribusi ke industri. Tema tersebut kemudian dipertautkan dengan syarat-syarat profesionalisme, pengalaman, serta penerapan konsep green mining sebagai prasyarat moral dan teknis. Pada saat yang sama, tema tandingan dimunculkan melalui kritik bahwa kampus bukan entitas bisnis dan keterlibatan dalam tambang berpotensi mencederai muruah akademik. Hubungan antar gagasan ini membentuk wacana tarik-menarik antara pragmatisme ekonomi dan idealisme pendidikan.

Retoris: Aspek retorik pada berita ini terlihat dari pemilihan diksi dan penekanan makna dalam kutipan narasumber. Pernyataan Adi Maulana menggunakan bahasa afirmatif seperti “peluang”, “lebih profesional”, dan “berkelanjutan” untuk menegaskan kesiapan dan optimisme kampus. Uraian rinci mengenai disiplin ilmu yang terlibat dalam industri tambang berfungsi sebagai strategi retorik untuk menunjukkan kompleksitas ilmiah dan kapasitas akademik Unhas. Sebaliknya, kritik Herlambang Perdana Wiratraman memakai diksi bernada moral dan politis seperti “mencederai muruah akademik”, “kerusakan lingkungan”, dan “kepentingan oligarki” yang memberi tekanan nilai dan ideologis. Kontras retorik ini membingkai isu izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang secara teknokratis tampak menjanjikan, tetapi secara etis dan politis tetap problematis.

Berita *Tempo.co* ini membingkai sikap Universitas Hasanuddin sebagai respons positif namun tetap berada dalam dilema etis terhadap wacana izin tambang bagi perguruan tinggi. Pernyataan Adi Maulana ditempatkan dominan untuk menegaskan peluang pendanaan, penguatan riset, dan profesionalisme kampus dalam kerangka revisi Undang-Undang Minerba. Narasi kemudian bergerak dari optimisme menuju pengakuan atas tantangan modal, manajemen, dan risiko lingkungan, sehingga isu tidak diposisikan secara hitam-putih. Kritik dari akademisi Universitas Gadjah Mada menghadirkan dimensi moral dan politik yang mempertanyakan muruah akademik serta potensi konflik kepentingan. Secara keseluruhan, teks membangun wacana tarik-menarik antara pragmatisme ekonomi dan idealisme pendidikan dalam melihat peran kampus di

sektor pertambangan.

6. Izin Tambang untuk Kampus Disebut Bisa Turukan UKT, BEM SI: Kami Tidak Bodoh

Sintaksis: Unsur sintaksis dalam berita ini terlihat dari penempatan sikap penolakan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai titik tekan utama sejak awal teks. Judul dan paragraf pembuka langsung menampilkan penolakan tegas Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, dengan kutipan bernada keras yang memberi kesan konfrontatif. Wartawan menyusun fakta dengan memprioritaskan suara mahasiswa sebagai aktor utama, lalu menghadirkan pernyataan lanjutan yang memperkuat argumen penolakan tersebut. Setelah itu, struktur berita dilengkapi dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Ketua APTISI, dan Mendiktisaintek, yang berfungsi sebagai pembanding dan penyeimbang. Susunan ini menunjukkan bahwa meskipun suara pemerintah dan pemangku kebijakan dihadirkan, bingkai utama tetap diletakkan pada resistensi mahasiswa.

Skrip: alur berita disusun secara progresif dari ekspresi penolakan emosional menuju konteks kebijakan yang lebih luas. Narasi diawali dengan kritik tajam BEM SI terhadap motif pemerintah, lalu berkembang pada tuduhan bahwa kebijakan ini merupakan upaya menjinakkan sikap kritis kampus. Alur kemudian berlanjut pada kekecewaan Satria terhadap pimpinan perguruan tinggi yang dinilai mendukung wacana tersebut. Setelah sikap oposisi mahasiswa disampaikan secara lengkap, wartawan menggeser cerita ke respons pejabat negara dan pemangku kepentingan pendidikan yang memandang izin tambang sebagai solusi pembiayaan. Bagian akhir ditutup dengan sikap Mendiktisaintek yang memilih tidak berkomentar, sehingga alur berita membentuk perjalanan dari konflik, pembelaan kebijakan, hingga ketidakpastian sikap pemerintah.

Tematik: Pembahasan pokok tampak dari tema besar yang dibangun, yakni pertentangan antara independensi dan marwah pendidikan tinggi dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan negara. Wartawan secara konsisten mengaitkan izin tambang dengan dugaan upaya pemerintah meredam kritik kampus, bukan semata persoalan pembiayaan pendidikan. Tema ini dipertegas melalui relasi antar gagasan: penurunan biaya kuliah diposisikan sebagai dalih,

sementara kontrol politik atas kampus menjadi isu substantif. Tema tandingan muncul melalui pernyataan DPR dan APTISI yang memaknai kebijakan ini sebagai alternatif pendanaan dan solusi praktis bagi perguruan tinggi. Dengan demikian, teks membangun wacana konflik ideologis antara kampus sebagai ruang kritis dan kampus sebagai entitas ekonomi.

Retoris: Sangat menonjol melalui pilihan diksi yang bernada tajam dan provokatif. Ungkapan seperti “kami tak bodoh”, “akal-akalan belaka”, “musuh negara”, serta “marwah dan independensi pendidikan tinggi digadaikan” memberikan tekanan emosional dan politis yang kuat, sekaligus membangun citra perlawanan mahasiswa. Di sisi lain, pernyataan Dasco dan Budi Djatmiko menggunakan bahasa yang lebih teknokratis dan persuasif, seperti “alternatif pendanaan” dan “untuk operasional kampus”, yang berfungsi menormalkan kebijakan tersebut. Kontras retorik ini membingkai isu izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai arena pertarungan wacana antara kritik keras mahasiswa dan narasi rasional-pragmatis pemerintah, dengan kecenderungan berita menegaskan ketegangan dan konflik nilai di antara keduanya.

Berita ini membingkai wacana izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai konflik ideologis antara gerakan mahasiswa dan otoritas negara. Penolakan tegas Aliansi BEM Seluruh Indonesia melalui pernyataan Satria Naufal ditempatkan dominan sejak awal, sehingga resistensi mahasiswa menjadi poros utama narasi. Argumen yang dikedepankan menyoroti dugaan upaya meredam sikap kritis kampus dan ancaman terhadap marwah serta independensi pendidikan tinggi. Di sisi lain, pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia menghadirkan *framing* alternatif bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi pendanaan yang rasional. Dengan kontras diksi yang tajam antara kritik emosional mahasiswa dan bahasa teknokratis pemerintah, teks menegaskan ketegangan nilai antara kampus sebagai ruang kritis dan kampus sebagai entitas ekonomi.

7. Tolak Izin Kelola Tambang, PGI Soroti Biaya dan Risiko Tinggi Industri Kreatif

Sintaksis: Unsur Sintaksis berita ini tampak dari penempatan sikap penolakan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebagai fokus utama

sejak awal teks. Berita dibuka dengan pernyataan Ketua Umum PGI Jacklevyn Fritz Manuputty yang menekankan aspek biaya dan risiko tinggi dalam pengelolaan tambang, sehingga sejak paragraf pertama pembaca diarahkan pada bingkai kehati-hatian dan penolakan. Kutipan langsung Jacky mendominasi bagian awal dan tengah berita, memperkuat otoritas moral dan institusional PGI sebagai organisasi keagamaan. Struktur berita kemudian dilengkapi dengan konteks kebijakan RUU Minerba serta pandangan ekonom dari CELIOS sebagai penguat argumen penolakan, sehingga secara Sintaksis susunan fakta lebih menonjolkan sisi kritis dibanding legitimasi kebijakan.

Skrip: Wartawan menyusun alur berita secara argumentatif dan bertahap. Narasi dimulai dari sikap resmi PGI yang menolak tawaran pemerintah, lalu berkembang pada penjelasan hasil kajian internal yang menyoroti modal besar, risiko tinggi, dan keterbatasan kapasitas organisasi. Alur kemudian diarahkan pada potensi konflik sosial, khususnya dengan masyarakat adat, yang selama ini justru kerap didampingi oleh PGI. Setelah itu, wartawan memberikan konteks kebijakan melalui penjelasan Pasal 51A RUU Minerba, sebelum menutup cerita dengan kritik dari ekonom yang memperkuat narasi risiko finansial. Pola ini membawa pembaca dari penolakan normatif menuju rasionalisasi ekonomi dan sosial atas sikap tersebut.

Tematik: Tema yang dibangun pada berita ini yakni ketidakcocokan organisasi keagamaan dengan industri ekstraktif pertambangan. Wartawan secara konsisten mengaitkan pengelolaan tambang dengan risiko finansial, sengketa hukum, dampak lingkungan, serta konflik dengan masyarakat adat. Tema ini diperkuat dengan relasi antar gagasan bahwa PGI memiliki peran advokatif terhadap kelompok rentan, sehingga keterlibatan dalam tambang justru bertentangan dengan nilai dan mandat organisasinya. Kehadiran kritik dari Bhima Yudhistira memperluas tema bahwa bukan hanya secara moral, tetapi juga secara ekonomi, konsesi tambang berpotensi merugikan kampus dan ormas keagamaan. Dengan demikian, teks membangun wacana bahwa kebijakan tersebut problematis dari berbagai sisi.

Retoris: pemilihan diksi dan penekanan makna dalam kutipan narasumber. Ungkapan seperti “modal besar sekali”, “risiko besar”, “tidak memiliki kapasitas”, dan “keuangan kampus lebih berdarah-darah lagi” memberikan

tekanan kuat pada bahaya dan kerugian yang mungkin timbul. Rujukan berulang pada masyarakat adat dan industri “ekstraktif” juga memperkuat asosiasi negatif terhadap pertambangan. Strategi retorik ini membingkai penolakan PGI bukan sebagai sikap emosional, melainkan sebagai keputusan rasional, etis, dan berbasis pengalaman advokasi. Dengan cara tersebut, berita menekankan bahwa izin tambang bagi ormas keagamaan dan perguruan tinggi lebih banyak menghadirkan risiko daripada manfaat.

Berita ini membingkai penolakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terhadap izin tambang sebagai sikap rasional dan berbasis nilai advokatif. Pernyataan Ketua Umum Jacklevyn Fritz Manuputty ditempatkan dominan untuk menegaskan besarnya modal, risiko finansial, serta potensi konflik sosial yang menyertai industri ekstraktif. Narasi diperkuat dengan konteks revisi Undang-Undang Minerba dan kritik ekonom dari Center of Economic and Law Studies, sehingga penolakan tidak hanya bernuansa moral, tetapi juga ekonomis dan struktural. Penekanan pada potensi sengketa dengan masyarakat adat serta ketidaksesuaian mandat organisasi memperjelas adanya ketegangan antara nilai keagamaan dan logika bisnis tambang. Secara keseluruhan, teks membangun wacana bahwa konsesi tambang bagi ormas keagamaan dan perguruan tinggi lebih sarat risiko daripada manfaat.

8. Wakil Ketua MPR Nilai Perguruan Tinggi Bakal Pikir-Pikir Sebelum Terima Konsensi Tambang

Sintaksis: Unsur Sintaksis dalam berita ini terlihat dari penempatan pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebagai sumber utama yang mendominasi struktur berita. Paragraf awal hingga pertengahan diisi dengan penjelasan Eddy yang menekankan rasionalitas dan kehati-hatian perguruan tinggi dalam menyikapi peluang izin tambang. Kutipan-kutipan Eddy disusun berurutan untuk membangun argumen bahwa kampus tidak akan gegabah mengambil keputusan. Struktur berita kemudian diperkuat dengan konteks regulasi RUU Minerba serta ditutup dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pembanding yang menegaskan sisi peluang pendanaan. Susunan ini menunjukkan *framing* yang relatif moderat dengan menempatkan pandangan kehati-hatian sebagai bingkai utama.

Skrip: Alur berita disusun secara argumentatif dan reflektif. Narasi dimulai dari keyakinan Eddy bahwa perguruan tinggi akan berpikir dua kali sebelum mengelola tambang, lalu berkembang pada penjelasan mengenai karakter akademisi yang berbasis analisis ilmiah dan rasionalitas. Alur kemudian bergerak pada potensi risiko reputasi, dampak lingkungan, dan kebutuhan kajian akademik sebagai prasyarat pengambilan keputusan. Setelah itu, wartawan mengaitkan isu tersebut dengan kebutuhan pendanaan kampus dan peluang yang ditawarkan negara. Bagian akhir berita memperluas konteks dengan menjelaskan ketentuan dalam RUU Minerba serta menghadirkan pandangan Dasco, sehingga alur cerita membentuk keseimbangan antara kehati-hatian dan pragmatisme kebijakan.

Tematik: Tema yang diambil pada berita ini adalah kehati-hatian perguruan tinggi dalam menghadapi peluang ekonomi yang berpotensi menjauhkan mereka dari misi akademik. Wartawan secara konsisten mengaitkan izin tambang dengan isu reputasi, tujuan pendidikan, dan kapasitas kelembagaan kampus. Tema ini dipertegas melalui relasi antar gagasan bahwa meskipun kampus membutuhkan pendanaan besar, pengelolaan tambang bukanlah keputusan sederhana dan memerlukan kajian akademik mendalam. Tema tandingan muncul melalui gagasan bahwa izin tambang dapat menjadi solusi pendanaan, namun tetap dibingkai sebagai opsi yang harus ditimbang secara cermat, bukan peluang yang otomatis diterima.

Retoris: Retoris terlihat dari pemilihan diksi yang bernada rasional dan menenangkan. Ungkapan seperti “berpikir dua kali”, “penuh kehati-hatian”, “kajian akademik”, dan “menimbang dengan cermat” berfungsi menekankan citra perguruan tinggi sebagai institusi yang rasional dan bertanggung jawab. Penekanan pada risiko degradasi reputasi dan dampak lingkungan juga memperkuat argumen kehati-hatian. Di sisi lain, pernyataan Dasco menggunakan bahasa pragmatis seperti “mencarikan dana” dan “memberikan manfaat”, yang berfungsi sebagai penyeimbang retoris. Kombinasi ini membingkai isu izin tambang bagi perguruan tinggi sebagai kebijakan yang terbuka peluangnya, tetapi sarat pertimbangan etis, akademik, dan reputasional.

Berita ini membingkai isu izin tambang bagi perguruan tinggi melalui penekanan pada sikap kehati-hatian yang disuarakan Wakil Ketua MPR Eddy

Soeparno sebagai sumber utama. Struktur teks didominasi argumentasi bahwa kampus akan mempertimbangkan aspek rasionalitas, reputasi, dampak lingkungan, dan kajian akademik sebelum mengambil keputusan. Narasi kemudian diperluas dengan konteks regulasi Undang-Undang Minerba serta ditutup dengan pandangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyoroti peluang pendanaan. Secara tematik dan retorik, berita menempatkan perguruan tinggi sebagai institusi rasional yang tidak gegabah, sekaligus membuka ruang pragmatis bahwa izin tambang dapat menjadi opsi pendanaan, tetapi harus ditimbang secara etis, akademik, dan reputasional.

9. Beberapa Rektor Bersuara Soal Pemberian Izin Tambang untuk Kampus

Sintaktis: dalam berita ini tampak dari cara *Tempo.co* menyusun fakta dengan menempatkan polemik kebijakan sebagai bingkai awal sebelum menghadirkan suara para rektor. Paragraf pembuka terlebih dahulu memaparkan konteks kebijakan RUU Minerba dan kritik dari Walhi serta Serikat Pekerja Kampus, sehingga pembaca diarahkan pada suasana kontroversial sejak awal. Setelah itu, pernyataan Ketua Baleg DPR Bob Hasan disajikan sebagai legitimasi kebijakan negara. Baru kemudian wartawan menyusun deretan respons rektor dari berbagai perguruan tinggi dengan posisi yang beragam. Mulai dari mendukung, bersyarat, hingga menolak tegas. Struktur ini menunjukkan bahwa suara rektor diposisikan sebagai respons terhadap kebijakan yang sudah lebih dulu diperdebatkan, bukan sebagai aktor utama penggagas wacana.

Skrip: alur berita disusun dengan pola eksplanatif-komparatif. Narasi diawali dari latar belakang kebijakan dan kritik masyarakat sipil, lalu mengajukan pertanyaan transisi “lantas apa kata para rektor”. Setelah itu, wartawan menyajikan satu per satu pandangan rektor secara berurutan, mulai dari yang melihat peluang dan manfaat, yang bersikap hati-hati, hingga yang secara terbuka menolak. Alur ini tidak dibangun secara kronologis, melainkan tematik, sehingga pembaca diajak membandingkan sikap antar pimpinan kampus. Penutup berita dikuatkan dengan penolakan keras Rektor UII, yang secara retorik dan substantif menjadi klimaks dari rangkaian pendapat yang disajikan.

Tematik: Tema yang dibangun adalah sikap perguruan tinggi terhadap izin tambang dan dilema antara peluang pendanaan dan integritas akademik. Wartawan menautkan berbagai proposisi: izin tambang sebagai peluang pengembangan riset, sumber pendanaan, dan peningkatan kompetensi mahasiswa, berhadapan dengan risiko kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, degradasi independensi kampus, serta pergeseran misi pendidikan. Hubungan antarparagraf membentuk wacana bahwa tidak ada sikap tunggal di kalangan rektor, tetapi terdapat spektrum pandangan dari pragmatis hingga idealis. Tema ini secara implisit menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih problematis dan belum menemukan konsensus di dunia akademik.

Retoris: Kalimat-kalimat retorik pada berita ini tampak dari pilihan diksi, metafora, dan penekanan nilai dalam kutipan para rektor. Bahasa yang digunakan rektor pendukung cenderung normatif dan rasional, seperti “peluang”, “pengembangan kualitas”, dan “kemitraan berkelanjutan”. Sebaliknya, rektor yang menolak menggunakan diksi bernuansa moral dan kultural seperti “marwah akademik”, “integritas”, “logika bisnis yang berseberangan”, hingga metafora Jawa “milik nggendong lali” dan ungkapan “uang itu menghipnotis”. Kontras retorik ini memperkuat *framing* bahwa perdebatan izin tambang bagi perguruan tinggi bukan sekadar soal teknis kebijakan, melainkan pertarungan nilai antara orientasi ekonomi dan idealisme pendidikan tinggi.

Berita *Tempo.co* membingkai polemik izin tambang dengan terlebih dahulu menempatkan konteks kontroversi RUU Minerba serta kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Serikat Pekerja Kampus, sehingga suasana debat sudah terbentuk sebelum suara rektor dimunculkan. Pernyataan Ketua Baleg DPR Bob Hasan disajikan sebagai legitimasi kebijakan, lalu diikuti spektrum respons para rektor—dari mendukung, bersyarat, hingga menolak tegas—yang diposisikan sebagai tanggapan atas kebijakan yang telah diperdebatkan. Secara retorik, teks menonjolkan dilema antara peluang pendanaan dan pengembangan riset dengan risiko kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, serta degradasi integritas akademik. Kontras diksi antara kubu pragmatis dan idealis mempertegas bahwa isu ini bukan semata persoalan teknis kebijakan, melainkan pertarungan nilai antara orientasi ekonomi dan marwah

pendidikan tinggi.

10. UU Dinilai Bisa Bikin Kampus Disetir Perusahaan Tambang Minerba

Sintaksis: Dalam berita ini terlihat dari penempatan kekhawatiran pegiat kebijakan publik sebagai fokus utama sejak paragraf pembuka. Berita diawali dengan pernyataan Policy Strategist CERAH, Sartika Nur Shalati, yang menyoroti potensi hilangnya independensi perguruan tinggi pasca pengesahan revisi UU Minerba. Kutipan Sartika mendominasi struktur berita, diperkuat dengan rujukan langsung pada pasal-pasal kunci dalam UU Minerba (Pasal 51A dan 60A). Pernyataan pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ditempatkan di bagian akhir sebagai pembanding dan legitimasi kebijakan. Susunan ini menunjukkan bahwa secara struktural berita lebih memprioritaskan suara kritis masyarakat sipil dibandingkan narasi resmi negara.

Skrip: alur berita disusun secara argumentatif dan berlapis. Narasi dimulai dari kekhawatiran umum tentang independensi perguruan tinggi, lalu bergerak ke penjelasan teknis mengenai perubahan pasal dalam UU Minerba yang menempatkan kampus sebagai penerima manfaat pengelolaan tambang. Alur kemudian diperdalam dengan penjelasan mekanisme keuntungan dan potensi relasi kuasa antara perusahaan tambang dan perguruan tinggi. Setelah itu, wartawan mengaitkan isu ini dengan pemangkasan anggaran pendidikan dan risiko terhambatnya transisi energi. Bagian akhir berita ditutup dengan penjelasan pemerintah tentang tujuan pemerataan pengelolaan sumber daya alam. Pola ini membawa pembaca dari kekhawatiran normatif menuju konteks kebijakan dan justifikasi negara.

Tematik: Tampak dari tema besar yang dibangun, yakni ancaman terhadap independensi akademik dan peran strategis perguruan tinggi dalam isu keberlanjutan dan transisi energi. Wartawan secara konsisten mengaitkan keterlibatan kampus dalam skema keuntungan tambang dengan risiko konflik kepentingan, pembungkaman kritik ilmiah, dan pelemahan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi. Tema ini diperluas dengan hubungan antar gagasan tentang dominasi industri batu bara, pemangkasan anggaran pendidikan, serta potensi terhambatnya riset energi terbarukan. Dengan demikian, berita membingkai UU

Minerba bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi sebagai kebijakan yang berdampak sistemik terhadap arah ilmu pengetahuan, kebebasan akademik, dan masa depan transisi energi.

Retoris: Sementara itu, unsur retorik terlihat kuat melalui pemilihan diksi dan penekanan nilai dalam kutipan narasumber. Ungkapan seperti “dibungkam”, “dipaksa mendukung”, “rentan disetir”, dan “pendonor yang menyetir perguruan tinggi” membangun citra ancaman dan ketimpangan relasi kuasa antara kampus dan industri tambang. Penekanan pada istilah “energi fosil”, “krisis iklim”, dan “konflik kepentingan” memperkuat asosiasi negatif terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, pernyataan Bahlil menggunakan diksi populis seperti “rasa keadilan” dan “pemerataan” untuk membingkai kebijakan sebagai langkah korektif. Kontras retorik ini menegaskan *framing* berita sebagai pertarungan wacana antara kepentingan keberlanjutan dan kebebasan akademik versus logika pemerataan ekonomi dan kekuasaan negara.

Berita ini membingkai revisi Undang-Undang Minerba melalui penekanan pada kekhawatiran masyarakat sipil, dengan pernyataan Policy Strategist CERAH Sartika Nur Shalati ditempatkan dominan sejak awal untuk menyoroti ancaman terhadap independensi perguruan tinggi, terutama melalui Pasal 51A dan 60A. Struktur teks memprioritaskan suara kritis sebelum menghadirkan penjelasan pemerintah oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai legitimasi kebijakan di bagian akhir. Secara tematik, berita menautkan keterlibatan kampus dalam pengelolaan tambang dengan risiko konflik kepentingan, pelemahan Tridarma, dominasi energi fosil, serta potensi terhambatnya transisi energi. Pilihan diksi seperti “dibungkam”, “rentan disetir”, dan “konflik kepentingan” memperkuat kesan ancaman struktural, sementara narasi pemerintah menonjolkan “pemerataan” dan “keadilan”, sehingga keseluruhan teks tampil sebagai arena pertarungan wacana antara keberlanjutan dan kebebasan akademik versus logika distribusi ekonomi negara.

Analisis Framing Tempo.co

Sintaksis: Berita Tempo cenderung memulai berita dengan narasumber yang kritis atau menolak kebijakan, seperti mahasiswa, pegiat lingkungan, atau organisasi keagamaan. Pihak pro atau pemerintah biasanya ditempatkan di bagian tengah atau akhir sebagai penyeimbang. Penempatan ini membuat

pembaca terlebih dahulu merasakan risiko, kekhawatiran, dan kontroversi, sebelum diperkenalkan pada tujuan atau pembelaan resmi kebijakan. Struktur seperti ini menekankan dinamika konflik dan konsekuensi dari kebijakan, bukan sekadar laporan teknis.

Skrip: Berita disusun secara bertahap, dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan dampak potensial, analisis risiko, dan diakhiri dengan tanggapan pihak lain. Tempo kerap menghadirkan lapisan-lapisan argumen, mulai dari risiko terhadap independensi institusi, dampak sosial, lingkungan, hingga implikasi ekonomi. Alur ini memungkinkan pembaca memahami kompleksitas isu secara mendalam dan menempatkan kebijakan dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar keputusan administratif.

Tematik: Tema yang dominan adalah risiko dan konsekuensi kebijakan, terutama terkait independensi akademik, konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan dampak jangka panjang bagi pendidikan dan masyarakat. Tempo menekankan ketegangan antara kepentingan ekonomi atau pemerintah dengan misi pendidikan dan keberlanjutan. Fokus ini mendorong pembaca mempertimbangkan bukan hanya manfaat finansial, tetapi juga dampak moral, sosial, dan lingkungan yang lebih luas dari setiap kebijakan yang diberitakan.

Retoris: Diksi yang digunakan menekankan risiko, kontroversi, dan ancaman, seperti “dibungkam”, “integritas akademik terancam”, atau “rentan disetir”. Kutipan langsung narasumber kritis sering ditempatkan sebagai inti pernyataan, memperkuat kesan objektivitas sekaligus membangun narasi kritis. Sementara itu, pihak pemerintah biasanya menggunakan bahasa normatif atau aspiratif, misalnya “pemerataan”, “keadilan”, dan “meningkatkan kualitas pendidikan”, menciptakan kontras retorik yang jelas antara kepentingan kritis masyarakat dan tujuan kebijakan resmi.

C. CNN Indonesia

1. Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang Seperti Ormas di RUU Minerba

Sintaksis: Secara Sintaksis, berita disusun dengan menempatkan usulan Badan Legislasi DPR sebagai fokus utama melalui judul yang menonjolkan keterlibatan perguruan tinggi dan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga sejak awal pembaca diarahkan pada isu perluasan aktor pengelola sumber daya

alam. Lead berita langsung mengutip pernyataan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, yang memberikan legitimasi politik terhadap usulan tersebut. Struktur berita didominasi oleh kutipan pejabat DPR, seperti Bob Hasan, Martin Manurung, dan Sufmi Dasco Ahmad, sementara suara dari pihak lain seperti akademisi, UMKM, masyarakat sipil, atau kelompok lingkungan tidak dimunculkan. Hal ini menunjukkan wartawan menyusun fakta dengan mengandalkan sumber resmi negara dan elite legislatif, sehingga sudut pandang yang muncul cenderung top-down dan institusional.

Skrip: Dari sisi skrip, berita disajikan dengan alur kronologis yang mengikuti jalannya proses legislasi, dimulai dari pengungkapan substansi perubahan RUU Minerba, kemudian berlanjut pada detail poin-poin revisi, situasi rapat Baleg, hingga rencana pengambilan keputusan. Pola penceritaan ini menyerupai laporan peristiwa (straight news) yang menekankan urutan kejadian dan aktivitas DPR. Namun, skrip berita juga menyisipkan unsur dramatik melalui penekanan bahwa rapat digelar tertutup dan di masa reses, tanpa penjelasan alasan mendesaknya pembahasan. Hal ini secara implisit membangun kesan adanya kejanggalan prosedural, meskipun tidak disertai penilaian eksplisit dari wartawan.

Tematik: Secara tematik, berita membangun tema besar tentang “pemerataan pengelolaan sumber daya alam demi kemaslahatan umat dan kedaulatan bangsa.” Tema ini diperkuat melalui pengulangan narasi prioritas pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM, serta dorongan hilirisasi untuk swasembada energi. Hubungan antarparagraf disusun koheren untuk menegaskan bahwa revisi UU Minerba diposisikan sebagai solusi atas masalah ketimpangan pengelolaan tambang dan tumpang tindih izin. Namun, tema kritis seperti risiko lingkungan, kapasitas perguruan tinggi dan UMKM dalam mengelola tambang, atau potensi konflik kepentingan tidak dikembangkan, sehingga wacana yang muncul lebih normatif dan pro-kebijakan.

Retoris: Dalam aspek retorik, wartawan menekankan fakta melalui pemilihan diksi dan detail tertentu, seperti penggunaan istilah “prioritas,” “kemaslahatan umat,” dan “kewibawaan bangsa” yang sarat makna ideologis dan nasionalistik. Penegasan bahwa rapat dilakukan secara tertutup dan tidak

masuk Prolegnas Prioritas juga menjadi penekanan simbolik yang memberi sinyal problem transparansi, meskipun disampaikan secara netral. Selain itu, pencantuman persentase “Loaded: 55.56%” dan sisipan visual seperti foto tambang Freeport berfungsi memperkuat kesan penting dan strategisnya sektor minerba. Secara keseluruhan, penekanan retorik dalam berita ini membingkai revisi UU Minerba sebagai agenda besar negara, dengan DPR sebagai aktor utama yang memiliki otoritas moral dan politik.

Pemberitaan ini disusun dengan menempatkan DPR sebagai aktor utama dalam wacana revisi UU Minerba, sehingga sudut pandang yang muncul cenderung berorientasi pada perspektif institusional dan elite politik. Alur penyajian mengikuti perkembangan proses legislasi dan menekankan pernyataan resmi para pejabat, yang memberi kesan legitimasi dan otoritas terhadap usulan perubahan kebijakan. Tema yang dibangun menyoroti pemerataan pengelolaan sumber daya alam serta kepentingan nasional, sehingga revisi undang-undang diposisikan sebagai solusi strategis bagi bangsa. Pada saat yang sama, isu-isu kritis seperti dampak lingkungan atau kapasitas aktor non-negara kurang mendapat ruang, sehingga pemberitaan tampak lebih normatif dan pro-kebijakan. Secara keseluruhan, konstruksi berita ini membingkai revisi UU Minerba sebagai agenda besar negara dengan DPR sebagai penggerak utama.

2. 4 Pasal Dinilai dalam Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba

Sintaksis: Secara sintaksis, berita ini disusun dengan menempatkan kritik koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) sebagai fokus utama sejak judul dan paragraf awal. Lead berita langsung menegaskan sikap penolakan PWYP terhadap pembahasan revisi UU Minerba yang dinilai kilat dan tidak transparan, sehingga sudut pandang kritis menjadi pintu masuk utama bagi pembaca. Struktur berita memadukan kutipan dari Koordinator Nasional PWYP Aryanto Nugroho dengan paparan detail pasal-pasal bermasalah dalam RUU Minerba, yang memberi kesan argumentatif dan berbasis data. Meski demikian, berita juga menyertakan pernyataan Ketua Baleg DPR Bob Hasan di bagian akhir, sehingga secara Sintaksis terjadi kontras antara suara masyarakat sipil dan elite legislatif, namun porsi kritik PWYP tetap lebih dominan dalam membingkai isu.

Skrip: Dari sisi Skrip, alur penceritaan dimulai dengan reaksi keras PWYP,

lalu bergerak ke penjelasan alasan kritik, seperti proses legislasi yang mendadak, minimnya akses terhadap Naskah Akademis, serta pembahasan yang dilakukan di masa reses. Setelah itu, wartawan menyajikan rincian pasal-pasal yang dianggap bermasalah satu per satu, sebelum menutup dengan penjelasan kronologi rapat Baleg DPR dan pernyataan resmi dari pimpinan Baleg. Pola ini menunjukkan strategi bercerita yang menempatkan problem dan kecurigaan publik terlebih dahulu, kemudian baru diikuti klarifikasi atau pembenaran dari DPR, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami proses revisi UU Minerba sebagai sesuatu yang dipersoalkan sejak awal.

Tematik: Secara Tematik, berita ini membangun tema besar tentang “ancaman demokrasi dan keberlanjutan akibat proses legislasi yang tidak transparan dan cenderung memuluskan kepentingan tertentu.” Tema tersebut diperkuat melalui narasi bahwa RUU Minerba tidak masuk Prolegnas, dibahas secara maraton, serta membuka peluang pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM. Hubungan antarparagraf disusun untuk menegaskan bahwa mekanisme “pemberian prioritas” dipandang PWYP sebagai bentuk jor-joran izin tambang yang berisiko terhadap lingkungan dan tata kelola SDA. Tema kesejahteraan rakyat yang dikemukakan DPR dihadirkan sebagai wacana tandingan, namun tidak dielaborasi secara mendalam, sehingga posisi kritis masyarakat sipil tetap menjadi kerangka tematik utama.

Retoris: Dalam aspek retorik, wartawan menekankan kritik melalui pemilihan diksi yang kuat seperti “karpet merah,” “kilat,” “dipaksakan,” dan “jor-joran izin tambang,” yang membangun kesan negatif terhadap proses revisi UU Minerba. Pengutipan langsung pernyataan Aryanto Nugroho dengan pertanyaan retorik “Revisi UU Minerba yang kilat ini untuk siapa?” menjadi penekanan simbolik atas dugaan adanya kepentingan tertentu di balik revisi. Selain itu, penyebutan jumlah anggota PWYP dan perincian pasal-pasal bermasalah berfungsi memperkuat legitimasi kritik. Sementara itu, pernyataan Bob Hasan tentang kemakmuran rakyat dan Pasal 33 UUD 1945 disajikan sebagai justifikasi normatif, namun secara retorik ditempatkan setelah rangkaian kritik, sehingga pembaca cenderung menangkapnya sebagai pembelaan yang datang belakangan.

Pemberitaan ini menempatkan kritik koalisi masyarakat sipil sebagai fokus utama sejak awal, sehingga pembaca langsung diarahkan pada sudut pandang yang mempertanyakan proses revisi UU Minerba. Alur penyajiannya dimulai dari reaksi dan argumentasi penolakan, disertai rincian pasal-pasal yang dianggap bermasalah, lalu diakhiri dengan tanggapan dari pihak DPR sebagai bentuk klarifikasi. Tema yang dibangun menekankan isu transparansi, akuntabilitas, dan potensi dampak terhadap tata kelola sumber daya alam, sehingga revisi undang-undang diposisikan sebagai kebijakan yang sarat persoalan. Pilihan bahasa yang digunakan juga memperkuat kesan kritis dan membangun nuansa kecurigaan terhadap proses legislasi yang berlangsung. Secara keseluruhan, pemberitaan ini membingkai revisi UU Minerba sebagai kebijakan yang menuai penolakan dan dipandang berisiko bagi demokrasi serta keberlanjutan.

3. Izin Tambang Ormas Dinilai Sogokan Bungkam, NU-Muhammadiyah Buka Suara

Sintaksis Secara sintaksis, berita ini disusun dengan menempatkan pernyataan kontroversial anggota Baleg DPD dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, sebagai fokus utama sejak paragraf pembuka. Lead berita langsung mengangkat tudingan bahwa pemberian IUPK kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi dalam RUU Minerba dianggap sebagai “sogokan” agar mereka tidak lagi kritis terhadap pemerintah. Struktur berita didominasi kutipan langsung Saleh yang bernada keras dan provokatif, lalu diimbangi dengan tanggapan dari perwakilan Muhammadiyah dan PBNU. Susunan ini menunjukkan pola adu wacana (*conflicting voices*) antara aktor politik dan aktor masyarakat sipil-keagamaan, sehingga pembaca disuguhi perdebatan terbuka tanpa kehadiran narasi penengah dari wartawan.

Skrip: Dari sisi skrip, alur penceritaan dimulai dengan tudingan Saleh dalam forum resmi RDPU, kemudian berkembang ke pertanyaan lanjutan tentang potensi hilangnya daya kritis ormas dan perguruan tinggi. Setelah konflik dibangun, wartawan menghadirkan respons dari Muhammadiyah yang menegaskan komitmen tetap kritis, lalu dilanjutkan dengan pandangan PBNU yang memberikan justifikasi normatif dan keagamaan atas kebijakan pemberian

IUPK. Pola ini menunjukkan strategi bercerita yang menempatkan kontroversi sebagai pusat cerita, kemudian diikuti klarifikasi dan pembelaan dari pihak-pihak yang dituding, sehingga berita bergerak dari konflik menuju rasionalisasi.

Tematik: Secara tematik, berita ini membangun tema besar tentang relasi kuasa antara negara, DPR, dan masyarakat sipil dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Tema “sogokan versus kemaslahatan” menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh paragraf, dengan pertanyaan utama apakah konsesi tambang berpotensi melemahkan independensi dan sikap kritis ormas serta perguruan tinggi. Pernyataan Saleh merepresentasikan kekhawatiran akan kooptasi kritik, sementara tanggapan Muhammadiyah dan PBNU membingkai kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak menghilangkan nilai moral, bahkan dianggap sah dan bermanfaat. Hubungan antarparagraf disusun untuk menunjukkan adanya benturan tafsir politik, etika, dan agama terhadap satu kebijakan yang sama.

Retoris: Dalam aspek retorik, wartawan menekankan konflik melalui penggunaan diksi yang kuat dan sensasional seperti “disogok,” “jangan kritik lagi pemerintah,” dan “pelaku yang nyogok itu termasuk DPR,” yang memberi tekanan emosional dan memancing perhatian pembaca. Kutipan langsung berulang dari Saleh memperkuat kesan tuduhan serius dan terbuka. Di sisi lain, retorika keagamaan yang digunakan Ulil Abshar Abdalla, seperti istilah “batil,” “hak,” dan “sogokan yang hasanah” berfungsi menormalkan kebijakan tersebut dalam kerangka fiqih Islam. Kontras retorik antara bahasa politik yang keras dan bahasa moral-keagamaan yang argumentatif membingkai isu ini sebagai perdebatan multidimensi, bukan sekadar persoalan teknis legislasi.

Pemberitaan ini menonjolkan pernyataan kontroversial seorang anggota legislatif sebagai titik awal, sehingga pembaca langsung diarahkan pada isu dugaan adanya motif politis di balik kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas dan perguruan tinggi. Struktur penyajiannya menghadirkan perdebatan terbuka antara aktor politik dan perwakilan organisasi keagamaan, dengan penekanan pada adu argumen tanpa banyak intervensi naratif dari wartawan. Alur cerita dibangun dari munculnya tuduhan, lalu diikuti respons dan pembelaan dari pihak yang merasa dituding, sehingga konflik menjadi pusat perhatian sebelum beralih ke rasionalisasi. Tema yang mengemuka berkisar

pada relasi kuasa, independensi masyarakat sipil, dan legitimasi moral kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, pemberitaan ini membingkai isu sebagai perdebatan multidimensi yang memadukan kepentingan politik, etika, dan agama dalam satu ruang wacana.

4. Rektor UII Tolak Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Sentil Fungsi Kampus

Sintaksis: Secara sintaksis, berita ini disusun dengan menempatkan sikap penolakan Rektor UII Yogyakarta, Fathul Wahid, sebagai fokus utama sejak lead. Judul dan paragraf pembuka langsung menegaskan posisi “menolak keras” usulan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, sehingga pembaca sejak awal diarahkan pada sudut pandang kritis dari kalangan akademik. Struktur berita didominasi oleh kutipan langsung Fathul yang panjang dan argumentatif, memuat alasan lingkungan, integritas akademik, hingga risiko korporatisasi kampus. Di bagian akhir, wartawan menyertakan pandangan yang berlawanan dari Rektor Unair Mohammad Nasih sebagai bentuk keberimbangan, namun secara proporsi dan penempatan, suara penolakan tetap lebih menonjol dan menjadi kerangka utama pemberitaan.

Skrip: Dari sisi skrip, alur penceritaan dimulai dari pernyataan penolakan, lalu berkembang ke penjabaran alasan-alasan normatif dan etis yang disusun secara berurutan (lingkungan, integritas akademik, independensi kampus, hingga misi pendidikan). Setelah argumen diperkuat dengan metafora dan kritik tajam, berita kemudian bergeser ke bagian “pro kontra” dengan menghadirkan pandangan kampus yang mendukung usulan tersebut. Pola ini menunjukkan strategi bercerita problem–argument–kontra–argumen, di mana konflik gagasan dibangun secara bertahap dan ditutup dengan pembandingan, namun tanpa sintesis atau penilaian eksplisit dari wartawan.

Tematik: Secara tematik, berita ini membangun tema besar tentang ancaman terhadap jati diri dan misi perguruan tinggi jika ditarik ke dalam logika industri ekstraktif. Tema ini dipertegas melalui gagasan bahwa kampus adalah ruang netral, nirlaba, dan penjaga etika keilmuan, yang berpotensi rusak jika terlibat dalam bisnis tambang. Isu lingkungan, independensi kritik, dan risiko elite capture menjadi subtema yang saling terhubung. Kehadiran pandangan

rektor Unair membentuk tema tandingan, yakni tambang sebagai solusi pembiayaan kampus, namun disajikan lebih sebagai respons pragmatis daripada kerangka utama, sehingga wacana kritis tetap mendominasi teks berita.

Retoris: Dalam aspek retorik, wartawan menekankan penolakan melalui pemilihan diksi dan metafora yang kuat dari narasumber, seperti “antisains,” “parau suaranya,” “melik nggendong lali,” serta “mencoreng reputasi kampus,” yang memperkuat kesan bahaya moral dan institusional. Pertanyaan retorik tentang penurunan UKT dan dugaan “cukong” di balik kampus pendukung tambang juga berfungsi menajamkan skeptisisme publik. Sebaliknya, retorika pihak pendukung menggunakan bahasa religius dan pragmatis seperti “niat baik” dan “nyucuk (untung),” yang secara implisit membingkai tambang sebagai peluang ekonomi. Kontras retorik ini mempertegas pertarungan nilai antara idealisme akademik dan rasionalitas bisnis dalam isu revisi UU Minerba.

Pemberitaan ini menempatkan sikap penolakan dari kalangan akademik sebagai fokus utama sejak awal, sehingga pembaca langsung diarahkan pada pandangan kritis terhadap keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang. Penyajiannya didominasi oleh argumentasi yang menekankan aspek etika, lingkungan, serta integritas dan independensi kampus, sebelum kemudian menghadirkan pandangan berbeda sebagai bentuk pro dan kontra. Alur berita membangun konflik gagasan secara bertahap, dari penolakan yang tegas hingga respons yang lebih pragmatis, tanpa memberikan penilaian eksplisit dari wartawan. Tema besar yang muncul berkisar pada kekhawatiran akan pergeseran jati diri perguruan tinggi jika masuk ke ranah industri ekstraktif. Secara keseluruhan, berita ini membingkai isu sebagai pertarungan nilai antara idealisme akademik dan kepentingan bisnis dalam konteks kebijakan sumber daya alam.

5. Bahaya RUU Minerba Izinkan Kampus Kelola Tambang Demi Pendidikan Murah

Sintaksis: Secara sintaksis, berita ini disusun dengan nada kritis sejak awal melalui penggunaan metafora “karpet merah” pada lead, yang secara langsung memberi penilaian negatif terhadap revisi RUU Minerba. Struktur berita menempatkan proses legislasi DPR yang mendadak, dilakukan saat reses, dan

tidak masuk Prolegnas sebagai konteks utama sebelum masuk ke substansi aturan. Kutipan dari berbagai pihak, seperti anggota DPR, pimpinan perguruan tinggi, pengamat ekonomi, hingga pengamat pendidikan, disusun dengan dominasi suara penolak, sementara pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ditempatkan sebagai bantahan singkat. Susunan ini menunjukkan wartawan lebih banyak memberi ruang pada kritik dibanding pembelaan, sehingga arah *framing* cenderung mempertanyakan legitimasi dan dampak kebijakan.

Skrip: Dari sisi skrip, alur penceritaan dibangun secara bertahap dengan pola sebab-akibat. Berita dimulai dari kemunculan ide perluasan kewenangan kampus mengelola tambang, lalu berlanjut pada proses pengesahan draf RUU yang dinilai tergesa-gesa. Setelah itu, konflik dikembangkan melalui paparan kritik berlapis dari DPR sendiri, kampus, ekonom, dan pengamat pendidikan. Strategi ini membuat pembaca mengikuti alur dari kebijakan, potensi masalah, risiko jangka panjang, sebelum ditutup dengan kekhawatiran paling serius, yakni hilangnya daya kritis kampus. Skrip semacam ini memperkuat kesan bahwa kebijakan bukan sekadar teknis, tetapi berimplikasi sistemik.

Tematik: Secara tematik, berita ini membangun tema besar tentang penyimpangan fungsi perguruan tinggi akibat intervensi kebijakan ekonomi-politik negara. Tema tersebut dikembangkan melalui subtema independensi kampus, degradasi misi pendidikan, dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Argumen bahwa pengelolaan tambang bukan business process perguruan tinggi diulang oleh beberapa narasumber, sehingga membentuk konsensus tematik bahwa aturan ini “salah arah.” Narasi tandingan hadir, seperti bahwa kebijakan bertujuan membantu pendanaan kampus, tetapi tidak dikembangkan secara mendalam, sehingga tema kritik terhadap negara dan DPR tetap menjadi benang merah utama.

Retoris: Dalam aspek retorik, wartawan menekankan *framing* kritis melalui pilihan diksi dan simbol yang kuat seperti “karpet merah,” “terkooptasi,” “antisains,” “merusak muruah pendidikan tinggi,” dan “self censorship.” Metafora ini memperkuat kesan bahaya laten yang tidak kasatmata namun mengancam nilai-nilai demokrasi dan akademik. Penyertaan foto sungai tercemar tambang juga berfungsi sebagai penekanan visual atas dampak

lingkungan yang dikaitkan dengan sektor pertambangan. Retorika keseluruhan berita membingkai revisi RUU Minerba bukan sebagai solusi ekonomi, melainkan sebagai ancaman ideologis terhadap dunia pendidikan tinggi dan kebebasan berpikir.

Pemberitaan ini dibangun dengan nada kritis sejak awal, sehingga pembaca langsung diarahkan untuk melihat revisi RUU Minerba sebagai kebijakan yang problematis. Penyajiannya menekankan proses legislasi yang dinilai janggal serta memuat lebih banyak suara penolak dibanding pembela, sehingga legitimasi dan urgensi kebijakan cenderung dipertanyakan. Alur cerita berkembang dari kemunculan gagasan hingga potensi dampak jangka panjangnya, terutama terhadap independensi dan fungsi dasar perguruan tinggi. Tema besar yang mengemuka adalah kekhawatiran atas penyimpangan misi pendidikan akibat tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik negara. Secara keseluruhan, berita ini membingkai revisi kebijakan sebagai ancaman terhadap nilai akademik, demokrasi, dan kebebasan berpikir, bukan semata persoalan teknis regulasi.

Analisis Framing CNN Indonesia

Sintaksis: Secara umum, penulisan *CNN Indonesia* menempatkan isu utama dan sudut pandang kritis sejak judul dan lead berita. Struktur berita cenderung memanfaatkan diksi evaluatif atau metaforis untuk langsung memberi konteks makna kepada pembaca. Kutipan narasumber disusun berlapis, dengan dominasi pernyataan dari aktor yang mengkritisi kebijakan, sementara suara pemerintah atau pembuat kebijakan biasanya dihadirkan sebagai pembanding atau klarifikasi. Pola ini menciptakan kesan keberimbangan formal, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada problematika kebijakan dan dampaknya.

Skrip: Dari sisi skrip, *CNN Indonesia* umumnya menggunakan alur sebab–akibat atau problem–reaksi dalam menyampaikan peristiwa. Berita sering diawali dengan pemicu kebijakan atau keputusan politik, lalu diikuti reaksi dari berbagai pihak, khususnya kelompok terdampak, pengamat, atau masyarakat sipil. Strategi penceritaan ini membuat isu kompleks menjadi mudah dipahami dan memberi ruang bagi pembaca untuk mengikuti logika kritik secara bertahap. Konflik atau kontroversi biasanya dibangun terlebih dahulu, baru kemudian

diikuti pembelaan atau penjelasan dari pihak otoritas.

Tematik: Secara tematik, *CNN Indonesia* kerap mengembangkan tema besar yang berkaitan dengan demokrasi, transparansi, tata kelola, dan kepentingan publik. Fakta-fakta dipilih dan disusun untuk menegaskan relasi kuasa antara negara, elite politik, dan masyarakat. Isu kebijakan jarang diperlakukan sebagai persoalan teknis semata, melainkan dikaitkan dengan dampak jangka panjang seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, atau independensi institusi. Tema tandingan dari pemerintah biasanya tetap hadir, namun tidak selalu menjadi kerangka utama dalam keseluruhan narasi.

Retoris: Dalam aspek retorik, *CNN Indonesia* cenderung menggunakan pilihan kata yang sugestif, metafora, dan kutipan bernada kuat untuk menekankan urgensi atau risiko suatu kebijakan. Istilah seperti “karpet merah,” “dikebut,” “dipaksakan,” atau “membungkam kritik” sering muncul untuk mempertegas *framing*. Selain teks, elemen visual seperti foto, infografik, atau judul tambahan dimanfaatkan untuk memperkuat pesan utama. Penekanan retorik ini membuat berita tidak sekadar informatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis pembaca terhadap isu yang diangkat.

D. Kategorisasi Tema

Berdasarkan hasil yang didapat, berikut kategorisasi tema dari keseluruhan sampel berita yang diambil.

A. Kompas.com

1. Tema Kehatiahatian Akademik dan Tanggung Jawab Moral Perguruan Tinggi

Tema ini muncul dalam pemberitaan yang menempatkan perguruan tinggi sebagai institusi yang harus menjaga posisi moral, intelektual, serta tanggung jawab sosial-ekologis. *Framing* menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum keterlibatan kampus dalam pengelolaan tambang. Penggunaan diksi seperti “perlu kajian lebih komprehensif” dan penekanan pada peran ekologis menunjukkan adanya konstruksi moral bahwa kampus tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga pada nilai etika dan keberlanjutan. Tema ini dapat dilihat pada berita berjudul “Soal Wacana Pemberian Izin Tambang kepada Perguruan Tinggi, Rektor Unimal: Perlu Kajian Komprehensif” edisi 22 Januari 2025.

2. Tema Dukungan Pragmatis dan Kesiapan Institusional

Tema ini terlihat pada pemberitaan yang membingkai perguruan tinggi sebagai aktor yang siap berpartisipasi dalam pengelolaan tambang. Penekanan diberikan pada ketersediaan sumber daya manusia, peluang ekonomi, serta kesiapan teknis, meskipun tetap mempertimbangkan aspek permodalan. Diksi seperti “merespon positif” memperlihatkan kecenderungan afirmatif terhadap kebijakan, sehingga kampus diposisikan sebagai institusi yang adaptif terhadap peluang kebijakan publik.

3. Tema Pro-Kontra dan Kontestasi Wacana Kebijakan

Tema ini muncul dari pemberitaan yang menghadirkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun menolak kebijakan izin tambang bagi perguruan tinggi. *Framing* menonjolkan dinamika perdebatan publik dengan menghadirkan diksi seperti “kesempatan” dan “membingungkan”. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut belum mencapai konsensus, melainkan masih berada dalam ruang diskursus yang terbuka dan diperdebatkan. Tema ini dapat dilihat pada berita yang berjudul “Iming-Iming Kelola Tambang untuk Perguruan Tinggi” edisi 23 Januari 2025.

4. Tema Kritik Kapasitas dan Kesiapan Teknis Perguruan Tinggi

Tema ini menekankan pada keraguan terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola sektor pertambangan. *Framing* berfokus pada keterbatasan kompetensi, perbedaan spesialisasi akademik, serta kompleksitas teknis industri tambang. Penggunaan diksi seperti “rawan konflik” dan argumentasi berbasis keilmuan memperkuat konstruksi bahwa kebijakan ini berisiko jika tidak didukung kesiapan yang memadai.

5. Tema Legitimasi Politik dan Prosedural Kebijakan

Tema ini tampak pada pemberitaan yang membingkai revisi Undang-Undang Minerba sebagai kebijakan yang sah, prosedural, dan memiliki legitimasi kelembagaan. Penonjolan pada proses formal di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta minimnya suara oposisi membangun kesan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil konsensus politik yang kuat dan terstruktur.

6. Tema Rasionalisasi Ekonomi dan Kesejahteraan

Tema ini membingkai kebijakan izin tambang sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan pendanaan perguruan tinggi dan kesejahteraan masyarakat.

Penekanan pada manfaat ekonomi, kemandirian institusi, serta peluang hilirisasi menunjukkan bahwa kebijakan diposisikan sebagai langkah rasional dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Tema ini terdapat pada berita berjudul “Pimpinan DPR Sebut Tambang Bisa Jadi Sumber Uang untuk Kampus” edisi 23 Januari 2025.

7. Tema Partisipasi Sukarela dan Fleksibilitas Kebijakan

Tema ini menonjolkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang bersifat opsional, bukan kewajiban. *Framing* diarahkan untuk membangun kesan bahwa kebijakan bersifat akomodatif dan tidak memaksa, sehingga mengurangi potensi resistensi. Penekanan ini juga memperkuat citra pembuat kebijakan sebagai aktor yang responsif terhadap berbagai kemungkinan sikap institusi.

8. Tema Ketidakasinkronan Antar Aktor Kebijakan

Tema ini muncul dari pemberitaan yang menunjukkan adanya perbedaan respons antara lembaga legislatif dan eksekutif. *Framing* menampilkan bahwa inisiatif kebijakan lebih dominan berasal dari DPR, sementara pemerintah belum memberikan respons substantif. Hal ini membangun makna bahwa kebijakan masih berada pada tahap awal dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Mendakiti Sebut Pemerintah Belum Bahas Wacana Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi” edisi 23 Januari 2025.

9. Tema Problematisasi Kapasitas Kelembagaan

Tema ini menekankan bahwa tidak semua perguruan tinggi memiliki kesiapan struktural dan akademik untuk terlibat dalam pengelolaan tambang. Argumentasi yang digunakan bersifat teknis dan regulatif, seperti keterbatasan program studi dan kompleksitas industri tambang. *Framing* ini memperlihatkan bahwa kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan implementatif jika tidak disertai kesiapan kelembagaan yang memadai.

10. Tema Kompleksitas Teknis dan Resiko Implementasi

Tema ini membingkai pengelolaan tambang sebagai aktivitas yang kompleks, membutuhkan modal besar, serta memiliki risiko tinggi. Penjelasan teknis mengenai tahapan pertambangan dan kebutuhan investasi memperkuat konstruksi bahwa kebijakan tidak dapat dijalankan secara sederhana. Dengan demikian, fokus *framing* terletak pada aspek praktis dan teknokratis, bukan

sekadar wacana normatif. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “ITB: Kami Masih Berpikir Keras untuk Kelola Tambang” edisi 23 Januari 2025.

Kesimpulan Kategorisasi Tema *Kompas.com*

Secara keseluruhan, pemberitaan *Kompas.com* menunjukkan kecenderungan *framing* yang beragam, mulai dari dukungan terhadap kebijakan hingga kritik terhadap kesiapan perguruan tinggi. Tema-tema yang muncul merefleksikan adanya kontestasi antara logika ekonomi, legitimasi politik, dan tanggung jawab akademik, yang menempatkan perguruan tinggi dalam posisi dilematis antara peran moral-intelektual dan tuntutan pragmatis kebijakan publik.

B. *Tempo.co*

1. Tema Kontestasi antara Legitimasi Politik dan Kritik Normatif

Tema ini muncul kuat dalam pemberitaan yang menampilkan tarik-menarik antara pembenaran kebijakan oleh aktor politik dan kritik dari kalangan akademisi maupun masyarakat sipil. *Framing* menempatkan kebijakan izin tambang sebagai sesuatu yang sah secara prosedural, namun dipersoalkan dari sisi tanggung jawab negara terhadap pendidikan, nilai konstitusional, serta dampak lingkungan. Kontras antara diksi legitimatif dan kritik normatif menegaskan bahwa isu ini berada dalam arena perdebatan nilai, bukan sekadar kebijakan teknis.

2. Tema Kehati-hatian Akademik terhadap Orientasi Bisnis pendidikan

Tema ini menyoroti kekhawatiran bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor tambang berpotensi menggeser orientasi utama pendidikan. *Framing* menekankan perlunya kajian mendalam agar logika bisnis tidak mendominasi fungsi akademik. Perguruan tinggi diposisikan sebagai institusi yang harus menjaga integritas keilmuan dan tidak terjebak dalam komersialisasi berlebihan. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Komisi X DPR Minta Usulan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Dikaji dengan Benar” edisi 23 Januari 2025.

3. Tema Sikap Terbuka Bersyarat dan Dilema Institusional

Tema ini terlihat pada pemberitaan yang membingkai respons perguruan

tinggi sebagai terbuka terhadap peluang, namun tetap disertai kehati-hatian. *Framing* menampilkan adanya dilema antara potensi manfaat ekonomi dan risiko etis, lingkungan, serta keberlanjutan institusi. Dengan demikian, penerimaan terhadap kebijakan tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada berbagai prasyarat akademik dan struktural.

4. Tema Konflik Terbuka antara Komunitas Kampus dan Negara

Tema ini muncul dari pemberitaan yang menonjolkan resistensi dari kelompok kampus, seperti serikat pekerja dan mahasiswa. *Framing* membangun narasi konflik antara nilai-nilai akademik—seperti kebebasan berpikir, independensi, dan keberpihakan pada lingkungan—dengan kepentingan negara yang mendorong kebijakan berbasis ekonomi. Diksi yang digunakan cenderung konfrontatif, sehingga memperkuat kesan pertentangan ideologis. Tema ini terdapat pada berita berjudul “Serikat Pekerja Kampus Tolak Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi” edisi 25 Januari 2025.

5. Tema Tarik-menarik antara Pragmatisme Ekonomi dan Idealisme Pendidikan

Tema ini menjadi benang merah dalam beberapa pemberitaan yang memperlihatkan dualisme antara kepentingan pendanaan dan nilai akademik. *Framing* menempatkan perguruan tinggi dalam posisi dilematis: di satu sisi sebagai aktor ekonomi yang rasional, di sisi lain sebagai penjaga nilai moral dan intelektual. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika pendidikan. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Serikat Pekerja Kampus Tolak Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi” edisi 25 Januari 2025.

6. Tema Kritik Kapasitas, Resiko, dan Kompleksitas Industri Tambang

Tema ini menekankan bahwa pengelolaan tambang merupakan aktivitas dengan risiko tinggi, membutuhkan modal besar, serta memiliki kompleksitas teknis yang tidak sederhana. *Framing* menghadirkan argumen berbasis rasionalitas ekonomi dan teknis untuk mempertanyakan kesiapan perguruan tinggi maupun organisasi lain. Selain itu, potensi konflik sosial dan sengketa dengan masyarakat turut memperkuat konstruksi risiko.

7. Tema Perguruan Tinggi sebagai Institusi Rasional dan Reputasional

Tema ini membingkai kampus sebagai aktor yang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, seperti reputasi, dampak

lingkungan, serta tanggung jawab akademik. *Framing* menekankan bahwa keputusan terkait tambang tidak hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan jangka panjang terhadap citra dan integritas institusi. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Tolak Izin Kelola Tambang, PGI Soroti Biaya dan Risiko Tinggi Industri Kreatif” edisi 28 Januari 2025.

8. Tema Polarisasi Wacana antara Aktor Sosial dan Negara

Tema ini muncul dari pemberitaan yang memperlihatkan perbedaan tajam antara pandangan mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. *Framing* menunjukkan adanya polarisasi antara kubu yang melihat kebijakan sebagai solusi ekonomi dan kubu yang menilainya sebagai ancaman terhadap nilai akademik dan lingkungan. Perbedaan ini memperkuat karakter isu sebagai polemik publik.

9. Tema Dominasi Narasi Kritik terhadap Resiko Struktural

Tema ini menonjolkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang kebijakan, seperti konflik kepentingan, pelemahan independensi kampus, serta hambatan terhadap transisi energi. *Framing* didominasi oleh suara kritis yang menggunakan diksi kuat untuk menegaskan potensi ancaman struktural, baik terhadap institusi pendidikan maupun tata kelola sumber daya alam.

10. Tema Polemik Kebijakan sebagai Pertarungan Nilai

Tema ini merupakan sintesis dari keseluruhan *framing* yang ada. Pemberitaan membingkai isu izin tambang bukan hanya sebagai kebijakan publik, melainkan sebagai pertarungan nilai antara keberlanjutan lingkungan, kebebasan akademik, tanggung jawab negara, dan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, isu ini diposisikan sebagai perdebatan multidimensional yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan etika. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “UU Dinilai Bisa Bikin Kampus Disetir Perusahaan Tambang Minerba” edisi 22 Februari 2025.

Kesimpulan Kategorisasi Tema *Tempo.co*

Secara keseluruhan, pemberitaan *Tempo.co* menunjukkan kecenderungan *framing* yang lebih kritis dan dialogis, dengan memberikan ruang signifikan bagi suara oposisi dan refleksi normatif. Tema-tema yang muncul memperlihatkan

bahwa wacana izin tambang bagi perguruan tinggi dibangun sebagai arena kontestasi nilai antara legitimasi politik, rasionalitas ekonomi, dan idealisme pendidikan, sehingga menempatkan isu ini dalam kerangka polemik publik yang kompleks dan berlapis.

C. CNN Indonesia

1. Tema Legitimasi Politik dan Dominasi Perspektif Institusional

Tema ini muncul pada pemberitaan yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai aktor utama dalam proses revisi kebijakan. *Framing* menekankan aspek prosedural, otoritas, dan kepentingan nasional, sehingga kebijakan diposisikan sebagai langkah strategis negara. Minimnya ruang bagi suara kritis menyebabkan pemberitaan cenderung normatif dan pro-kebijakan, dengan konstruksi makna yang memperkuat legitimasi politik serta dominasi perspektif elite.

2. Tema Kritik Masyarakat Sipil dan Problematisasi Kebijakan

Tema ini terlihat pada pemberitaan yang menonjolkan penolakan dari koalisi masyarakat sipil. *Framing* berfokus pada isu transparansi, akuntabilitas, serta potensi dampak negatif terhadap tata kelola sumber daya alam. Penyusunan narasi yang diawali dari kritik kemudian diikuti klarifikasi pemerintah membangun kesan bahwa kebijakan tersebut sarat persoalan. Dengan demikian, revisi undang-undang diposisikan sebagai kebijakan yang kontroversial dan berisiko. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “4 Pasal Dinilai dalam Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba” edisi 20 Januari 2025.

3. Tema Konflik Kepentingan dan Relasi Kuasa

Tema ini muncul dalam pemberitaan yang menampilkan perdebatan antara aktor politik dan organisasi masyarakat, termasuk kelompok keagamaan. *Framing* menyoroti adanya dugaan motif politis, independensi aktor non-negara, serta legitimasi moral kebijakan. Struktur narasi yang berfokus pada adu argumen memperkuat konstruksi konflik sebagai pusat wacana, sehingga isu dipahami sebagai pertarungan kepentingan dalam ranah politik, sosial, dan etika. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Izin Tambang Ormas Dinilai Sogokan Bungkam, NU-Muhammadiyah Buka Suara” edisi 23 Januari 2025.

4. Tema Pertarungan Nilai Idealisme Akademik dan Kepentingan Ekonomi

Tema ini menempatkan kalangan akademik sebagai aktor utama yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan. *Framing* menekankan aspek etika, lingkungan, serta integritas perguruan tinggi, yang dipertentangkan dengan kepentingan bisnis dalam sektor ekstraktif. Dengan menghadirkan pro dan kontra secara berimbang, pemberitaan membangun makna bahwa isu ini merupakan konflik nilai antara jati diri akademik dan tuntutan pragmatis ekonomi. Tema ini terdapat pada berita yang berjudul “Rektor UII Tolak Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Sentil Fungsi Kampus” edisi 26 Januari 2025.

5. Tema Kritik Struktural atas Kebijakan dan Ancaman terhadap Nilai Demokrasi

Tema ini ditandai oleh dominasi suara kritis yang mempertanyakan proses legislasi serta dampak jangka panjang kebijakan. *Framing* membangun narasi bahwa revisi kebijakan berpotensi mengancam independensi perguruan tinggi, kebebasan berpikir, dan prinsip demokrasi. Penekanan pada aspek prosedural yang dianggap janggal serta dominasi perspektif penolak memperkuat konstruksi bahwa kebijakan tidak sekadar bermasalah secara teknis, tetapi juga secara struktural dan normatif.

Kesimpulan Kategorisasi Tema CNN Indonesia

Secara keseluruhan, pemberitaan menunjukkan adanya variasi *framing* yang mencerminkan dua kecenderungan besar, yaitu legitimasi kebijakan oleh aktor institusional dan kritik terhadap kebijakan dari masyarakat sipil serta kalangan akademik. Tema-tema yang muncul merefleksikan bahwa revisi Undang-Undang Minerba tidak hanya dipahami sebagai kebijakan publik, tetapi juga sebagai arena kontestasi antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai demokrasi serta akademik.

D. Tema Besar Pemberitaan

1. Legitimasi Politik dan Kritik Publik

Tema ini menjadi benang merah utama yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara upaya legitimasi kebijakan oleh aktor negara dengan kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya. Di satu sisi, kebijakan dibingkai sebagai sah, prosedural, dan strategis; di sisi lain,

dipersoalkan dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola sumber daya alam. Tema ini terdapat pada pemberitaan yang berjudul, “Revisi UU Minerba Diketok Jadi RUU Usul Inisiatif DPR” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang Seperti Ormas di RUU Minerba” edisi 20 Januari 2025 oleh *CNN Indonesia*, “4 Pasal Dinilai dalam Revisi Ugal-Ugalan UU Minerba” edisi 20 Januari 2025 oleh *CNN Indonesia*, “Soal Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi di RUU Minerba, Dasco: Semangatnya untuk Cari Dana Universitas” edisi 23 Januari 2025 oleh *Tempo.co*.

2. Tema Dukungan Pragmatis dan Kesiapan Institusional

Tema ini menempatkan perguruan tinggi dalam posisi dilematis antara menjaga nilai moral, intelektual, dan independensi akademik, dengan tuntutan untuk beradaptasi terhadap peluang ekonomi melalui pengelolaan tambang. *Framing* yang muncul memperlihatkan konflik antara peran kampus sebagai penjaga nilai dan sebagai aktor ekonomi. Tema ini terdapat pada berita, “Pimpinan DPR Sebut Tambang Bisa Jadi Sumber Uang untuk Kampus” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Unhas: Kampus kelola Tambang Jadi Peluang Atasi Masalah Pembiayaan” edisi 25 Januari 2025 oleh *Tempo.co*, ”PNL Lhokseumawe: Kami Punya Prodi Migas, Diberi Kawasan Tambang Sangat Siap” edisi 22 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Universitas Padjadjaran Merespons Positif Izin Tambang buat Kampus” edisi 24 Januari 2025 oleh *Tempo.co*.

3. Kapasitas Kampus dan Resiko Pengelolaan Tambang

Tema ini menyoroti keraguan terhadap kesiapan perguruan tinggi dan aktor non-negara dalam mengelola sektor pertambangan. Wacana yang dibangun menekankan kompleksitas teknis, kebutuhan modal besar, potensi konflik sosial, serta risiko lingkungan, sehingga kebijakan dipandang belum sepenuhnya matang secara implementatif. Tema ini terdapat pada pemberitaan yang berjudul, “ITB: Kami Masih Berpikir Keras untuk Kelola Tambang” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Muhammadiyah: Tidak Semua Perguruan Tinggi Siap Kelola Tambang” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Wacana Kampus Boleh Kelola Tambang Dinilai Dapat Timbulkan Konflik” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*, “Soal Wacana Pemberian Izin Tambang

kepada Perguruan Tinggi, Rektor Unimal: Perlu Kajian Komprehensif” edisi 22 Januari 2025 oleh *Kompas.com*.

4. Polarisasi antara Aktor Negara dan Masyarakat Sipil

Tema ini menggambarkan adanya pembelahan posisi yang cukup tegas antara aktor negara (pemerintah dan legislatif) dengan masyarakat sipil (akademisi, mahasiswa, LSM, dan organisasi keagamaan). Masing-masing aktor membangun *framing* yang berbeda, sehingga isu berkembang sebagai polemik publik yang sarat perdebatan dan tidak mencapai konsensus. Tema ini terdapat pada pemberitaan yang berjudul, “Serikat Pekerja Kampus Tolak Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi” edisi 25 Januari 2025 oleh *Tempo.co*, “Izin Tambang untuk Kampus Disebut Bisa Turunkan UKT, BEM SI: Kami Tidak Bodoh” edisi 26 Januari 2025 oleh *Tempo.co*. “Izin Tambang Ormas Dinilai Sogokan Bungkam, NU-Muhammadiyah Buka Suara” edisi 23 Januari 2025 oleh *CNN Indonesia*, “UU Dinilai Bisa Bikin Kampus Disetir Perusahaan Tambang Minerba” edisi 22 Februari 2025 oleh *Tempo.co*.

5. Pergeseran Makna Pendidikan Tinggi

Tema ini merefleksikan kekhawatiran bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor tambang dapat menggeser orientasi pendidikan dari fungsi akademik menuju fungsi ekonomi. Wacana yang berkembang menunjukkan adanya potensi redefinisi peran kampus dalam kerangka kebijakan negara, yang tidak lagi semata sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem produksi ekonomi. Tema ini terdapat pada pemberitaan yang berjudul, “Rektor UII Tolak Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Sentil Fungsi Kampus” edisi 26 Januari 2025 oleh *CNN Indonesia*, “Bahaya RUU Minerba Izinkan Kampus Kelola Tambang Demi Pendidikan Murah” edisi 31 Januari 2025 oleh *CNN Indonesia*, “Beberapa Rektor Bersuara Soal Pemberian Izin Tambang untuk Kampus” edisi 31 Januari 2025 oleh *Tempo.co*, “Tak Paksa Kampus Terima Konsesi Tambang, Baleg: Kalau Menolak, Enggak Apa” edisi 23 Januari 2025 oleh *Kompas.com*.

E. Perbedaan *Framing* *Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*

Tabel 3. 1 Kesimpulan *Framing* Tiga Media

Komponen Framing	<i>Kompas.com</i>	<i>Tempo.co</i>	<i>CNN Indonesia</i>
Sintaksis	Disusun kronologis dan sistematis dengan menghadirkan fakta utama lalu respons berbagai pihak secara relatif seimbang.	Membuka berita dengan suara kritis atau penolak kebijakan. Pihak pemerintah ditempatkan belakangan sebagai penyeimbang. Menekankan konflik dan risiko sejak awal.	Isu dan sudut pandang kritis langsung ditonjolkan sejak judul dan lead dengan diksi evaluatif/metaforis. Kritik lebih dominan, pemerintah sebagai pembanding.
Skrip	Menekankan dilema dan proses kebijakan. Konflik disajikan bersama upaya solusi atau respons institusional.	Alur bertahap dan mendalam: masalah, dampak, analisis resiko, tanggapan pihak lain. Fokus kepada kompleksitas isu.	Menggunakan alur sebab akibat, atau problem reaksi. Seperti kebijakan, lalu kritik, dan diakhiri klarifikasi otoritas. Konflik dibangun lebih dulu.
Tematik	Mengangkat tema keseimbangan antara hukum, ekonomi, pendidikan, dan kepentingan publik.	Berfokus pada risiko dan konsekuensi kebijakan: independensi, konflik kepentingan, lingkungan, dan dampak jangka panjang.	Menekankan demokrasi, transparansi, relasi kuasa, dan dampak kebijakan terhadap publik. Tema kritik lebih dominan.
Retoris	Bahasa cenderung netral dan institusional, menekankan legitimasi, tanggung jawab, dan kehati-hatian kebijakan.	Diksi bernada ancaman dan kontroversi seperti “dibungkam” “integritas terancam”. Menjadikan kutipan kritis sebagai inti narasi	Diksi sugestif dan metaforis seperti “karpas merah”, “dikebut”, “dipaksakan”. Serta visual pendukung untuk membangun kesadaran kritis

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana tiga media online (*Kompas.com*, *Tempo.co*, dan *CNN Indonesia*) dalam membingkai pemberitaan mengenai wacana pemberian Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) kepada universitas. Penelitian mengambil sampel sebanyak 25 berita. 10 berita dari *Kompas.com*, 10 berita dari *Tempo.co* dan 5 berita dari *CNN Indonesia*.

Dalam media *Kompas.com*, berita ditulis dengan fakta kronologis dan sistematis. Pemberitaan ditulis dengan menghadirkan terlebih dahulu fakta utama bagaimana isu ini bisa terjadi. Lalu setelahnya ditimbulkan respons dari berbagai pihak. Respons yang ditimbulkan cenderung seimbang, artinya berita ditulis dengan memperhatikan perspektif dari pihak pro dan kontra. Isi berita relatif membahas tentang bagaimana sebuah isu menjadi dilema dan bagaimana proses sebuah kebijakan muncul. Setelahnya, disajikan bagaimana upaya dan solusi dari isu tersebut. Tema yang diangkat memperhatikan keseimbangan antara hukum, ekonomi, pendidikan, dan kepentingan publik. Bahasa yang disajikan dalam berita cenderung netral, cenderung membahas bagaimana tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menyikapi sebuah pemberitaan.

Dalam media *Tempo.co*, berita ditulis dengan bunyi yang kritis atau dengan nada penolakan atas kebijakan. Dalam penulisannya, pihak pemerintah ditempatkan belakangan hanya sebagai penyeimbang. Penulisan berfokus kepada penekanan konflik dan risiko dari sebuah kebijakan. Penulisan disusun secara sistematis, yaitu dimulai dengan masalah, dampak, analisis resiko, dan tanggapan. Tema yang diangkat cenderung dalam lingkup independensi, konflik kepentingan, lingkungan, dan dampak secara panjang. Gaya bahasa yang dipakai tidak jarang bernada ancaman, seperti “dibungkam”.

Dalam *CNN Indonesia*, berita menonjolkan isu dan sudut pandang yang kritis. Hal ini terlihat sejak judul dan lead. Kritik lebih dominan dan pemerintah hanya muncul sebagai pembanding. Penulisan mempunyai alur sebab akibat. Seperti kebijakan, lalu kritik, dan diakhiri dengan tanggapan otoritas. Hanya, konflik dibangun terlebih dahulu dalam pemberitaan. Penulisan berfokus kepada tema demokrasi, transparansi, relasi kuasa, dan dampak kebijakan terhadap publik. Gaya penulisan cenderung menggunakan gaya yang sugestif dan metaforis yang digunakan untuk membangun kesadaran kritis. Contoh kalimatnya adalah “karpet merah”, “dikebut”, dan “dipaksakan”.

Jika mengaitkan 3 peran media (informasi, edukasi, dan pengawasan) dalam pemberitaan dari tiga media ini, maka akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dalam pemberitaan oleh *Kompas.com*, banyak menjelaskan terkait latar belakang, mekanisme WIUP, dan menghadirkan berbagai narasumber. Maka, *Kompas.com* menunjukkan peran yang lebih cenderung kepada informasi dan edukasi, pengawasan juga muncul. Namun bukan sebagai titik fokus utama.

Dalam *Tempo.co*, banyak menonjolkan kiritk terhadap kebijakan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, terutama mulai pilihan narasumber, judul, dan penekatan terhadap konflik dan dampak. Maka, peran yang paling menonjol dalam *Tempo.co* adalah pengawasan. Namun peran informasi juga hadir dengan penjelasan terkait perkembangan UU Minerba dan subtansi usulan kebijakan. Peran edukasi juga tampak melalui penjelasan mengenai implikasi kebijakan terhadap perguruan tinggi. Maka, peran informasi dan edukasi tidak sekuat peran pengawasan.

Dalam *CNN Indonesia*, lebih banyak menjalankan peran informasi. Berita disusun dengan menekankan fakta-fakta usulan, tanggapan pemerintah, serta

respon dari berbagai pihak. Fungsi edukasi juga muncul, namun tidak dibahas secara mendalam, hanya ditampilkan melalui pendapat singkat oleh pakar. Peran pengawasan juga dihadirkan, namun tidak secara eksplisit. Pengawasan yang dibangun lewat kritik, seringkali ditampilkan sejak judul dan lead dengan penggunaan diksi yang terdengar

Kategorisasi tema dalam penelitian ini mengambil patokan dari masing-masing berita. Namun, seluruh kategorisasi tema tersebut bisa dikerucutkan dalam lima tema besar yaitu, legitimasi politik dan kritik publik, dilema perguruan tinggi: antara idealisme akademik dan pragmatisme ekonomi, kapasitas kampus dan resiko pengelolaan tambang, polarisasi antara aktor negara dan masyarakat sipil, dan pergeseran makna pendidikan tinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada metode penelitian yang satu faktor dan faktor lainnya mempunyai kemiripan. Alhasil, analisis yang dibuat mempunyai beberapa kemiripan dalam satu faktor dan faktor lainnya. Seperti sintaksis dan skrip, yaitu cara wartawan menyusun fakta dan cara wartawan menuliskan fakta. Terlihat dari hasilnya, kedua faktor ini saling bisa menjelaskan satu sama lain. Keterbatasan penelitian yang lain adalah pengambilan sampel media. Mungkin, akan lebih terasa perbedaannya jika sampel yang diambil lebih dari 3 media.

C. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang menunjukkan adanya kemiripan atau keterkaitan antar faktor yang diteliti. Kondisi tersebut menyebabkan batas antar faktor menjadi kurang tegas, sehingga temuan yang diperoleh cenderung saling beririsan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih tepat dijelaskan dalam satu kerangka faktor yang lebih umum agar interpretasi menjadi lebih jelas. Maka dari itu, peneliti memberikan saran untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam menentukan metode analisis *framing*. Hal ini agar hasil yang didapatkan

menjadi jelas.

2. Penelitian ini mengambil 3 sampel media. Sehingga, perbedaan yang muncul dapat dikatakan tidak menunjukkan signifikansi yang berarti. Mungkin akan lebih terlihat perbedaan jika sampel yang diambil lebih dari 3 dan memasukkan media independen di dalamnya (bukan media konvensional). Dengan harapan media independen tidak terselip kepentingan pemilik saham di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. N., Erlandia, D. R., & Venus, A. (2016). Motif Anggota Komunitas Musik Hip Hop Run BDG Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1, 83-94.
- Akbar, H. (2023). Pemberitaan Isu Pemindahan Ibukota Baru Dalam Media Online Tribunjogja.com Dan Suara.com (Analisis Framing William Andre Gamson dan Modigliani Terhadap Tribunjogja.com Dan Suara.com). *dspace.uii*, 24.
- BBC NEWS INDONESIA. (2025, Februari 18). *RUU Minerba disahkan, pemerintah dan DPR batal beri konsesi tambang ke kampus – Siapa yang mengusulkan dan bagaimana awal mulanya?* Diambil kembali dari BBC NEWS INDONESIA: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c627gl29vvgo#:~:text=Pemberian%20IUP%20untuk%20perguruan%20tinggi,nilai%20tambah%20dan%20rantai%20pasok>.
- BPK RI. (2022). *ESDM: Tambang Ilegal Tersebar di 2741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja*. Kalimantan Selatan: UJDIH BPK Kalimantan Selatan.
- Bungin. (t.thn.). *Sosiologi Komunikasi*.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi* (1 ed.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Butsi, F. I. (2019). Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivis, dan Kritis dalam Metode Penelitian Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Qommunique*, 1, 53-62.

- Butsi, F. I. (2019). Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 1, 53-62.
- Denzin, K. N., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Dharma, F. A. (2018). Kontruks Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Burger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6, 1-12.
- Diana, & Hakim, L. (2020). Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah: Tinjauan Konseptual dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Journal Homepage*, 1-13.
- Eriyanto. (2002). *ANALISIS FRAMING Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media* (1 ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Kontruksi, Idiologi, Dan Politik Media* (1 ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Fatwa, B. H., Heryanto, G. G., Rifa, B., Wahyudi, S. A., & Rahman, W. F. (2025). Studi Ekonomi Media di CNN Indonesia TV: Eksistensi Pasar dan Strategi Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Media. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4*, 267-279.
- Haidar, A. (2024). Analisis Pemberitaan Tambang dan Lingkungan di Media Massa: Studi Kasus KabarBaru.co. 1-73.
- Hamad, I. (2004). *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa* (1 ed., Vol. 8). Jakarta: Granit.
- Hanitzsch, T. (2001). Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi. *MediaTor*, 2, 219.
- Hariyanti, A. (2020). Bingkai Media terhadap Kontroversi Isu Pertambangan di Indonesia pada Film Sexy Killers.
- Henrianto, A., Deno Okalia, & Mashadi. (2019). UJI BEBERAPA SIFAT TANAH BEKAS TAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) DI TIGA KECAMATAN DI DARATAN SEPANJANG SUNGAI KUANTAN. *Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA)*, 1, 19-31.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 1-13.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam

- Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20, 1-13.
- Kadewandana, D. (2008). Kontruksi Realitas di Media Massa (Analisis Framing terhadap Pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-P di Harian Kompas dan Republika). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 11.
- Kamaruddin. (2016). Kontruksi Realitas dalam Media Massa. *Jurnal Jurnalisme*, 1, 65.
- Karman. (2012). MEDIA DAN KONTRUKSI REALITAS (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kasus Ledakan Bom di Masjid Mapolres Cirebon). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16, 27-46.
- Kompas.com. (t.thn.). *About Us*. Diambil kembali dari Kompas.com Jernih Melihat Dunia: <https://inside.kompas.com/about-us>
- kompasgramedia.com. (t.thn.). *BRAND KAMI*. Diambil kembali dari Kompas Gramedia: <https://www.kompasgramedia.com/brand#:~:text=Harian%20Kompas%20berkantor%20pusat%20di,Nusantara%2C%20bagian%20dari%20Kompas%20Gramedia>.
- Lestar, D. (2017). Kontruksi Berita Jalur Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Analisis Framing pada Harian Kompas Edisi Juni-Juli 2016). *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultang Ageng Tirtayasa*, 1-232.
- Mandiri, E. (2021). Analisis Framing Berita Aksi Koalisi Desak Pencabutan Izin Tambang Batu Bara PT. Inmas pada Media Online di AntaraNews dan BengkuluToday.com Edisi 25 Oktober 2021. 1-86.
- Muhid, H. K. (2025, Januari 28). *Kekhawatiran Izin Usaha Tambang untuk Perguruan Tinggi Jadikan Kampus Tak Independen*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/kekhawatiran-izin-usaha-tambang-untuk-perguruan-tinggi-jadikan-kampus-tak-independen--1199634>
- Muktiyo, W. (2016). Komodifikasi Budaya dalam Kontruksi Realitas Media Massa. *MIMBAR*, 31, 113-122.
- Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20, 135-148.
- Novita, I., Nur, I., Rose, T., & Reyhan, M. (2021). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW DALAM MEDIA ONLINE VIVANEWS DAN TIRTO.ID). *Jurnal Syntac*

Admiration, 69-84.

- Nugroho, W., Imamulhadi, Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebiasaan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15, 817-835.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2, 793-800.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. *Political Communication*, 10(1), 55-75.
- Pratiwi, A. (2018). Kontruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Robert N. Entman). *Thaqafiyat*, 51-71.
- Putri, M. F., Tasya, V. N., & Prastika, A. D. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2, 214-224.
- Ramhadhani, A. N., Budiman, D. R., Ramadhani, K. S., Yaqin, E. N., Ramadhani, O. W., Ambami, M., . . . Arabela, A. P. (2025). Netralitas Media Tempo dalam Pemilu 2024: Framing Berita dan Pengaruhnya terhadap Opini Publik. *Jurnal Mediasi*, Volume 4, 271-284.
- Rayhan, T. M., & Putri, W. Y. (2020). Analisis Framing Seputar Inews Siang RCTI Segmen "Pilihan Indonesia 2019". *Inter Script: Journal of Creative Communication*, 2, 1-20.
- Romadlan, S., & Fauziah, I. (2022). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA ONLINE MENGENAI KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN DI DESA WADAS, JAWA TENGAH. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26, 53-70.
- Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share: Social Work Jurnal*, 10-19.
- Sekar, A. (2025, Mei 22). *Mengetahui Pentingnya Media Massa: Peran, Jenis, dan Dampaknya*. Diambil kembali dari Telkom University: <https://telkomuniversity.ac.id/mengetahui-pentingnya-media-massa-peran-jenis-dan-dampaknya/>
- Shohibuddin, M., & Endriatmo, S. (2023). *Mewujudkan Demokratitsasi Agraria*. Bogor:

Pusat Studi Agraria IPB.

- Sinaga, K. C. (2016). Analysis of Framing Bom Sarinah in Kompas.com and Merdeka.com News. *Jurnal Ilmu Komunikasi-Konsentrasi Jurnalistik*, 6, 1-12.
- Siswadi, A. (2025, Januari 24). *Universitas Padjadjaran Merespons Positif Izin Tambang buat Kampus*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/universitas-padjadjaran-merespons-positif-izin-tambang-buat-kampus-1198563>
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Solichin, M. M. (2017). *Paradigma Konstruktivisme dalam Belajar dan Pembelajaran*. Pamekasan Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sulistiani, I., Syarifuddin, & Rumangkit, O. (2023). Analisis Framing Isu Lingkungan Pada Media Online di Papua. *JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media*, 4, 95-106.
- Tempo.id. (t.thn.). *Tempo Media Group*. Diambil kembali dari Tempo Media Group, Sejarah Singkat, Filosofi Tempo: <https://www.tempo.id/corporate.php#tempo>
- Umam, A. K. (2021). *Reformasi Tata Kelola atukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia*". Dalam *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Umanaiolo, M. C. (2019). *Paradigma Konstruktivis*. 2.
- Universitas Bina Darma. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 3.
- Visi dan Misi. (t.thn.). Diambil kembali dari Kompasgramedia.com: <https://www.kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission>
- Wahyudin, U. (2017). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. *Jurnal Common*, 1, 130-134.
- Wardah, F. (2025, Januari 26). *Usul Pemberian Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi Tuai Kontroversi*. Diambil kembali dari VoA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/usul-pemberian-izin-tambang-untuk-perguruan-tinggi-tuai-kontroversi/7950709.html>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).

- Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2, 2896 - 2910.
- Wibowo, A. T. (2019). Kontruksi Realitas Media Online atas Pemberitaan Debat Kandidat pada Pemilihan Presiden 2019. *Nyimak: Journal of Communication*, 3, 167-182.
- Widirahayu, M. D. (2020). Peran Media dalam Pelestarian Lingkungan di Jayapura. *Jurnal JENDELA*, 2, 61-69.
- Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akutansi*, 15, 90-100.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1, 1-10.